

PENGEMBANGAN MADRASAH DI INDONESIA

PERSPEKTIF IMAM SUPRAYOGO

SKRIPSI



Oleh:

WHENI MASTNA NURRAKHIM

NIM: 210313226

FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

(IAIN) PONOROGO

JUNI 2017

ABSTRAK

Nurrakhim, Wheni Mastna. 2017. Pengembangan Madrasah di Indonesia Perspektif Imam Suprayogo. **Skripsi.** Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Jurusan Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing. Dr. Ahmad Choirul Rofiq, M.Fil.I

Kata Kunci: Imam Suprayogo, Kurikulum Madrasah, Peran Masyarakat, Pemberdayaan SDM

Madrasah merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam yang banyak diminati oleh masyarakat. Meskipun dengan kondisi yang sederhana, masyarakat tetap mempercayakan kemampuan madrasah dalam mengembangkan kecerdasan intelektual maupun kecerdasan spiritual peserta didiknya. Salah satu tokoh pemikir yang memperhatikan pengembangan madrasah di Indonesia yakni Imam Suprayogo. Untuk itulah, penelitian ini akan mengungkap bagaimana pengembangan madrasah di Indonesia menurut pemikiran Imam Suprayogo.

Rumusan masalah dalam kajian ini adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana peran masyarakat dalam peningkatan mutu pendidikan di madrasah perspektif Imam Suprayogo?; (2) Bagaimana pengembangan kurikulum madrasah di Indonesia perspektif Imam Suprayogo?; (3) Bagaimana pemberdayaan SDM di madrasah perspektif Imam Suprayogo?. Untuk menjawab permasalahan di atas, peneliti menggunakan jenis penelitian kajian pustaka (library research) dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik dokumentasi. Sedangkan teknik analisis datanya menggunakan teknis analisis isi (content analysis).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Peranan masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan di madrasah yakni melalui penyusunan POMG, PB3 dan komite sekolah yang terdiri dari para wali murid; (2) Pengembangan kurikulum madrasah di Indonesia dapat direalisasikan melalui kurikulum integratif yang berlandaskan al-Qur'an dan sunnah dalam rangka mengembangkan potensi spiritual, akhlak, aspek intelektual, dan potensi sosial peserta didik, yakni dengan mengintegrasikan antara pengembangan kehidupan keagamaan dan intelektual serta keterampilan peserta didik; (3) Pemberdayaan SDM di madrasah meliputi pemberdayaan kepala madrasah dengan cara meningkatkan kinerjanya dan pemberdayaan guru melalui pemenuhan honorarium yang layak serta pembentukan guru yang profesional melalui visi dan misi Fakultas (Jurusan) Tarbiyah sebagai LPTK yang melahirkan guru madrasah yang berkualitas.

Saran dalam karya ilmiah ini diajukan kepada: (1) Pemerintah, diharapkan mampu membuat kebijakan dalam penyusunan kurikulum madrasah yang sesuai dengan perkembangan zaman; (2) Praktisi pendidikan, hendaknya berusaha untuk berinovasi dan kreatif dalam memajukan pembelajaran di madrasah; (3) Masyarakat, alangkah baiknya apabila memperkuat komunikasi dengan praktisi pendidikan, utamanya di madrasah, agar dapat memajukan mutu madrasah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pendidikan madrasah memiliki andil besar dalam mengukir sejarah pencerahan peradaban umat Islam. Keberadaannya menunjukkan kepada dunia betapa lembaga ini telah mengukir prestasi besar dalam melahirkan ilmuwan-ilmuwan Islam yang tidak hanya berwibawa secara moralitas namun juga disegani secara akademik oleh ilmuwan-ilmuwan dunia. Oleh karena itu, lembaga pendidikan madrasah menjadi pilihan yang pertama dan utama bagi pendidikan umat.

Umat Islam tidak ingin kehilangan masa keemasan madrasah begitu saja. Maka dari itu, konsep pendidikan madrasah tetap dipertahankan serta direformasi sesuai dengan perkembangan zaman di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Sampai saat ini sudah ribuan madrasah didirikan dengan pola dan format yang beragam. Bersamaan dengan perkembangan zamannya, madrasah juga menjadi sasaran reformasi yang dilakukan secara terus menerus hanya untuk mengembalikan kejayaan madrasah seperti masa keemasannya terdahulu. Lembaga pendidikan madrasah yang merupakan bentuk lembaga pendidikan Islam pertama di Indonesia sampai saat ini masih banyak diminati oleh

masyarakat, khususnya yang menghendaki putra-putrinya memperoleh pendidikan agama sekaligus pendidikan umum yang memadai.¹

Saat ini pembangunan pendidikan nasional belum mencapai hasil sesuai yang diharapkan. Departemen Pendidikan Nasional selaku pemegang amanah pelaksanaan sistem pendidikan nasional memiliki kewajiban untuk mewujudkan misi pembangunan tersebut. Perspektif pembangunan pendidikan tidak hanya ditujukan untuk mengembangkan aspek intelektual saja melainkan juga watak, moral, sosial dan fisik peserta didik, atau dengan kata lain menciptakan manusia Indonesia seutuhnya. Dalam mewujudkan hal itu perlu ada perencanaan yang matang.²

Dikotomi antar madrasah dan sekolah umum saat ini mulai pudar. Fenomena tersebut terlihat setelah ditetapkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 28 dan 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dan Menengah, serta diberlakukannya Kurikulum 1994, di mana madrasah berubah statusnya menjadi sekolah berciri khas Islam. Dengan demikian, madrasah sekarang ini memiliki kedudukan yang sama dengan sekolah-sekolah umum lainnya.

Perkembangan tersebut membawa implikasi yang mendasar bagi keberadaan madrasah yang semula dipandang sebagai institusi pendidikan

¹ Imam Suprayogo, *Quo Vadis Madrasah: Gagasan, Aksi, dan Solusi Pembangunan Madrasah Impian* (Yogyakarta: Hikayat Publishing, 2007), vii.

² Junaidi, *Desain Pengembangan Mutu Madrasah: Konsep Rancangan Pengembangan Sekolah (RPS)* (Yogyakarta: Teras, 2011), 9.

keagamaan, saat ini mengalami pengkayaan peran dan fungsi. Di sini madrasah boleh mengklaim dirinya sebagai “sekolah umum plus”. Sementara di sisi lain, madrasah mendapatkan beban tambahan yang cukup berat. Karena di samping memberikan kurikulum sekolah umum yang setingkat secara penuh, madrasah juga harus memberikan materi-materi esensial keislamannya yang selama ini telah diajarkan.³ Di samping itu, tingkat profesionalitas guru juga mempengaruhi kualitas madrasah. Terlebih lagi, akhir-akhir ini banyak keluhan yang menyatakan bahwa guru-guru di madrasah lulusan Fakultas Tarbiyah UIN/IAIN/STAIN memiliki kelemahan pada bidang-bidang yang seharusnya dikuasai, seperti minimnya kemampuan berbahasa Arab yang mengakibatkan cakrawala pengetahuan agamanya berada di bawah standar sehingga mereka tidak mampu menjalankan peran sebagai guru agama di masyarakat.⁴

Sebagai institusi pendidikan yang telah berakar cukup lama dalam kultur Islam, dengan adanya perubahan dan perkembangan sosial, politik, ekonomi, budaya, dan pendidikan, baik di tingkat lokal maupun nasional, keberadaan, fungsi, dan nilai madrasah pun mengalami pengaruh. Khususnya ketika orientasi masyarakat dan anak didik makin terfokus untuk mengejar nilai tinggi dalam Ujian Akhir Nasional yang sangat menentukan berhasil atau tidaknya masuk ke sekolah atau universitas pilihan yang umumnya adalah sekolah atau universitas negeri.

³ Azyumardi Azra, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional: Rekonstruksi dan Demokratisasi* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002), 71.

⁴ Suprayogo, *Quo Vadis Madrasah*, 80-81.

Persoalannya, madrasah pada mulanya merupakan institusi pendidikan agama Islam yang lebih bersifat formal dibandingkan dengan sistem pendidikan Islam lain. Maka dari itu, madrasah harus melakukan penyesuaian dengan visi dan kebijakan pendidikan nasional yang banyak terpengaruh oleh pandangan skolastik Barat. Pada posisi inilah madrasah mau tidak mau harus melakukan reorientasi, reaktualisasi, dan reformasi terhadap acuan nilai serta arah tujuannya ke depan. Di antaranya melalui penyesuaian diri dengan tuntutan masyarakat yang sejalan dengan gerak dinamika pendidikan nasional dan global, namun juga tidak kehilangan identitasnya sebagai institusi pendidikan menengah Islam formal yang bertugas membangun generasi muda Islam yang memiliki moral dan akhlak sesuai ajaran (kepercayaan) yang dianutnya.⁵

Para pakar pendidikan telah berusaha dengan berbagai upaya untuk andil dan terlibat aktif dalam memikirkan atau menyelesaikan beberapa problema yang “menggerogoti” sistem pendidikan Islam dewasa ini, baik melalui seminar pendidikan, forum-forum diskusi maupun menulis jurnal atau buku. Mereka senantiasa memberikan masukan, kritikan serta menawarkan solusi-solusi alternatif yang dapat digunakan untuk mengatasi segala kelemahan sistem pendidikan Islam. Meskipun demikian, tampaknya pendidikan Islam belum bisa bangkit dan mampu menjawab berbagai macam tantangan yang dihadapinya, baik itu tantangan internal maupun tantangan eksternal.⁶

⁵Ibid., v-vi.

⁶ Syamsul Ma'arif, *Revitalisasi Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 1.

Salah satu tokoh yang berkontribusi dalam pengembangan pendidikan Islam yang berorientasi pada madrasah adalah Imam Suprayogo. Imam Suprayogo dilahirkan dari keluarga yang bersahaja, yakni Kiai Hasan Muchroddi dan Hj. Mariyah. Anak ke-8 dari 16 bersaudara ini lahir di Trenggalek pada hari Selasa, 2 Januari 1951. Lulusan SDN Malang (1964), SMPN Malang (1967), dan SMAN Malang (1970) di kota kelahirannya ini adalah alumni Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Malang yang berhasil meraih gelar doktor dari Universitas Airlangga Surabaya (1998). Sebelum menjabat di almamater, Imam Suprayogo pernah menjadi Pembantu Rektor I Universitas Muhammadiyah Malang (1983-1996) serta menjadi Wakil Direktur Pascasarjana UMM (1996).⁷ Imam Suprayogo juga pernah menjadi Rektor UIN Mulana Malik Ibrahim (Maliki) selama 16 tahun (1997-2013) dan mendapat penghargaan dari MURI karena telah berhasil mencetak rekor sebagai rektor yang menulis artikel di website terlama, yakni dalam satu tahun tanpa jeda.⁸ Sudah lebih dari 3000 artikel yang ditulis sendiri di website pribadi Imam Suprayogo, artikel baru berjudul “Semangat Mengaji al-*Qur'an*” dipublikasikan pada tanggal 34 Maret 2017. Semua artikel yang ditulis oleh Imam Suprayogo dapat dilihat dalam website pribadinya di alamat <http://imamsuprayogo.com>. Menurut Imam Suprayogo, Kebiasaan menulis di blog tersebut awalnya hanya

⁷ Suprayogo, Quo Vadis Madrasah, 130.

⁸ Sudirman Hasan, Rektor UIN Malang, Ngeblog, dan MURI, (online), (<http://www.kompasiana.com/sudirmanhasan/rektor-uin-malang-ngeblog-dan-muri-55002fc4813311001efa72d6>, diakses tanggal 26 Maret 2017).

sebagai hiburan untuk mengisi waktu luang. Lambat laun kebiasaan tersebut menjadi suatu kebutuhan. Jika sehari saja tidak menulis, terasa seakan-akan ada sesuatu yang belum dikerjakan di hari itu. Menulis akhirnya menjadi seperti sebuah kewajiban yang datang dari dalam diri sendiri.⁹

Gagasan yang diajukan oleh Imam Suprayogo dalam mengatasi masalah yang ada pada dunia madrasah yakni melalui pengelolaan pendidikan yang harus mengedepankan kebersamaan, kesemestaan, keadilan, dan dijauhkan dari perilaku diskriminatif. Hal ini dapat memungkinkan madrasah mampu bersaing dan akan survival dengan konsep kekuatan yang disandang.¹⁰ Imam Suprayogo juga menyajikan sebuah gagasan tentang peningkatan mutu SDM (Sumber Daya Manusia) di madrasah melalui manajemen kepemimpinan, kontribusi komite madrasah serta peran Fakultas Tarbiyah sebagai LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) untuk pengadaan guru yang profesional di madrasah.

Berangkat dari permasalahan yang telah dibahas di atas, penulis mencoba untuk meneliti dan menggali lebih dalam lagi tentang madrasah yang menjadi salah satu lembaga pendidikan di Indonesia menurut Imam Suprayogo. Penelitian ini berjudul “Pengembangan Madrasah di Indonesia Perspektif Imam Suprayogo”. Fokus penelitiannya adalah peran masyarakat dalam

⁹ Imam Suprayogo, Menulis Bakda Subuh, (online), (<http://imamsuprayogo.com/artikel/menulis-bakda-subuh>), diakses tanggal 6 April 2017).

¹⁰ Suprayogo, Quo Vadis Madrasah, 48.

meningkatkan mutu pendidikan di madrasah, pengembangan kurikulum di madrasah, dan pemberdayaan SDM (Sumber Daya Manusia) di madrasah.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana peran masyarakat dalam peningkatan mutu madrasah di Indonesia perspektif Imam Suprayogo?
2. Bagaimana pengembangan kurikulum madrasah di Indonesia perspektif Imam Suprayogo?
3. Bagaimana pemberdayaan SDM di madrasah perspektif Imam Suprayogo?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui peran masyarakat dalam peningkatan mutu madrasah di Indonesia perspektif Imam Suprayogo.
2. Untuk mengetahui pengembangan kurikulum madrasah di Indonesia perspektif Imam Suprayogo.
3. Untuk mengetahui pemberdayaan SDM di madrasah perspektif Imam Suprayogo.

D. MANFAAT PENELITIAN

Dalam setiap penelitian yang dikaji, tentunya penulis berharap agar penelitian tersebut dapat menjadi kajian yang bermanfaat. Begitu pula dengan penelitian ini, baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian yang dikaji ini diharapkan dapat menjadi sumbangan bagi pengembangan

pendidikan di Indonesia, mulai dari segi kelembagaan, pengelolaan, serta sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitas pendidikan menuju Indonesia maju. Lebih dari itu, kajian penelitian ini diharapkan mampu untuk menarik perhatian peneliti lain sehingga melakukan penelitian lanjutan yang terkait dengan masalah sejenis secara lebih mendalam. Secara praktis, penelitian yang dikaji ini diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya bagi:

1. Peneliti

Peneliti dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang pemikiran tokoh-tokoh cendekiawan muslim, utamanya Imam Suprayogo, serta kontribusi paradigma Imam Suprayogo dalam membangun konsep pendidikan Islam di Indonesia melalui pengembangan madrasah yang unggul.

2. Praktisi pendidikan Islam

Penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam di Indonesia, serta mengikuti alur modernisasi pendidikan yang berorientasi pada ilmu, iman, dan taqwa.

3. Pembaca

Penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan dari rangkaian teori tentang pendidikan Islam di Indonesia perspektif Imam Suprayogo sebagai motivasi dalam mengembangkan madrasah yang lebih aktual serta modern di era globalisasi ini sehingga memberikan gambaran yang jelas bagi para

pembaca bahwa tokoh tersebut memiliki perspektif mengenai pendidikan Islam, utamanya dalam membangun konsep madrasah unggul di Indonesia.

E. KAJIAN TEORI

1. Pengertian Madrasah

Luis Ma'luf dalam *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lām* yang dikutip oleh Miftahul Ulum menjelaskan bahwa kata “madrasah” berasal dari bahasa Arab sebagai keterangan tempat, dari akar kata “*darasa, yadrusu, darsan, dan madrasatan*” yang mempunyai arti “tempat belajar para pelajar”. Sedangkan kata “*midras*” diartikan “buku yang dipelajari” atau “tempat belajar” dan kata “*midrās*” diartikan “rumah mempelajari kitab Taurat”.¹¹

Dalam bahasa Indonesia, kata “madrasah” memiliki padanan kata “sekolah”. Pemakaian kata “madrasah” dalam arti sekolah tersebut mempunyai konotasi khusus, yaitu sekolah-sekolah agama Islam yang berjenjang dari Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan Aliyah. Kata “madrasah” pada awal perkembangan Islam mempunyai beberapa pengertian, di antaranya berarti aliran atau mazhab, kelompok atau golongan filosof, dan ahli pikir atau penyelidik tertentu yang berpegang pada metode atau pemikiran yang sama.

¹¹ Miftahul Ulum, *Menelusuri Jejak Madrasah di Indonesia: Teori-teori Lahirnya Madrasah di Indonesia* (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2012), 9.

Beberapa pengertian tersebut terjadi karena aliran-aliran yang timbul sebagai akibat perkembangan ajaran agama Islam dan ilmu pengetahuan di berbagai bidang saling berebut pengaruh di kalangan umat Islam dan berusaha untuk mengembangkan aliran atau mazhabnya masing-masing. Akibatnya terbentuklah madrasah-madrasah dalam pengertian kelompok pemikiran, mazhab atau aliran. Itulah sebabnya mengapa sebagian besar madrasah yang didirikan pada masa itu dihubungkan dengan nama-nama mazhab yang masyhur, misalnya madrasah Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah.¹²

Dengan demikian, kata “madrasah” pada awal perkembangannya diartikan jalan pemikiran seorang pemikir atau kelompok pemikir dalam suatu bidang ilmu, kemudian diartikan tempat belajar atau lembaga pendidikan dan pengajaran seperti sekolah dan berkonotasi khusus, yaitu banyak mengajarkan agama Islam atau ilmu-ilmu keislaman. Kedua arti tersebut masih digunakan oleh mayoritas umat Islam sampai sekarang karena madrasah merupakan tempat penyebaran paham aliran atau mazhab yang dianut untuk disosialisasikan ke seluruh umat.

Sementara itu, pengertian madrasah sebagaimana yang dirumuskan oleh Departemen Agama (sekarang Kementerian Agama) adalah tempat

¹² Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1997), 105.

pendidikan yang diatur sebagai sekolah dan menjadikan pendidikan dan ilmu pengetahuan agama Islam sebagai pokok pengajarannya.¹³

2. Sejarah Kelahiran Madrasah

Menurut Kuntowijoyo, sejarah adalah ilmu. Ilmu tentang manusia, tentang waktu, tentang sesuatu yang mempunyai makna sosial, dan tentang sesuatu yang tertentu.¹⁴ Dalam hal ini sejarah yang akan dibahas adalah madrasah. Madrasah mulai didirikan dan berkembang di dunia Islam sekitar abad ke-5 H atau abad ke 10-11 M pada saat penduduk Naisabur mendirikan lembaga pendidikan Islam model madrasah pertama kali. Akan tetapi tersiarnya justru melalui menteri dari kerajaan Bani Saljuk bernama Nizham al-Mulk yang mendirikan madrasah Nizhamiyah pada tahun 1065 M yang oleh Gibb dan Kramers disebutkan bahwa setelah madrasah Nizham al-Mulk kemudian didirikan madrasah terbesar oleh Salahuddin al-Ayyubi.¹⁵

Sayyid Hossein Nashr dalam *Science and Civilization Islam* yang dikutip oleh Zuhairini menyatakan bahwa pada saat itu telah berkembang secara luas dalam berbagai macam ilmu pengetahuan, dengan berbagai macam aliran atau mazhab dan pemikirannya. Pembidangan ilmu

¹³ Ulum, *Menelusuri Jejak Madrasah di Indonesia*, 10.

¹⁴ Khozin, *Jejak-jejak Pendidikan Islam di Indonesia: Rekonstruksi Sejarah untuk Aksi* (Malang: UMM Press, 2006), 1.

¹⁵ Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia: Lintasan Sejarah dan Perkembangannya* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 160.

pengetahuan tersebut bukan hanya meliputi ilmu-ilmu yang berhubungan dengan al-Qur'an dan hadis seperti ilmu-ilmu al-Qur'an, hadis, fiqih, ilmu kalam, maupun ilmu tasawuf, tetapi juga bidang-bidang filsafat, astronomi, kedokteran, matematika, dan berbagai bidang ilmu-ilmu alam dan kemasyarakatan.¹⁶

Sebelum muncul sekolah dan universitas yang dikenal sebagai lembaga pendidikan formal, dalam dunia Islam sebenarnya telah berkembang lembaga-lembaga pendidikan Islam yang bersifat non formal. Lembaga-lembaga ini berkembang terus dan bahkan bersamaan dengannya tumbuh dan berkembang bentuk-bentuk lembaga pendidikan non formal yang semakin luas.¹⁷ Pada akhir abad pertama hijriyah, mulai timbul jenis kuttab. Kuttab berasal dari kata dasar kataba yang berarti menulis atau tempat menulis. Kuttab tidak hanya memberikan pelajaran menulis dan membaca, namun juga mengajarkan membaca al-Qur'an dan pokok-pokok ajaran agama. Pada mulanya, kuttab jenis ini merupakan pemindahan dari pengajaran al-Qur'an yang berlangsung di masjid, yang bersifat umum (bukan hanya untuk anak-anak, tetapi diutamakan bagi orang-orang dewasa). Anak-anak ikut pengajian di dalamnya. Tetapi karena dikhawatirkan apabila mereka tidak dapat menjaga masjid, maka

¹⁶ Ibid.,161.

¹⁷ Zuhairini et al., Sejarah Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 89.

diadakan tempat khusus di samping masjid sebagai tempat belajar al-Qur'an bagi anak-anak.¹⁸

Selanjutnya berkembanglah tempat-tempat khusus (baik yang dihubungkan dengan masjid maupun yang terpisah) untuk pengajaran anak-anak dan berkembang pula kuttab-kuttab yang tidak hanya mengajarkan al-Qur'an, tetapi juga pengetahuan dasar lainnya. Dengan demikian, kuttab tersebut berkembang menjadi lembaga pendidikan dasar yang bersifat formal.¹⁹ Lama belajar di kuttab ini tidaklah sama, tergantung kepada kecerdasan dan kemampuan masing-masing anak, karena sistem pengajaran pada masa itu belum dilaksanakan secara klasikal sebagaimana umumnya sistem pengajaran sekarang ini. Tetapi pada umumnya, anak-anak menyelesaikan pendidikan ini kurang lebih 5 tahun.²⁰

Kehadiran madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam setidaknya tidaknya mempunyai beberapa latar belakang, di antaranya:

- a. Sebagai manifestasi dan realisasi pembaharuan sistem pendidikan Islam
- b. Usaha penyempurnaan terhadap sistem pendidikan yang lebih memungkinkan lulusannya memperoleh kesempatan kerja perolehan ijazah

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid., 91.

²⁰ Ibid., 100.

- c. Adanya sikap mental pada sementara golongan umat Islam, khususnya santri yang terpukau pada Barat sebagai sistem pendidikan modern dari hasil akulturasi.²¹

Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi lembaga pendidikan Islam yang ada di Indonesia, sekitar permulaan abad ke-20, dan secara garis besar dikelompokkan kepada dua hal, yakni keadaan bangsa Indonesia sendiri (dari segi ajaran Islam, aktivitas lembaga pendidikan Islam, dan aktivitas lembaga pendidikan kolonial) dan faktor kondisi luar negeri (pola yang berorientasi pada pendidikan modern di Eropa, pola yang berorientasi pada pemurnian kembali ajaran Islam, serta pola yang berorientasi pada nasionalisme dan kekayaan budaya bangsa masing-masing).²²

Perpaduan antara sistem pendidikan pada pondok pesantren atau pendidikan langgar dengan sistem yang berlaku pada sekolah-sekolah modern merupakan sistem pendidikan dan pengajaran yang dipergunakan di madrasah. Proses perpaduan tersebut berlangsung secara berangsur-angsur dan mengikuti sistem klasikal. Sistem pengajian kitab yang selama ini dilakukan, diganti dengan bidang-bidang pelajaran tertentu walaupun

²¹ Amir Hamzah, Pendidikan dan Pengajaran Muhammadiyah dalam Masa Pembaharuan Semesta (Malang: Ken Mutia, 1989), 47.

²² Mukti Ali, Aliran Pikiran Islam Modern di Indonesia (Yogyakarta: Yayasan Mida, 1971), 18.

masih menggunakan kitab-kitab yang lama. Sementara itu, kenaikan tingkat ditentukan oleh penguasaan terhadap sejumlah bidang pelajaran.²³

Kemudian muncul madrasah-madrasah yang mengikuti sistem perjenjangan dan bentuk-bentuk sekolah modern, seperti MI (Madrasah Ibtidaiyah) yang setara dengan SD (Sekolah Dasar), MTs (Madrasah Tsanawiyah) yang setara dengan SMP (Sekolah Menengah Pertama), dan MA (Madrasah Aliyah) yang setara dengan SMA (Sekolah Menengah Atas). Kurikulum madrasah dan sekolah-sekolah agama masih mempertahankan agama sebagai mata pelajaran pokok, walaupun dengan prosentase yang berbeda.²⁴

3. Perkembangan Madrasah di Indonesia

a. Peran Masyarakat dalam Peningkatan Mutu Madrasah di Indonesia

Peningkatan mutu madrasah merupakan pemberian otonomi luas pada tingkat madrasah (pelibatan masyarakat) dalam kebijakan pendidikan nasional. Otonomi diberikan agar madrasah leluasa dalam mengelola sumber daya dan sumber dana dengan mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan, serta lebih tanggap terhadap kebutuhan setempat. Masyarakat adalah kelompok warga Negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan

²³ Hasbullah, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, 170.

²⁴ Kharisul Wathoni, Dinamika Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia (Ponorogo: STAIN Po Press, 2011), 139.

dalam bidang pendidikan.²⁵ Pelibatan masyarakat dimaksudkan agar mereka lebih memahami, membantu, dan mengontrol pengelolaan pendidikan.²⁶ Bahkan dalam UU Sisdiknas telah disebutkan bahwa masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.²⁷

Peran serta masyarakat Muslim di Indonesia dalam pendidikan Islam sangat signifikan dan bahkan sangat dominan. Sepanjang sejarah pendidikan Islam di kawasan ini, masyarakat Muslim dalam skala yang tetap besar bukan hanya berperan serta (ikut nimbrung), tetapi mengambil posisi terdepan dalam pendirian, pengembangan, dan pemberdayaan pendidikan keagamaan.

Namun, setidaknya dalam dasawarsa terakhir ini terdapat dua kecenderungan lain di kalangan masyarakat Muslim. Kecenderungan pertama adalah mulai berkembangnya hasrat dan keinginan dalam kalangan masyarakat Muslim memberikan porsi lebih besar kepada pemerintah dalam upaya pemberdayaan pendidikan Islam dalam berbagai segi. Hal ini terlihat misalnya dalam tingginya minat di kalangan masyarakat untuk menerbitkan madrasah-madrasah swasta. Dengan semakin menguatnya negara, baik dari segi birokrasi maupun

²⁵ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1, ayat 27.

²⁶ Prim Masrokan Mutohar, Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah: Strategi Peningkatan Mutu dan Daya Saing Lembaga Pendidikan Islam (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 123.

²⁷ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 54, ayat 2.

keuangan, khususnya sejak dekade 1970, negara mampu membuka akses yang lebih besar ke dunia pendidikan Islam yang selama ini cenderung tertutup dan bahkan melakukan distansi terhadap kekuasaan. Perkembangan ini bahkan mendapatkan momentum baru sejak akhir dasawarsa 1980 ketika negara melakukan rapprochement dan rekonsiliasi dengan Islam. Sejak saat itu, respons kaum Muslim terhadap negara cenderung semakin hangat dalam konteks pendidikan Islam semakin menggantungkan banyak harapan kepada negara untuk pemberdayaannya.²⁸

Kecenderungan kedua adalah terjadinya konsolidasi sumber daya dan dana di kalangan masyarakat Muslim sendiri untuk membangun pendidikan Islam yang berkualitas (quality education). Dengan inisiatif dan dana sendiri (bahkan tak jarang melibatkan pinjaman dari bank), terdapat banyak kalangan kaum Muslimin yang mendirikan sekolah Islam unggulan guna memenuhi demand pasar yang kian meningkat bersamaan dengan pertumbuhan “kelas menengah” Muslim. Dalam pandangan kalangan Muslim, bukan saatnya lagi mendirikan sekolah Islam atau madrasah asal-asalan dengan kualitas memprihatinkan. Sekarang saatnya mendirikan serta mengembangkan pendidikan Islam berkualitas yang pasti “dibeli” pasar kelas menengah

²⁸ Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 182.

Muslim yang kian dibentuk.²⁹ Meski demikian, peran serta masyarakat dalam pemberdayaan pendidikan dituntut lebih besar lagi. Secara garis besar, peningkatan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan dapat diuraikan sebagai berikut:

Pertama, peningkatan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan manajemen pendidikan, yakni pengembangan manajemen yang lebih accountable, baik dari segi keuangan maupun organisasi pendidikan. Melalui peningkatan ini, sumber finansial masyarakat dapat dipertanggungjawabkan secara lebih efisien untuk pemberdayaan dan peningkatan kualitas pendidikan Islam. Begitu juga dari segi organisasi sehingga menjadi lebih viable dan durable dalam perubahan dan tantangan zaman.

Kedua, peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan pendidikan Islam yang quality oriented, yakni pendidikan berkualitas dan unggul yang akan mendorong perkembangan madrasah dan lembaga pendidikan Islam lainnya menjadi centers of excellence yang menghasilkan anak didik yang berparadigma keilmuan komprehensif, yakni pengetahuan umum dan agama, plus iman dan takwa (imtak).

Ketiga, peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber belajar lain yang terdapat dalam masyarakat, sehingga sistem

²⁹ Ibid.

pendidikan Islam tidak terpisah, atau tetap menjadi bagian integral dari masyarakat Muslim secara keseluruhan. Melalui pengembangan ini, madrasah atau pendidikan Islam lainnya dapat menjadi core dari learning society, masyarakat belajar yang membuat anak didik keluaran lembaga pendidikan Islam lebih berkualitas, capable, fungsional, dan integrated dengan masyarakatnya.³⁰

b. Pengembangan Kurikulum di Madrasah

1) Pengertian Pengembangan Kurikulum

Pengembangan kurikulum (curriculum development) merupakan salah satu komponen yang memiliki kedudukan sangat penting dalam kegiatan pendidikan. Apabila dilihat dari segi bahasa, maka pengembangan kurikulum mencakup dua kata, yakni pengembangan dan kurikulum.³¹

Pengembangan artinya hal mengembangkan, pembangunan secara bertahap serta teratur, dan yang menjurus ke sasaran yang dikehendaki.³² Sedangkan kata “kurikulum” berasal dari bahasa Yunani yang semula digunakan dalam bidang olahraga, yaitu currere atau jarak yang harus ditempuh dalam kegiatan berlari mulai dari start hingga finish. Pengertian ini kemudian diterapkan

³⁰ Ibid., 187.

³¹ Oemar Hamalik, *Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 3.

³² Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 275.

dalam bidang pendidikan. Dalam bahasa Arab, istilah “kurikulum” diartikan dengan Manhaj, yakni jalan yang terang atau jalan terang yang dilalui oleh manusia pada bidang kehidupannya. Dalam konteks pendidikan, kurikulum berarti jalan terang yang dilalui pendidik/guru dengan peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap serta nilai-nilai.³³ Kurikulum merupakan perangkat mata pelajaran yang diajarkan pada lembaga pendidikan.³⁴ Dalam Undang-Undang, disebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.³⁵ Pengembangan kurikulum pada hakikatnya adalah proses atau kegiatan yang disengaja dan dipikirkan untuk menghasilkan sebuah kurikulum sebagai pedoman dalam proses dan penyelenggaraan pembelajaran oleh guru di sekolah.³⁶

Pengembangan kurikulum bermakna mengarahkan kurikulum yang ada pada tujuan pendidikan yang diharapkan karena adanya

³³ Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 1.

³⁴ Tim Penyusun, Kamus Bahasa Indonesia, 845.

³⁵ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1, ayat 19.

³⁶ Wina Sanjaya, Kurikulum dan Pembelajaran (Bandung: Kencana Prenada Media, 2008), 32.

berbagai pengaruh yang bersifat positif yang datang dari luar atau dari dalam dengan harapan agar peserta didik dapat menghadapi masa depan dengan baik.³⁷ Dalam UU no. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 36 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.³⁸ Pengembangan pendidikan madrasah tidak dapat ditangani secara parsial atau setengah-setengah, tetapi memerlukan pengembangan pemikiran yang utuh, terutama pada saat dihadapkan pada kebijakan pembangunan nasional, bidang pendidikan yang mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.³⁹

Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, maka perlu dicanangkan kurikulum yang sesuai. Kurikulum merupakan salah

³⁷ Dakir, *Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 91.

³⁸ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 36, ayat 1 dan 2.

³⁹ Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam*, 197.

satu komponen penting dalam sistem pendidikan nasional. Kurikulum berfungsi sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai kemampuan dan hasil belajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran itu sendiri merupakan muara dari keseluruhan proses penyelenggaraan kurikulum. Kurikulum diperlukan untuk membantu guru dalam mengembangkan pengetahuan, sikap, nilai, dan keterampilan dari berbagai bahan kajian dan pelajaran yang diperoleh siswa sesuai dengan jenjang dan satuan pendidikannya.⁴⁰

Kurikulum merupakan pemandu utama bagi penyelenggaraan pendidikan secara formal yang menjadi pedoman bagi setiap guru, kepala sekolah, dan pengawas pendidikan dalam pelaksanaan tugas mereka sehari-hari. Lebih dari itu, kurikulum merupakan aktualisasi dari tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, kurikulum memuat sejumlah mata pelajaran, garis pokok program pengajaran dalam satu pekan selama satu tahun ajaran pada jenjang pendidikan. Pada dasarnya, jumlah pelajaran diasumsikan pada sejumlah kompetensi pengetahuan, keterampilan, atau kompetensi minimal yang harus dimiliki oleh

⁴⁰ Abdul Rachman Shaleh, *Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa: Visi, Misi, dan Aksi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 197-198.

peserta didik untuk menamatkan pendidikan tertentu. Oleh sebab itu, harus ada spesifikasi atau penekanan pada kurikulum MI, MTs, dan MA yang membedakan dengan esensi kurikulum pada sekolah-sekolah umum. Kurikulum MI dan MTs lebih ditekankan pada transfer pengetahuan dan pembentukan watak. Sedangkan MA, selain dari kedua kompetensi tersebut harus ditekankan pada pembentukan dan pembinaan keterampilan yang kini booming dikenal dengan life-skills.⁴¹

2) Fungsi Kurikulum PAI

a). Bagi sekolah (madrasah) yang bersangkutan:

(1). Sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan agama Islam yang diinginkan atau dalam istilah KBK disebut standar kompetensi PAI, meliputi fungsi dan tujuan pendidikan nasional, kompetensi lintas kurikulum, kompetensi lulusan/tamatan, kompetensi bahan kajian PAI (TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA), kompetensi mata pelajaran kelas (kelas I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII);

(2). Pedoman untuk mengatur kegiatan-kegiatan pendidikan agama Islam di sekolah (madrasah).

b). Bagi sekolah (madrasah) di atasnya:

⁴¹ Azyumardi Azra, Paradigma Baru Pendidikan Nasional, 97.

- (1). Melakukan penyesuaian
- (2). Menghindari keterulangan sehingga boros waktu
- (3). Menjaga kesinambungan⁴²

c). Bagi masyarakat:

- (1). Masyarakat sebagai pengguna lulusan (users), sehingga sekolah (madrasah) harus mengetahui hal-hal yang menjadi kebutuhan masyarakat dalam konteks pengembangan PAI.
- (2). Terdapat kerja sama harmonis dalam hal pembenahan dan pengembangan kurikulum PAI.⁴³

3) Perkembangan Kurikulum di Indonesia

Hampir dalam setiap pergantian presiden kurikulum mengalami perubahan, akan tetapi out come yang ada masih jauh dari harapan, bahkan sebagian ahli pendidikan mengatakan bahwa pendidikan di Indonesia dianggap sebagai kelinci percobaan. Perubahan atau pengembangan memang perlu dilakukan, namun konsep perubahan tersebut tidak boleh mengesampingkan kemampuan dasar yang harus dimiliki peserta didik. Begitu juga dengan kurikulum PAI yang ikut menjadi korban perubahan dalam

⁴² Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam, 11.

⁴³ Ibid., 12.

pelaksanaannya.⁴⁴ Padahal PAI mempunyai tempat yang sangat strategis pada semua jalur dan jenjang pendidikan. PAI merupakan bidang ajaran kajian yang sangat penting dan fundamental dalam pembentukan manusia secara utuh, berwawasan ilmu pengetahuan tinggi, cakap dan terampil, berakhlak mulia dan berkepribadian luhur. PAI memiliki peranan yang sangat vital dalam kehidupan manusia sebagai tata nilai, pedoman, pembimbing, dan pendorong atau penggerak untuk mencapai kualitas hidup yang lebih layak dan kebahagiaan hidup dunia akhirat.⁴⁵

Kenyataan sejarah menunjukkan bahwa pada periode H.A Mukti Ali (mantan Menteri Agama RI), diberlakukan konsep alternatif pengembangan madrasah melalui kebijakan SKB 3 Menteri yang berusaha menyejajarkan kualitas madrasah dengan non-madrasah, yaitu dengan porsi kurikulum 70% umum dan 30% agama. Pada periode Menteri Agama Munawir Sadzali menawarkan konsep MAPK. Sedangkan pada periode Menteri Agama RI H. Tarmizi Taher ditetapkan konsep madrasah sebagai sekolah umum yang berciri khas agama Islam.⁴⁶

⁴⁴ Ibid., 15.

⁴⁵ Hanafi, "Pengembangan Kurikulum Perguruan Tinggi Agama Islam," *Islamuna*, Vol. 1 (2014), 572.

⁴⁶ Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam*, 197.

Dalam rangka merealisasikan SKB 3 Menteri pada tahun 1976, Departemen Agama mengeluarkan kurikulum sebagai standar untuk dijadikan acuan oleh madrasah, baik untuk MI, MTs, maupun MA. Kurikulum tersebut juga dilengkapi dengan pedoman dan aturan penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran pada madrasah, sesuai dengan aturan yang berlaku pada sekolah-sekolah umum serta deskripsi berbagai kegiatan dan metode penyampaian program untuk setiap bidang studi baik untuk bidang studi agama maupun bidang studi pengetahuan umum.⁴⁷

Dengan munculnya SKB 3 Menteri, rupanya masyarakat mulai memahami eksistensi madrasah tersebut dalam konteks pendidikan nasional. Hanya saja ruh dari SKB tersebut rupanya belum banyak ditangkap oleh para pembina dan pengelola madrasah itu sendiri. Porsi 70% pengetahuan umum dan 30% pengetahuan agama hanya dipahami secara simbolis-kualitatif, sehingga output-nya menjadi mandul, penguasaan pengetahuan umum menjadi dangkal dan pengetahuan agamanya pun tidak jauh berbeda.

Untuk mengantisipasi kedangkalan pengetahuan agama dari madrasah, maka Menteri Agama Munawir Sadzali mencoba menawarkan MAPK (Madrasah Aliyah Program Khusus). Hal ini

⁴⁷ Mahmud Yunus, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia (Jakarta: Hidakarya Agung, 1993), 82.

dimaksudkan untuk menjawab problem kelangkaan ulama atau kelangkaan umat yang menguasai kitab-kitab berbahasa Arab serta ilmu-ilmu keislaman. Lulusan MAPK diharapkan mampu menjawab masalah tersebut, yang sekarang ditetapkan sebagai Madrasah Aliyah Kejuruan (Bidang Keagamaan). Sedangkan Madrasah Aliyah non-keagamaan tidak jauh berbeda dengan SMA, karena porsi pengetahuan agama lebih sedikit dibanding sebelumnya. Ini setidaknya-tidaknya menjadi kerisauan dari para guru madrasah. Lagi-lagi masalah prosentase pengetahuan umum dan agama (simbolis-kualitatif) yang menjadi persoalan.

Sebagai akibat dari kemandulan keilmuan yang dimiliki output madrasah, maka Menteri Agama Tarmidzi Taher mencoba menawarkan kebijakan dengan jargon “madrasah sebagai sekolah umum yang berciri khas agama Islam”, muatan kurikulumnya juga sama dengan sekolah non-madrasah. Kebijakan ini ditindaklanjuti oleh Menteri Agama berikutnya. Bahkan H.A. Malik Fadjar memantapkan eksistensi madrasah untuk memenuhi tiga tuntutan minimal dalam peningkatan kualitas madrasah, yaitu: (1) bagaimana menjadikan madrasah sebagai wahana untuk membina ruh atau praktik hidup keislaman; (2) bagaimana memperkokoh keberadaan madrasah sehingga sederajat dengan sistem sekolah;

(3) bagaimana madrasah mampu merespon tuntutan masa depan guna mengantisipasi perkembangan iptek dan globalisasi. Para Menteri Agama berikutnya tidak terlalu mempermasalahkan jargon tersebut di atas, dan juga tidak memiliki jargon alternatif. Mereka berusaha memantapkan eksistensi madrasah yang pada intinya diarahkan pada tiga tuntutan minimal tersebut di atas.⁴⁸

Kurikulum madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam seharusnya memiliki dua komponen pokok. Di antaranya pendidikan umum dan pendidikan Islam. Dikarenakan status pada semua jenjang telah disamakan dengan sekolah umum, kurikulum komponen pendidikan umum pada madrasah mengikuti kurikulum yang ditetapkan Depdiknas. Pada tataran ini, madrasah sangat menanggung beban berat karena di satu sisi harus mengkonstruks ulama sebagai fungsi utamanya dan di sisi lain madrasah harus menanamkan pendidikan umum untuk mengikuti alur kurikulum nasional.⁴⁹

Kurikulum madrasah perlu dikembangkan secara terpadu dengan menjadikan ajaran dan nilai-nilai Islam sebagai petunjuk dan sumber konsultasi bagi pengembangan berbagai mata pelajaran umum yang operasionalnya dapat dikembangkan dengan

⁴⁸ Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam, 198-199.

⁴⁹ Ninik Masruroh dan Umiarso, Modernisasi Pendidikan Islam ala Azyumardi Azra (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 218-219.

cara mengimplisitkan ajaran dan nilai-nilai Islam ke dalam bidang studi IPS, IPA, dan sebagainya sehingga kesan dikotomis tidak terjadi. Model pembelajarannya dapat dilakukan melalui team teaching, yakni guru bidang IPS, IPA, dan lain sebagainya bekerja sama dengan guru bidang PAI untuk menyusun desain pembelajaran secara kongkrit dan detail agar dapat diimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran.⁵⁰

Program kurikulum, tidak lagi memilih antara ilmu umum sekuler dengan Ilmu agama. Ilmu fisika, matematika, biologi, kimia, sejarah, dan ilmu lainnya dapat saja dikatakan Islam, sepanjang didukung dengan bukti kebenarannya. Ilmu tauhid, fiqh, tafsir, hadis, dan ilmu lain yang selama ini disebut dengan ilmu agama harus diubah penamaannya, hanya disebut dengan ilmu tanpa pemberian embel-embel atau label ilmu agama. Dari perspektif ini kiranya dapat dikatakan bahwa keyakinan tauhid-teologis mungkin saja dapat tumbuh dan muncul melalui studi sejarah, ilmu bumi, fisika, matematika, kimia, biologi, dan lain sebagainya.⁵¹

Melalui upaya dan strategi semacam ini, sistem pendidikan Islam diharapkan dapat mengintegrasikan nilai ilmu pengetahuan,

⁵⁰ Ibid., 209.

⁵¹ Hujair AH. Sanaky, *Pembaruan Pendidikan Islam: Paradigma, Tipologi, dan Pemetaan menuju Masyarakat Madani Indonesia* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), 35.

agama, dan etik sehingga mampu melahirkan manusia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), memiliki kematangan profesional sekaligus hidup di dalam nilai agama (IMTAK). Hal ini sejalan dengan fungsi pendidikan, dalam prosesnya harus berusaha untuk membangun manusia berkualitas yang ditandai dengan peningkatan kecerdasan, pengetahuan, keterampilan, dan ketakwaan sebagai relasi vertikal dengan nilai ilahiah. Bila demikian, pelaksanaan pendidikan Islam harus menempatkan posisinya sebagai wahana strategi untuk meningkatkan mutu kehidupan dengan terbentuknya berbagai pilihan dan kesempatan mengembangkan potensi diri di masa depan.

Paradigma pendidikan ini mulai dirintis dan dikembangkan dalam pendidikan Islam di madrasah dan dideklarasikan sebagai sekolah “berciri khas Islam”. Kebijakan pengembangan madrasah tersebut menjadi upaya untuk mengakomodasikan tiga kepentingan utama, yaitu: (a) sebagai wahana untuk membina ruh atau praktik hidup keislaman; (b) memperjelas dan memperkuat keberadaan madrasah sederajat dengan sistem sekolah sebagai wahana pembinaan warga negara yang cerdas, berpengetahuan, berketerampilan, berkarakter, serta produktif, dan (c) mampu

memproses tuntutan masa depan, dalam arti sanggup melahirkan manusia yang memiliki kesiapan memasuki era globalisasi, industrialisasi dan era informasi.⁵² Implikasi dari kepentingan dan kebijakan ini adalah perubahan kurikulum yang lebih didasarkan pada kebutuhan masyarakat pengguna jasa pendidikan serta berkembangnya berbagai model pendidikan Islam terpadu, yang mengintegrasikan ilmu umum dan ilmu agama ke dalam satuan kurikulum (integrated curriculum) pendidikan Islam.⁵³

4) Model Pendekatan dan Pengembangan Kurikulum

Di dalam teori kurikulum setidaknya terdapat 5 pendekatan dalam pengembangan kurikulum, di antaranya yaitu: pendekatan subjek akademik, pendekatan humanistik, pendekatan teknologi, pendekatan rekonstruksi sosial, dan proses kognitif.⁵⁴

a) Model pengembangan kurikulum melalui pendekatan subjek akademik

Pendekatan ini adalah pendekatan yang tertua sejak sekolah (madrasah) yang pertama berdiri kurikulumnya serupa dengan tipe ini. Pendekatan subjek akademik dalam menyusun kurikulum atau program pendidikan didasarkan pada

⁵² Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan Pendidikan Islam di Sekolah (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 46.

⁵³ Hujair AH Sanaky, Pembaruan Pendidikan Islam, 41.

⁵⁴ Tim Pengembang Kurikulum MKDP, Kurikulum dan Pembelajaran (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 64.

sistematisasi tertentu yang berbeda dengan sistematisasi ilmu lainnya. Pengembangan kurikulum subjek akademik dilakukan dengan cara menetapkan terlebih dahulu mata pelajaran apa yang harus dipelajari peserta didik yang diperlukan untuk persiapan pengembangan disiplin ilmu. Tujuan kurikulum subjek akademik adalah pemberian pengetahuan yang optimal serta melatih para peserta didik menggunakan ide-ide dan proses penelitian.

b) Model pengembangan kurikulum melalui pendekatan humanistik

Pendekatan humanistik dalam pengembangan kurikulum bertolak dari ide memanusiakan manusia. Gagasan konteks ini memberi peluang manusia untuk menjadi lebih humanistic agar meninggikan harkat manusia yang merupakan dasar filosofi, dasar teori, dasar evaluasi, dan dasar pengembangan program pendidikan. Kurikulum pada pendekatan ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- (1) Partisipasi, kurikulum ini menekankan partisipasi murid dalam belajar. Kegiatan belajar adalah belajar bersama melalui berbagai bentuk aktivitas kelompok. Melalui partisipasi kegiatan bersama, murid-murid dapat

mengadakan perundingan, persetujuan, pertukaran kemampuan, bertanggung jawab bersama, dan lain-lain. Ini menunjukkan ciri yang non-otoriter.

- (2) Integrasi, melalui partisipasi dalam berbagai kegiatan kelompok terjadi interaksi, interpenetrasi, dan integrasi dari pemikiran serta tindakan.
 - (3) Relevansi, isi pendidikan relevan dengan kebutuhan, minat, dan kebutuhan murid karena diambil dari dunia murid oleh murid sendiri.
 - (4) Pribadi anak, pendidikan ini memberikan tempat utama pada kepribadian anak.
 - (5) Tujuan, pendidikan ini bertujuan untuk mengembangkan pribadi yang utuh, yang serasi baik di dalam dirinya maupun dengan lingkungan secara menyeluruh.
- c) Model pengembangan kurikulum melalui pendekatan teknologi
- Pendekatan teknologi dalam menyusun kurikulum atau program pendidikan bertolak dari analisis kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Dalam konteks kurikulum model teknologi, teknologi pendidikan mempunyai dua aspek, yakni hardware berupa alat/benda yang keras seperti proyektor, TV, LCD, radio, dan sebagainya.

Adapun software berupa teknik penyusunan kurikulum, baik secara makro maupun mikro.

Teknologi yang diharapkan adakalanya berupa PPSI (Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional), pelajaran berprogram, dan modul. Dalam setiap kebijakan yang bersifat teknis-praktis, Islam memberikan otonomi bagi penyelenggara pendidikan seluas-luasnya. Bentuk dan model yang dapat digunakan selama ini memiliki nilai masalah, maka bentuk dan model itu dapat digunakan.⁵⁵

- d) Model pengembangan kurikulum melalui pendekatan rekonstruksi sosial

Pendekatan rekonstruksi sosial dalam menyusun kurikulum atau program pendidikan keahlian bertolak dari problem yang dihadapi dalam masyarakat, untuk selanjutnya dengan memerankan ilmu-ilmu dan teknologi serta bekerja secara kooperatif, maka akan dicarikan upaya pemecahan menuju pembentukan masyarakat yang lebih baik. Kurikulum rekonstruksi sosial disamping menekankan isi pembelajaran atau pendidikan juga sekaligus menekankan proses pendidikan dan pengalaman belajar.

⁵⁵ Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakkir, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), 147-148.

Pendekatan rekonstruksi sosial berasumsi bahwa manusia adalah sebagai makhluk sosial dalam kehidupannya selalu membutuhkan manusia lain, selain hidup bersama, berinteraksi, dan bekerja sama. Isi pendidikan terdiri atas problem-problem aktual yang dihadapi dalam kehidupan nyata di masyarakat. Proses pendidikan atau pengalaman belajar peserta didik berbentuk kegiatan-kegiatan belajar kelompok yang mengutamakan kerja sama baik antar peserta didik, peserta didik dengan guru, maupun peserta didik dengan sumber-sumber belajar yang lain. Karena itu, dalam menyusun kurikulum atau program pendidikan PAI bertolak dari problem yang dihadapi dalam masyarakat sebagai isi PAI, sedangkan proses atau pengalaman belajar peserta didik adalah dengan cara memerankan ilmu-ilmu dan teknologi, serta bekerja secara kooperatif dan kolaboratif, berupaya mencari pemecahan terhadap problem tersebut menuju pembentukan masyarakat yang lebih baik.

e) Model pengembangan kurikulum melalui proses kognitif

Kurikulum ini bertujuan mengembangkan kemampuan mental, antara lain berfikir dan berkeyakinan bahwa kemampuan tersebut dapat ditransfer atau diterapkan pada

bidang-bidang lain. Model ini berpijak pada psikologis kognitif yang konsepnya berpijak pada kekuatan pikiran.⁵⁶

c. Pemberdayaan SDM melalui Manajemen Kepemimpinan dan Profesionalisme Guru di Madrasah

1). Pemberdayaan Manajemen Kepemimpinan di Madrasah

Secara konseptual, pemberdayaan atau empowerment, berasal dari kata “power” (kekuasaan atau pemberdayaan). Sebagai sebuah konsep, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep kekuasaan.⁵⁷ Gerakan pemberdayaan adalah berusaha menciptakan kondisi yang memungkinkan bagi setiap orang dapat melaksanakan tugas aktualisasi eksistensinya. Pemberdayaan juga memusatkan perhatian pada penyebab lahirnya kendala bagi seseorang atau sekelompok untuk mewujudkan aktualisasi eksistensi.⁵⁸

Dalam sebuah lembaga pendidikan formal, sosok pemimpin merupakan aspek yang sangat mempengaruhi gerak dan hasil kerja personelnnya.⁵⁹ Definisi tentang kepemimpinan sangat bervariasi sebanyak orang yang mencoba mendefinisikan konsep kepemimpinan, definisi kepemimpinan secara luas meliputi proses

⁵⁶ Ibid.

⁵⁷ Onny S. Prijono dan A.W.M Pranarka, *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan, dan Implementasi* (Jakarta: CSIS, 1996), 261.

⁵⁸ Miftahul Choiri, *Peran STAIN Ponorogo dalam Pemberdayaan Madrasah di Wilayah Karesidenan Madiun* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2012), 30.

⁵⁹ Khozin et al., *Manajemen Pemberdayaan Madrasah* (Malang: UMM Press, 2006), 40.

mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi kelompok dan budayanya, serta mempengaruhi interpretasi mengenai peristiwa-peristiwa para pengikutnya, pengorganisasian dan aktifitas-aktifitas untuk mencapai sasaran.

Menurut Suharsimi Arikunto, kepemimpinan adalah usaha yang dilakukan untuk mempengaruhi anggota kelompok agar mereka dengan suka rela menyumbangkan kemampuannya secara maksimal demi pencapaian tujuan kelompok yang telah ditetapkan.⁶⁰ Pemimpin dapat membawa perubahan dalam organisasi, dalam mengembangkan visi, misi dan tujuan lembaga pendidikan sekolah (madrasah). Sumber daya manusia yang terdapat dalam lembaga pendidikan Islam mulai dari pengurus lembaga (yayasan), pimpinan (kepala sekolah), guru, pegawai, dan peserta didik ikut menentukan dan terlibat langsung pada pembentukan proses pendidikan yang berkualitas di lembaga pendidikan Islam. Dari sumber daya manusia tersebut, yang paling dominan dalam menentukan pengembangan lembaga pendidikan Islam adalah pihak pimpinan.

⁶⁰ Muwahid Shulhan, Model Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Kinerja Guru (Yogyakarta: Teras, 2013), 9.

Di manapun lembaga pendidikan berada, peran pemimpin dalam hal ini lembaga pendidikan Islam menempati posisi yang strategis. Sebagaimana yang dikutip Baharuddin dari Sujak, pimpinan lembaga pendidikan harus memiliki beberapa persyaratan untuk menciptakan lembaga pendidikan yang mereka pimpin menjadi semakin efektif, antara lain: (1) memiliki kesehatan jasmani dan rohani yang baik; (2) berpegang pada tujuan yang dicapai; (3) bersemangat; (4) cakap di dalam memberi bimbingan; (5) cepat serta bijaksana di dalam mengambil keputusan; (6) jujur; (7) cerdas; (8) cakap di dalam mengajar dan menaruh kepercayaan yang baik serta berusaha untuk mencapainya. Pemilihan orang-orang yang terbaik di lembaga pendidikan Islam sebagai pengelola ikut menentukan terhadap kesinambungan dan keberhasilan lembaga pendidikan Islam dalam membuka layanan pendidikan Islam berkualitas kepada masyarakat luas.⁶¹

Kepala madrasah merupakan pemimpin sekaligus manajer pada suatu institusi pendidikan. Kepala madrasah menjadi salah satu kunci jaminan berhasil atau tidaknya institusi tersebut mencapai tujuan yang telah direncanakan. Sudah pasti kinerja

⁶¹ Baharuddin, Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam menuju Pengelolaan Profesional dan Kompetitif (Malang: UIN Maliki Press, 2011), 70.

kepala madrasah tersebut akan menjadi barometer bagi komunitas-komunitas lain dalam menjalankan kewajibannya, baik internal maupun eksternal. Definisi kinerja itu sendiri adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program kebijaksanaan dalam mewujudkan suatu sasaran, tujuan, misi, dan visi lembaga. Kinerja atau prestasi kerja dari kepala madrasah/pemimpin merupakan jaminan akan ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh lembaga dengan baik dan maksimal.⁶²

2). Pemberdayaan Guru Profesional di Madrasah

Sumber Daya Manusia berkorelasi positif dengan mutu pendidikan. Mutu pendidikan tercapai apabila masukan, proses, keluaran, guru, sarana, dan prasarana serta biaya seluruh komponen tersebut memenuhi syarat tertentu. Pendidikan yang bermutu sangat membutuhkan tenaga kependidikan yang profesional. Tenaga kependidikan mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan pengetahuan, keterampilan, dan karakter peserta didik. Oleh karena itu, tenaga kependidikan yang profesional akan melaksanakan tugasnya secara profesional sehingga menghasilkan tamatan yang lebih bermutu. Menjadi tenaga kependidikan yang profesional tidak akan terwujud begitu

⁶² Abdullah Munir, *Menjadi Kepala Sekolah Efektif* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), 29-30.

saja tanpa adanya upaya untuk meningkatkannya.⁶³ Peningkatan kualitas SDM dapat dilakukan melalui pengalaman agama, peningkatan kesejahteraan, peningkatan pendidikan, peningkatan pelatihan, peningkatan kesehatan, peningkatan kesempatan kerja, pengendalian kependudukan, peningkatan lingkungan hidup, dan perencanaan karier.⁶⁴

Pekerjaan yang profesional bukan hanya mengandung makna kegiatan untuk mencari nafkah atau mata pencaharian, tetapi juga tercakup pengertian *calling profession*, yakni panggilan terhadap pernyataan janji yang diucapkan di muka umum untuk ikut berkhidmat guna merealisasi terwujudnya nilai mulia yang diamanatkan oleh Tuhan dalam masyarakat melalui usaha kerja keras dan cerdas. Menurut para ahli pendidikan, kegiatan atau pekerjaan itu dikatakan profesi apabila dilakukan untuk mencari nafkah sekaligus dilakukan dengan tingkat keahlian yang cukup tinggi. Agar suatu profesi dapat menghasilkan mutu produk yang baik, maka ia perlu dibarengi dengan etos kerja yang mantap pula. Ada tiga ciri dasar yang dapat dilihat pada setiap profesional mengenai etos kerjanya, yaitu: (1) keinginan untuk menjunjung

⁶³ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), 107.

⁶⁴ Jamil Suprihatiningrum, *Guru Profesional: Pedoman Kinerja, Kualifikasi, dan Kompetensi Guru* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 172.

tinggi mutu pekerjaan (job quality); (2) menjaga harga diri dalam melaksanakan pekerjaan; dan (3) keinginan untuk memberikan layanan kepada masyarakat melalui karya profesionalnya. Ketiga ciri dasar tersebut merupakan etos kerja yang seharusnya melekat pada setiap pekerjaan yang profesional.⁶⁵

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial, memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, dan memperoleh pelatihan pengembangan profesi dalam bidangnya.⁶⁶ Terdapat rumus sosial untuk membangun sebuah bangsa yang sering diperdengarkan di khalayak ramai, yakni “jika kita ingin memajukan sebuah bangsa, maka nomor satu, utamakan pendidikan, nomor dua, utamakan pendidikan, dan nomor tiga, hargailah dan muliakanlah guru”. Pendidikan diutamakan berdasarkan asumsi bahwa dengan meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan yang bermutu, maka kualitas SDM di Indonesia akan semakin meningkat. Diikuti pula dengan meningkatnya produktivitas, serta meningkatnya pendapatan masyarakat. Dengan meningkatnya

222. ⁶⁵ Muhaimin, Wacana Pengembangan Pendidikan Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004),

⁶⁶ Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 14, ayat 1.

pendapatan tersebut, maka akses terhadap pendidikan juga semakin meningkat.⁶⁷

Lemahnya SDM sebagai sistem pendidikan yang kurang berkualitas, memunculkan fenomena masyarakat pekerja (worker society). Berbeda dengan sistem pendidikan yang berkualitas, yang melahirkan employee society. Indonesia seharusnya belajar dari Jepang dan Korea Selatan. Walaupun kedua negara tersebut miskin sumber daya alam (SDA), tetapi karena dukungan SDM yang kuat, kedua Negara Asia Timur tersebut menjadi pioneer ekonomi dunia, khususnya di kawasan Asia. Masyarakat Jepang memiliki lima karakteristik khusus dalam sikap dan perilaku yang dipandang sebagai akar kekuatan bangsanya, yaitu:

- 1) Emulasi, yakni hasrat dan upaya untuk menyamai atau melebihi orang lain. Orang Jepang, baik secara perorangan ataupun sebagai warga negara memiliki dorongan untuk tidak tertinggal oleh orang, kelompok, atau bangsa lain.
- 2) Consensus, yakni kebiasaan masyarakat Jepang untuk berkompromi, bukan konfrontasi. Budaya kompromi ini menimbulkan rasa keterlibatan masyarakat yang kuat terhadap kepentingan bersama. Budaya inilah yang menjadi pengikat

⁶⁷ Muhaimin Pemikiran dan Aktualisasi Pengembangan Pendidikan Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 94-95.

kuat dan menjadi pengikat dasar (root bonding) kehidupan masyarakat Jepang.

- 3) Futurism, yakni mempunyai pandangan jauh ke depan. Masyarakat Jepang mempunyai keyakinan bahwa harkat individu akan naik apabila seluruh kelompok atau bangsa naik. Oleh karena itu, kemajuan dan keberhasilan kelompok, masyarakat, dan bangsa sangat diutamakan dalam upaya meningkatkan kemajuan individu.
- 4) Kualitas, yakni dalam setiap proses dan hasil produksi di Jepang, mutu menjadi faktor penarik (full factors).
- 5) Kompetensi, yakni sumber daya manusia dan produk bangsa Jepang memiliki keunggulan yang sangat komparatif dan kompetitif dalam tata kehidupan dan tata ekonomi global.

Dalam kaitannya dengan penghargaan terhadap guru, maka Indonesia tergolong masih kurang menghargai dan memuliakan guru jika dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia.⁶⁸ Sungguhpun demikian, rupanya telah dicanangkan kebijakan sertifikasi guru yang diikuti dengan peningkatan kesejahteraan yang berupa tunjangan profesi bagi guru, rupanya bangsa Indonesia mulai memuliakan dan memberikan penghargaan yang relatif layak terhadap guru. Undang-undang guru dan dosen antara

⁶⁸ Ibid., 96-97.

lain dimaksudkan untuk meningkatkan mutu guru sekaligus kesejahteraannya sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Asumsinya adalah apabila kompetensi guru bagus serta penghasilan guru bagus, maka kinerja guru akan semakin bagus sehingga pendidikan akan semakin bermutu. Sebab, diakui bahwa hasil pendidikan sangat ditentukan oleh kualitas proses pembelajaran, dan kualitas proses pembelajaran sangat ditentukan oleh kualitas perilaku guru. Jadi kualitas hasil pendidikan sangat ditentukan oleh kualitas perilaku guru, yang dalam hal ini sangat ditentukan oleh kompetensi-kompetensi yang dimilikinya (kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan kompetensi profesional) dan kesejahteraannya yang layak.

Dalam realitasnya, masih banyak pula para guru di Indonesia yang memperoleh imbalan sebesar Rp. 500.000,00 per bulan. Hal ini terutama dialami oleh para guru madrasah swasta, yang hampir 92% madrasah di Indonesia berstatus swasta. Mereka tidak berani menuntut kenaikan gaji karena hal itu sering dianggap aib bagi mereka. Apalagi yang didoktrinkan kepada mereka adalah ajaran-ajaran sufi sebagaimana yang tertuang dalam kitab-kitabnya, bahwa sebagai guru harus bersikap zuhud, jangan mengharapakan imbalan, dan hendaknya mengajar karena mencari keridaan Allah

Swi. Ajaran-ajaran semacam ini memang dapat membangkitkan semangat para guru madrasah untuk mengamalkan ilmunya dengan ikhlas dan berjuang untuk mencerdaskan anak bangsa, baik cerdas secara spiritual, cerdas secara emosional, cerdas secara sosial, cerdas intelektual, cerdas kinestetis maupun cerdas kompetitif sehingga guru sering dijuluki pahlawan tanpa tanda jasa.⁶⁹

Ajaran tasawuf umumnya diamalkan oleh mereka yang telah berusia senja di atas usia 50 tahun sehingga yang dipikirkan adalah bagaimana mengisi sisa-sisa usia mereka untuk menghadapi kematian dan kehidupan sesudah mati dan di akhirat kelak. Pada saat usia lanjut tersebut, ulama sufi menyusun kitab yang antara lain berisi syarat-syarat untuk menjadi guru, yaitu hendaklah bersikap zuhud, mengajar hanya untuk mencari keridaan Allah Swt., serta tidak mengharapkan imbalan. Bagi mereka (kaum sufi) adalah hal yang wajar karena mereka sudah merasa cukup dan hidupnya telah tercurahkan hanya untuk mendekatkan diri kepadanya. Akan tetapi, bagi guru-guru yang masih baru harus menanggung beban ekonomi rumah tangganya, terlebih lagi biaya hidup saat ini semakin meningkat dan harga sembako⁷⁰ semakin

⁶⁹ Ibid., 99-100.

⁷⁰ Ibid.

mahal, maka betapa penderitaan yang harus mereka alami dengan gaji guru sebesar Rp. 500.000,00 tersebut. Sebagai konsekuensinya, mereka akan mencari tambahan nafkah di luar pekerjaannya sebagai guru, yang pada gilirannya mereka kurang berkonsentrasi atau kurang fokus dalam memberikan layanan pendidikan terhadap peserta didik, karena pekerjaan sebagai guru dijadikan sebagai pekerjaan sambilan, bukan profesi.

Dalam realitas sejarah, perhatian Rasulullah terhadap pendidikan tampak jelas ketika beliau menetapkan para tawanan Perang Badar dapat bebas jika mereka mengajarkan baca tulis kepada sepuluh orang penduduk Madinah. Hal ini merupakan tebusan. Dalam pandangan Islam, barang tebusan merupakan hak Baitul Mal (kas negara). Tebusan ini sama nilainya dengan pembebasan tawanan Perang Badar. Artinya, Rasulullah Saw. telah menjadikan biaya pendidikan itu setara nilainya dengan barang tebusan yang seharusnya menjadi milik Baitul Mal. Dengan kata lain, beliau memberikan upah kepada para pengajar (tawanan perang) dengan harta benda yang seharusnya menjadi milik Baitul Mal. Kebijakan beliau ini dapat dimaknai bahwa kepala negara bertanggung jawab penuh atas setiap kebutuhan rakyatnya, termasuk pendidikan.

Imam Ibnu hazam, dalam kitabnya *al-Ahkām*, menjelaskan bahwa kepala negara (khalifah) berkewajiban untuk memenuhi sarana pendidikan, sistemnya, dan orang-orang yang digaji untuk mendidik masyarakat. Jika kita melihat sejarah kekhalifahan Islam, kita akan melihat begitu besarnya perhatian para khalifah terhadap pendidikan rakyatnya. Demikian pula perhatiannya terhadap nasib para pendidiknya. Imam ad-Damsyiqi telah menceritakan sebuah riwayat dari al-Wadliyah bin Atha' yang menyatakan bahwa di kota Madinah pernah ada tiga orang guru yang mengajar anak-anak. Khalifah Umar bin al-Khattab memberikan gaji kepada mereka masing-masing sebesar 15 dinar. Sedangkan 1 dinar = 4,25 gram emas. Jika dikurskan menjadi mata uang rupiah berarti gaji guru pada saat itu sebesar $15 \times 4,25$ gram emas = 63,75 gram jika harga emas saat ini sebesar Rp. 300.000,00 berarti gaji guru sebesar $63,75 \times \text{Rp. } 300.000,00 = \text{Rp. } 19.125.000,00$. Masalahnya adalah, bangsa Indonesia masa kini justru lebih mengikuti ajaran sufi dan tidak belajar dari sejarah Islam sebagaimana pada masa Rasulullah Saw. dan Khalifah Umar bin Khattab.⁷¹

Dalam rangka meningkatkan kualitas hasil pendidikan, para pengambil kebijakan di bidang pendidikan sering memperkenalkan dan melakukan inovasi pendidikan. Inovasi di bidang

⁷¹ Ibid., 101-102.

pembelajaran misalnya sering ditatarkan atau didiklatkan kepada para guru, seperti active learning, joyfull learning, collaborative learning, contextual teaching and learning, problem based learning, cooperative learning, inquiry, quantum teaching and learning, multiple intelligences based learning, dan seterusnya. Berbagai inovasi tersebut diadopsi dari negara-negara yang menghargai dan memuliakan guru sebagaimana uraian tersebut di atas. Ketika inovasi tersebut dilakukan di Indonesia agaknya kurang memperhatikan kondisi riil guru-guru di lapangan yang masih belum dimuliakan dan kurang memperoleh penghargaan yang layak, terutama dari segi kesejahteraannya. Karena itu inovasi pembelajaran tersebut pada gilirannya hanya merupakan pengetahuan saja bagi mereka dan belum berhasil diimplementasikan secara maksimal, kecuali pada beberapa sekolah (madrasah) unggulan seperti RSBI/RMBI dan SBI/MBI yang notabene biaya pendidikannya sangat mahal.

Lembaga pendidikan Islam seperti madrasah dan sekolah Islam yang tumbuh berkembang di Indonesia cukup bervariasi. Dalam arti masih ada yang berada di bawah standar nasional, sejajar dengan standar nasional, dan ada pula yang sudah berada di atas standar nasional sehingga dirancang untuk menjadi sekolah

(madrasah) rintisan bertaraf nasional atau MBI (Madrasah Bertaraf Internasional).⁷² Menurut Ki Supriyoko, jika menafsirkan terminologi sekolah (madrasah) bertaraf internasional dari dimensi kiblat, barangkali lebih tepat. Disebut bertaraf internasional apabila sekolah (madrasah) tersebut memiliki ciri khas atau keunggulan tertentu sehingga dijadikan kiblat oleh sekolah (madrasah) lain secara internasional. Misalnya mendirikan sekolah batik yang dijadikan kiblat oleh sekolah-sekolah lain di mancanegara. Demikian pula, mampu mendirikan sekolah (madrasah) karawitan, pewayangan, tari Bali, dan lain sebagainya. Dengan demikian, perlu adanya kejelasan mengenai konsep sekolah (madrasah) yang berstandar ataupun bertaraf internasional itu sendiri.⁷³

Agar madrasah menjadi unggul, maka madrasah sangat tergantung pada SDM yang ada di dalamnya. Sedangkan untuk menjadikan SDM tersebut menjadi SDM yang unggul, mindset orang-orang yang ada di dalam madrasah harus diubah serta dikembangkan atau diberdayakan. Pemberdayaan tersebut dapat dilakukan dengan cara menyusun konsep kepemimpinan serta budaya sekolah (madrasah) yang baik. Dengan kepemimpinan

⁷² Ibid., 102-103.

⁷³ Ibid., 103-104.

serta budaya sekolah yang baik, maka pemimpin dapat mengelola perubahan yang akan dialaminya dan risiko yang akan ditanggung sebagai akibat dari perubahan tersebut.

Budaya sekolah mengajak seseorang untuk mendudukan sekolah sebagai suatu organisasi yang di dalamnya terdapat individu-individu yang memiliki hubungan dan tujuan bersama (suara organisasi tersebut). Tujuan ini diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders). Budaya sekolah merupakan perpaduan nilai-nilai keyakinan, asumsi, pemahaman, dan harapan-harapan yang diyakini oleh warga sekolah serta dijadikan pedoman bagi perilaku dan pemecahan masalah (internal dan eksternal) yang mereka hadapi. Dengan kata lain, budaya sekolah merupakan semangat, sikap, dan perilaku pihak-pihak yang terkait dengan sekolah, atau pola perilaku serta kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh warga sekolah secara konsisten dalam menyelesaikan berbagai masalah.

Menurut Deal dan Peterson, budaya sekolah adalah sekumpulan nilai yang melandasi perilaku, tradisi, kebiasaan keseharian, dan simbol-simbol yang dipraktikkan oleh kepala sekolah, guru, petugas administrasi, peserta didik, dan masyarakat sekitar sekolah. Budaya ini merupakan seluruh pengalaman

psikologis para peserta didik baik yang bersifat sosial, emosional maupun⁷⁴ intelektual yang diserap oleh mereka selama berada dalam lingkungan sekolah. Respon psikologis keseharian peserta didik terhadap hal-hal seperti cara-cara guru dan personel sekolah lainnya bersikap dan berperilaku (layanan wali kelas dan tenaga administratif misalnya), implementasi kebijakan sekolah, kondisi dan layanan warung sekolah, penataan keindahan, kebersihan dan kenyamanan lingkungan sekolah, semuanya membentuk budaya sekolah. Semua itu akan merembes pada penghayatan psikologis warga sekolah termasuk peserta didik yang pada gilirannya membentuk pola nilai, sikap, kebiasaan, dan perilaku.

Pengembangan pendidikan agama Islam sebagai budaya sekolah berarti bagaimana mengembangkan PAI di sekolah, baik secara kuantitatif maupun kualitatif diposisikan sebagai pijakan nilai, semangat, sikap, dan perilaku bagi para aktor sekolah seperti kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan lainnya, orang tua murid, dan peserta didik itu sendiri.⁷⁵

Pendidikan agama Islam di sekolah (madrasah) maupun di masyarakat perlu diorientasikan pada: (1) pengembangan SDM,

⁷⁴ Muhaimin, *Rekonstruksi Pendidikan Islam; dari Pradigma Pengembangan, Manajemen Kelembagaan, Kurikulum hingga Strategi Pembelajaran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 308.

⁷⁵ *Ibid.*, 309.

karena keterpurukan bangsa bisa diobati dan disembuhkan dengan tersedianya SDM yang tangguh: cerdas secara intelektual, sosial dan spiritual, memiliki dedikasi dan disiplin, jujur, tekun, ulet, dan inovatif; (2) ke arah pendidikan agama Islam multikulturalis, yakni pendidikan agama Islam perlu dikemas dalam watak multikulturalis, ramah menyapa perbedaan budaya, sosial dan agama; (3) mempertegas misi *liutammima makarimal akhlaq* (untuk penyempurnaan kemuliaan akhlak) sebagai misi utama Rasulullah; dan (4) melakukan spiritualisasi watak kebangsaan, termasuk spiritualisasi berbagai aturan hidup untuk membangun bangsa yang beradab. Pada yang terakhir ini sekaligus mengandung makna perlunya pengembangan pendidikan agama sebagai budaya sekolah.⁷⁶

Di sisi lain untuk dapat melakukan perubahan dengan baik dan mampu menanggulangi risiko yang akan timbul sebagai akibat dari perubahan, madrasah perlu membangun organisasi pembelajar (*learning organization*), yaitu suatu kondisi organisasi yang mana kepemimpinan dalam organisasi tersebut menciptakan suatu sistem yang membuat orang-orang dalam organisasi selalu mengembangkan diri terus menerus. Dengan kondisi SDM

⁷⁶ Muhaimin, *Nuansa Baru Pendidikan Islam: Mengurai Benang Kusut Dunia Pendidikan* (Jakarta: Rajawali Pers: 2006), 155.

semacam itu, maka madrasah akan memiliki kemampuan beradaptasi yang sangat tinggi dengan kondisi makro yang berkembang tanpa harus kehilangan jati dirinya.⁷⁷

Azyumardi Azra mengemukakan bahwa aspirasi umat Islam dalam pengembangan perguruan tinggi agama Islam (PTAI) pada mulanya didorong oleh beberapa tujuan, yaitu: (1) untuk melaksanakan kajian dan pengembangan ilmu-ilmu agama Islam pada tingkat yang lebih tinggi secara lebih sistematis dan terarah; (2) untuk melaksanakan pengembangan dan peningkatan dakwah Islam; (3) untuk melakukan reproduksi dan kaderisasi ulama dan fungsionaris keagamaan, baik pada kalangan birokrasi negara maupun sektor swasta, serta lembaga-lembaga sosial, dakwah, pendidikan, dan sebagainya.

Pada perkembangan selanjutnya terdapat kecenderungan-kecenderungan baru untuk merespon berbagai tuntutan dan tantangan yang berkembang di masyarakat. Beberapa kecenderungan tersebut antara lain menyangkut: (1) tuntutan akan studi keislaman yang mengarah pada pendekatan non-mazhabi, sehingga menghasilkan pemudaran sektarianisme. Dikembangkannya mata kuliah Perbandingan Mazhab, Masail al-

⁷⁷ Muhaimin, Manajemen Pendidikan: Aplikasinya dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), 28.

Fiqh, Pemikiran dalam Islam (Ilmu Kalam, Filsafat Islam, dan Tasawuf), dan Perkembangan Pemikiran Modern di Dunia Islam, merupakan upaya pengembangan wawasan terhadap khazanah pemikiran ulama-ulama terdahulu dan kontemporer untuk merespon berbagai problem, tuntutan dan tantangan perkembangan zaman, dan sekaligus sebagai upaya melakukan pemudaran sektarianisme. Kecenderungan semacam ini sangat relevan dalam rangka mengantisipasi fenomena pluralisme dan multikulturalisme serta pandangan bangsa Indonesia yang ber-Bhineka Tunggal Ika; (2) menyangkut pergeseran dari studi keislaman yang bersifat normatif ke arah yang lebih historis, sosiologis dan empiris. Upaya ini diwujudkan antara lain dalam bentuk perpaduan antara empirik dan sumber wahyu untuk saling mengontrol, dalam arti wahyu mengontrol untuk menghasilkan teori yang kredibel dan bermanfaat, dan dalam waktu yang sama hasil empirik akan mengontrol proses memahami wahyu; (3) menyangkut orientasi keilmuan yang lebih luas.⁷⁸

Dalam konteks yang ketiga tersebut, pada dekade yang lalu, kajian yang berkembang di PTAI, sebagaimana tercermin dalam fakultas-fakultas dan jurusan-jurusan yang ada, lebih menekankan pada pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam dalam

⁷⁸ Muhaimin, Rekonstruksi Pedidikan Islam, 240-241.

pegertian al-*'ulūm* al-naqliyah (perennial knowledge). Pengembangan semacam itu ternyata telah mendapat kritik, yaitu bahwa paradigma yang mendasari PTAI tersebut dianggap kurang relevan lagi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tuntutan pembangunan nasional, karena bersifat sangat sektoral, hanya memenuhi satu sektor tertentu dalam kehidupan Islam di Indonesia, yaitu memenuhi kebutuhan akan sarjana-sarjana yang mendapatkan pengetahuan tinggi mengenai agama Islam. Dengan demikian, PTAI lebih mengabadikan paham dualism atau dikotomi, dan melahirkan over specialization, bahkan terjadi isolasi akademik. Di samping itu, PTAI dengan paradigmanya tersebut dipandang tidak memungkinkan untuk melahirkan manusia-manusia yang kompetitif dalam era globalisasi yang didominasi oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena itu, PTAI saat ini dituntut untuk dapat melahirkan manusia-manusia yang menguasai iptek dan sekaligus hidup di dalam nilai-nilai agama (Islam), yang hal ini merupakan pilar-pilar dari masyarakat madani.⁷⁹

Kritik tersebut menggarisbawahi perlunya PTAI pada dataran operasional dibangun agar lulusannya mampu berkiprah di berbagai sektor kehidupan dan berbagai bidang keahlian, serta

⁷⁹ Ibid.

berada pada seluruh strata kehidupan dan keahlian. Dalam arti, agar lulusan PTAI terutama Fakultas/Tarbiyah Program Studi PAI mampu berkiprah dalam forum manapun, maka perlu dikembangkan bidang-bidang tugas yang lebih luas, berusaha menyiapkan calon-calon pendidik agama Islam yang di samping menguasai seluk-beluk pembelajaran PAI di sekolah (madrasah) juga memiliki landasan filosofis, pedagogis, psikologis, sosiologis, dan historis yang kokoh, serta memiliki wawasan ekonomi, politik, sains, dan teknologi yang dikaji dalam perspektif Islam. Tidak hanya dapat mengucapkan *māssya* Allah ketika terkagum dengan temuan iptek, atau mengucapkan *astaghfirullah* ketika temuan iptek membuat malapetaka.⁸⁰

F. TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU

Mengenal pustaka dan pengalaman orang lain dalam bidang yang diminati pada hakikatnya berarti mempelajari subjek yang diteliti. Dengan membaca dan mengenal pengalaman orang lain, berarti mencari teori-teori, konsep-konsep, dan generalisasi yang dapat dijadikan landasan teori bagi penelitian yang akan dilakukan.⁸¹ Hasil penelitian yang ada dan substansi lain dalam penelitian dapat diambil sebagai acuan kepustakaan. Acuan tersebut

⁸⁰ Ibid., 242.

⁸¹ Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Komponen MKDK* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 78.

dapat ditemukan melalui jurnal maupun laporan hasil penelitian, keduanya dapat digunakan untuk menyusun struktur studi literatur dan kerangka teoretis.⁸² Dalam mengkaji penelitian ini, penulis juga melakukan telaah hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan materi pembahasan sebagai perbandingan sekaligus acuan dalam meneliti lebih lanjut dan lebih mendalam. Hasil dari telaah pustaka tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

Skripsi tahun 2013, dengan judul “Modernisasi Pendidikan Islam di Indonesia (Studi atas Pemikiran Azyumardi Azra tahun 1999-2012)” karya tulis dari Ana Nihayati (STAIN Ponorogo, 2013). Adapun rumusan masalah dari penelitian tersebut adalah:

1. Bagaimana modernisasi kurikulum pendidikan Islam di Indonesia menurut Azyumardi Azra?
2. Bagaimana modernisasi manajemen madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam di Indonesia menurut Azyumardi Azra?

Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa modernisasi kurikulum pendidikan Islam di Indonesia menurut Azyumardi Azra meliputi: (a) segi materi, materi yang diberikan kepada anak didik memenuhi penguasaan ilmu dan teknologi, serta penanaman pemahaman dan pengamalan ajaran agama. Selain itu juga memiliki topik yang beragam, berbobot, menarik serta berorientasi terhadap skill dan keahlian. (b) segi tujuan, berorientasi terhadap

⁸² Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktisnya (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), 36.

pembinaan dan pengembangan nilai-nilai agama pada peserta didik. Selain itu juga berorientasi pada pembinaan lulusan yang memiliki berbagai kompetensi. (c) segi metode, penyederhanaan muatan kurikulum, memasukkan hal-hal yang urgen bagi ciri khas madrasah ke dalam celah “muatan lokal” dan penambahan jam pelajaran, bersifat inovatif dan update serta menghasilkan anak didik yang imajinatif dan kreatif serta mampu memiliki ide-ide segar yang dimiliki. (d) dan segi evaluasi, menilai seberapa jauh penguasaan terhadap materi pelajaran dengan penilaian secara internal dan eksternal.

Modernisasi manajemen madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam di Indonesia menurut Azyumardi Azra memiliki 2 hal pokok, yakni: (a) dari segi kelembagaan antara lain, madrasah memiliki visi dan misi keislaman yang jelas, modern, dan humanis, melakukan transformasi madrasah, dengan mainstreaming pendidikan Islam ke dalam jalur pendidikan nasional secara keseluruhan, pembentukan madrasah model yang unggul, sebagai solusi untuk menyelenggarakan pendidikan Islam yang compatible dengan perkembangan zaman; (b) dari segi SDM antara lain, peran kepala madrasah yang bertugas sebagai manajer utama, harus bisa mengorganisasi, memanfaatkan sumber daya yang ada guna mendukung berlangsungnya proses KBM yang maksimal, dan dapat berkomunikasi dengan antar komponen, selain itu faktor kesiapan guru, siswa, dan faktor pendukungnya (sarana dan prasana).

Skripsi tahun 2014, dengan judul “Rekonstruksi Pendidikan Islam (Telaah Reposisi Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional menurut Muhaimin)” karya tulis dari Taufik Ismail (STAIN Ponorogo, 2014). Adapun rumusan masalah dari penelitian tersebut adalah:

1. Aspek apa yang perlu direposisi dalam pendidikan Islam menurut Muhaimin?
2. Bagaimana strategi mewujudkan reposisi pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional menurut Muhaimin?

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat dua poin penting dalam reposisi pendidikan Islam menurut Muhaimin, yakni:

1. Aspek reposisi pendidikan Islam menurut Muhaimin berkenaan dengan aspek metodologi pembelajaran dari yang bersifat doktiner-dogmatis menuju kepada pembelajaran yang bersifat aktual dan kontekstual yang dimaksudkan untuk: (a) menanamkan nilai-nilai dan ajaran Islam kepada peserta didik agar tidak hanya mampu untuk mengetahui dan memahami ajaran Islam saja akan tetapi mampu memaknai dan menjiwai nilai-nilai agama tersebut; (b) Menciptakan iklim dan budaya religius di sekolah serta semua komponen-komponen pendidikan di madrasah, sekolah, dan Perguruan Tinggi.
2. Strategi reposisi pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional menurut Muhaimin:

- a. Reposisi pendidikan Islam dalam aspek metodologi pembelajaran dari yang bersifat doktriner-dogmatis menuju kepada pembelajaran yang bersifat aktual dan kontekstual sesuai dengan kondisi dan situasi yang terjadi dalam sosial masyarakat peserta didik saat ini. Adapun upaya (strategi) untuk mengimplementasikan pembelajaran kontekstual diperlukan beberapa pendekatan. (1) Pendekatan filsafat, (2) Perlunya memahami dan bersedia menerima pola pikir keagamaan, (3) Pendekatan tasawuf.
- b. Reposisi pendidikan Islam sebagai upaya menciptakan budaya agama dalam komunitas sekolah/madrasah memerlukan tiga tataran, yaitu: (1) tataran nilai yang dianut, perlu perumusan bersama yang oleh semua warga dan masyarakat sekolah; (2) tataran praktik keseharian, yaitu nilai-nilai keagamaan yang telah disepakati untuk diaplikasikan dalam bentuk pembiasaan yang biasa dilakukan oleh semua warga sekolah (dalam wilayah ini bersifat strategi yang digunakan adalah persuasif); (3) tataran simbol-simbol budaya, yaitu penggunaan simbol-simbol yang dapat membangkitkan semangat dalam melaksanakan pembiasaan nilai-nilai keagamaan di sekolah/madrasah.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang telah diulas yakni ketiadaan penelitian yang membahas tentang pemikiran Imam

Suprayogo secara spesifik. Gagasan yang diberikan Imam Suprayogo dalam mengembangkan pendidikan di madrasah lebih cenderung pada pengembangan kurikulum, peran masyarakat, serta pemberdayaan SDM.

G. METODE PENELITIAN

1. PENDEKATAN DAN JENIS PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian karya ilmiah ini adalah penelitian kualitatif (qualitative research),⁸³ yaitu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.⁸⁴

Karena didasarkan pada data-data kepustakaan, maka penelitian ini dapat diklasifikasikan dalam jenis penelitian kajian kepustakaan (library research), yaitu telaah yang dilakukan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan,⁸⁵ serta dibangun dengan metode berfikir deskriptif analitis, yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis terhadap catatan-catatan atau dokumen sebagai sumber data.⁸⁶

2. SUMBER DATA

⁸³ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 60.

⁸⁴ Ibid.

⁸⁵ Tim Penulis, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Kuantitatif, Kualitatif, Library, dan PTK* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2016), 55.

⁸⁶ Nurul Zariah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 50.

Menurut Bungin Burhan, data yang direkrut dalam penelitian bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama di lapangan. Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama.⁸⁷ Sumber primer ditemukan dalam karya atau publikasi yang masih ditulis oleh penulis utama.⁸⁸

Dalam penelitian ini, sumber data primer yang digunakan adalah beberapa karya tulis Imam Suprayogo yang berkaitan dengan pengembangan madrasah di Indonesia, yakni “Quo Vadis Madrasah: Gagasan, Aksi dan Solusi Pembangunan Madrasah” yang diterbitkan di Yogyakarta oleh Hikayat Publishing pada tahun 2007 dan “Pendidikan Berparadigma Al-Qur’an: Pergulatan Membangun Tradisi dan Aksi Pendidikan Islam” oleh penerbit UIN Malang Press, Malang, 2004.

Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data maupun oleh pihak lain atau data pendukung yang sangat diperlukan dalam

⁸⁷ Abdul Manab, Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 202.

⁸⁸ Punaji Setyosari, Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan (Jakarta: Kencana, 2013), 111.

penelitian.⁸⁹ Dapat disimpulkan bahwa sumber sekunder merupakan sumber yang berasal dari karya seseorang yang ditulis oleh orang lain.⁹⁰

Dalam mengkaji penelitian ini, penulis menggunakan beberapa sumber sekunder, yakni:

1. Azyumardi Azra. Paradigma Baru Pendidikan Nasional: Rekonstruksi dan Demokratisasi. Jakarta: Kompas, 2002.
2. Azyumardi Azra. Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
3. Mudjia Rahardjo. Quo Vadis Pendidikan Islam: Pembacaan Realitas Pendidikan Islam, Sosial, dan Keagamaan. Malang: UIN Malang Press, 2006.
4. Muhaimin. Wacana Pengembangan Pendidikan Islam. Surabaya: PSAPM & Pustaka Pelajar, 2004.
5. Muhaimin. Nuansa Baru Pendidikan Islam: Mengurai Benang Kusut Dunia Pendidikan. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006.
6. Muhaimin. Rekonstruksi Pendidikan Islam: dari Paradigma Pengembangan, Manajemen Kelembagaan, Kurikulum hingga Strategi Pembelajaran. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

⁸⁹ Manab, Penelitian Pendidikan, 202.

⁹⁰ Setyosari, Metode Penelitian, 111.

7. Muhaimin. *Pemikiran dan Aktualisasi Pengembangan Pendidikan Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
8. Muhaimin. *Paradigma Pendidikan Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
9. Ninik Masruroh dan Umiarso. *Modernisasi Pendidikan Islam ala Azyumardi Azra*. Jogjakarta: Ar-Ruzz, 2011.
10. Hujair AH. Sanaky. *Pembaruan Pendidikan Islam: Paradigma, Tipologi, dan Pemetaan Menuju Masyarakat Madani Indonesia*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015.

3. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Penelitian ini termasuk kategori penelitian kepustakaan. Oleh karena itu, teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah studi dokumenter (documentary study), yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik itu berupa dokumen tertulis, gambar maupun elektronik.⁹¹

Untuk memperoleh data-data terkait dengan pengembangan madrasah di Indonesia yang mencakup peran masyarakat, pengembangan kurikulum, dan pemberdayaan SDM, maka dalam penelitian ini data banyak diperoleh dengan teknik dokumentasi, yakni mengumpulkan data dari berbagai

⁹¹ Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 221.

dokumen yang dapat berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental.⁹²

4. TEKNIK ANALISIS DATA

Secara definitif, analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga mudah dipahami dan dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan membuat kesimpulan yang dapat diinformasikan kepada orang lain.⁹³

Salah satu jenis metode kepustakaan adalah metode penelitian analisis isi (content analysis). Analisis isi adalah teknik penelitian untuk membuat inferensi yang valid dan dapat diteliti ulang dari data berdasarkan konteksnya. Dalam penelitian analisis isi perlu diperhatikan bahwa inferensi dalam analisis ini bersifat kontekstual karena konteks yang berbeda dapat menghasilkan inferensi yang berbeda pula. Hal ini disebabkan pesan-pesan dan komunikasi simbolis yang diinferensikan itu pada umumnya adalah fenomena yang tidak secara langsung dapat diamati lewat data yang dianalisis.⁹⁴

⁹² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet. II (Bandung: Alfabeta, 2006), 329.

⁹³ *Ibid.*, 335.

⁹⁴ Afifudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 165.

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini adalah analisis isi, yakni teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, serta dilakukan secara obyektif dan sistematis.⁹⁵

H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Dalam rangka mempermudah penulisan pada penelitian, peneliti membuat sistematika pembahasan dengan mengelompokkannya menjadi empat bab yang masing-masing bab terdiri dari sub bab yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya.

Bab I adalah pendahuluan, yang merupakan gambaran umum dalam penelitian secara keseluruhan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori dan telaah pustaka, metodologi penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab II adalah pemaparan data mengenai gagasan Imam Suprayogo tentang pengembangan madrasah yang meliputi peran masyarakat dalam meningkatkan mutu madrasah di Indonesia, pengembangan kurikulum di madrasah, serta pemberdayaan SDM yang dalam hal ini berkaitan erat dengan kepemimpinan dan profesionalisme guru di madrasah.

Bab III adalah hasil analisis mengenai peningkatan kualitas madrasah di Indonesia perspektif Imam Suprayogo tentang peran masyarakat dalam

⁹⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 220.

meningkatkan mutu madrasah, pengembangan kurikulum di madrasah, dan pemberdayaan SDM yang menyangkut kepemimpinan dan profesionalisme guru di madrasah.

Bab IV adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran.



BAB II

PEMIKIRAN IMAM SUPRAYOGO MENGENAI PENGEMBANGAN MADRASAH DI INDONESIA

A. Peran Masyarakat dalam Peningkatan Mutu Madrasah di Indonesia Perspektif Imam Suprayogo

Madrasah lahir dan berkembang di suatu wilayah bukan semata-mata karena belum atau tidak tersedia lembaga pendidikan di wilayah itu sebelumnya. Sekalipun telah ada lembaga pendidikan, dan tidak juga kelebihan murid atau tidak ada sedikitpun halangan untuk memasukinya, tetapi tetap saja masyarakat mendirikan madrasah, sekalipun dalam keadaan yang serba kekurangan. Meskipun sudah terdapat sekolah umum, seorang atau beberapa tokoh yang didukung pengikutnya berpandangan bahwa madrasah harus tetap dibangun, apalagi bila di wilayah tersebut belum mempunyai lembaga pendidikan.⁹⁶

Masyarakat yang kental dalam beragama Islam, menginginkan pendidikan umum dan agama sekaligus untuk memenuhi kebutuhan pendidikan. Mereka ingin agar putra-putrinya menjadi orang yang pintar sekaligus baik. Pintar dimaknai berhasil memperoleh pengetahuan umum seperti Matematika, IPA, Bahasa Inggris, Komputer, dan sejenisnya. Sedangkan menjadi baik dimaknai mampu mengamalkan agamanya secara baik dan khushyuk. Kebutuhan ini

⁹⁶ Imam Suprayogo, *Quo Vadis Madrasah: Gagasan, Aksi, dan Solusi Pembangunan Madrasah Impian* (Yogyakarta: Hikayat Publishing, 2007), 67.

ternyata lebih mungkin dipenuhi oleh lembaga pendidikan madrasah. Hanya saja yang menjadi persoalan ialah belum semua madrasah mampu memenuhi kedua kebutuhan tersebut sekaligus karena kemampuan fasilitas dan pendanaannya yang serba terbatas. Hal ini disebabkan karena madrasah lebih bersifat mandiri (khusus yang berstatus swasta tetapi berjumlah besar) tidak dibiayai oleh pemerintah. Atas dasar pandangan masyarakat seperti itu, madrasah yang berstatus negeri dan dikenal memiliki fasilitas dan guru yang cukup serta berkualitas baik selalu menjadi pilihan utama masyarakat sekitarnya. Bahkan bagi kalangan tertentu, sekalipun madrasah dilihat kurang bermutu tetapi masih tetap menjadi pilihan karena, sekali lagi, madrasah dipandang mampu memenuhi kedua kebutuhan tersebut di atas. Pandangan masyarakat seperti itulah yang menjadikan madrasah memiliki ketahanan yang luar biasa. Jika mengacu pada teori sosiologi bahwa sesuatu akan tetap bertahan sepanjang sesuatu itu memang dibutuhkan oleh masyarakatnya. Madrasah dalam pandangan masyarakat tertentu memang lebih dibutuhkan daripada lembaga pendidikan umum lainnya. Oleh karena itu, madrasah akan tetap eksis bagaimana pun keadaannya.⁹⁷ Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa adanya madrasah disebabkan oleh adanya minat dari masyarakat untuk mendirikan serta mempertahankan madrasah.

Karena masyarakat membutuhkan madrasah agar putra-putri mereka mampu menguasai ilmu pengetahuan dan berakhlak mulia, maka peran masyarakat juga menjadi penopang utama dalam meningkatkan kualitas madrasah, yakni dengan

⁹⁷ Ibid., 9-10.

cara penyusunan organisasi POMG (Persatuan Orang Tua Murid dan Guru) dan BP3 (Badan Pembantu Penyelenggara dan Pembangunan). Keanggotaan POMG atau BP3 terdiri dari para wali murid yang memiliki peran membantu madrasah di dalam meningkatkan kualitasnya, terutama hal-hal yang terkait dengan pengumpulan dana yang diperlukan oleh masing-masing lembaga pendidikan. Pendanaan yang dikumpulkan itu sebenarnya merupakan kumpulan dari para wali murid. Hal ini dimaksudkan agar kepala sekolah tidak terlibat hal-hal yang menyangkut keuangan sehingga lebih konsentrasi untuk menangani peningkatan kualitas pendidikan. Selain itu, strategi ini dipilih agar ada keterlibatan langsung para wali murid dalam penyelenggaraan pendidikan.

Konsep melibatkan masyarakat dalam POMG atau BP3 jika dilihat dari tanggung jawab pendidikan sesungguhnya sangat bagus. Namun pada kenyataannya, tidak semua organisasi tersebut berjalan dengan baik. Lagi pula, peran organisasi yang melibatkan orang tua siswa ini pada umumnya hanya sebatas pengumpulan dana yang diperlukan oleh masing-masing sekolah, terutama yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan sarana fisik dan seputar hal-hal yang diperlukan oleh madrasah. Madrasah-madrasah yang memiliki BP3 dan orang-orangnya cukup paham terhadap visi dan misi pendidikan, ternyata memang dapat mengalami kemajuan. Akan tetapi, sayang tidak sedikit POMG dan BP3 yang keberadaannya sekadar untuk memenuhi kebutuhan formal

sehingga ada atau tidak adanya terasa sama saja.⁹⁸ Oleh sebab itu, baik POMG, BP3, maupun komite madrasah hendaknya menjalin komunikasi yang baik dengan warga madrasah agar dapat bekerja sama untuk memajukan pendidikan di madrasah. Dengan terlibatnya wali murid yang merupakan bagian dari masyarakat, maka masyarakat dapat menjadi sumber, pelaksana dan pengguna yang berarti bahwa adanya madrasah karena masyarakat, masyarakat sebagai penunjang meningkatnya mutu pendidikan di madrasah, dan masyarakat pula yang menjadi pengguna output atau lulusan madrasah. Hal inilah yang dimaksud dengan madrasah sebagai lembaga pendidikan dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Berangkat dari persoalan tersebut, maka terbentuklah konsep manajemen berbasis masyarakat (society based management).

Konsep manajemen berbasis masyarakat, manajemen berbasis sekolah atau di lingkungan madrasah disebut manajemen berbasis madrasah, sesungguhnya bagi madrasah hal itu bukan sesuatu yang baru. Jika manajemen berbasis masyarakat itu diartikan sebagai pengelolaan lembaga pendidikan dikembalikan kepada masyarakat, maka sesungguhnya madrasah merupakan potret lembaga pendidikan yang menerapkan konsep tersebut. Pada kenyataannya, belajar dari kasus kehidupan madrasah,⁹⁹ terdapat korelasi yang amat signifikan antara tingkat ekonomi masyarakat dengan kemajuan lembaga pendidikannya. Bagi masyarakat yang sudah berekonomi yang cukup maju dan peduli pada madrasah,

⁹⁸ Ibid., 13-14.

⁹⁹ Ibid., 45.

maka lembaga pendidikan Islam akan berkembang. Artinya, lembaga pendidikan itu akan mampu mengembangkan diri dalam arti mampu menyediakan tenaga guru yang memenuhi syarat, sarana dan prasarana pendidikan, kurikulum, membangun manajemen yang kokoh, dan lain sebagainya. Akan tetapi jika masyarakatnya lemah, sekalipun mereka memiliki kepedulian terhadap pendidikan yang tinggi, tetapi tidak akan mampu menyangga lembaga pendidikan secara memadai. Jika konsep berbasis manajemen diterapkan untuk pengembangan pendidikan dalam pengertian sesungguhnya, atau dalam arti pemerintah tidak ikut ambil bagian dalam pengelolaan pendidikan, maka hasilnya akan seperti yang dialami madrasah selama ini.¹⁰⁰

Munculnya konsep tentang Manajemen Berbasis Masyarakat dan Manajemen Berbasis Sekolah (Madrasah) diikuti pula oleh konsep baru yang disebut dengan komite madrasah. Konsep ini sesungguhnya merupakan upaya peningkatan ruang lingkup peran POMG atau BP3 dalam peran riilnya sebatas mencari tambahan pendanaan yang diperlukan oleh lembaga pendidikan, maka Komite Sekolah (Madrasah) yang lahir atas dasar Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 diharapkan memiliki peran yang lebih luas, yaitu tidak hanya sebatas instrumen sekolah (madrasah) dalam pengumpulan dana dari wali murid, melainkan terlibat dalam pemberian pertimbangan, pendukung, pengontrol, sebagai mediator dan peran-peran strategis lainnya dalam pengembangan sekolah (madrasah). Melalui konsep ini

¹⁰⁰ Ibid., 46.

akan muncul sebuah pemahaman baru bahwa pendidikan adalah tanggung jawab semua, dikelola secara terbuka dan demokratis.¹⁰¹

Belajar dari berbagai pengalaman dan juga kenyataan-kenyataan di lapangan, ternyata mengimplementasikan konsep komite madrasah itu tidak mudah. Kesulitannya bukan bersumber pada tataran konsep yang kurang jelas, melainkan bisa jadi karena budaya berorganisasi di kalangan masyarakat belum berkembang, apalagi organisasi untuk mengurus lembaga pendidikan yang bersifat nonprofit ini. Sebagai tindak lanjut Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang Komite Madrasah itu telah dilakukan kegiatan sosialisasi maupun penyusunan berbagai pedoman operasional pelaksanaannya. Akan tetapi pada kenyataannya, organisasi semacam itu yang benar-benar berhasil mampu melakukan peran dan fungsinya secara baik jumlahnya amat kecil. Sudah menjadi sesuatu yang lazim bahwa lembaga atau badan yang dibentuk atas anjuran pemerintah pada kenyataannya hanya berjalan sebatas tataran formal saja. Hal itu tidak saja terlihat pada organisasi yang terkait dengan pendidikan, seperti komite madrasah, tetapi juga badan-badan lainnya yang terkait dengan lembaga selain itu pada umumnya, seperti yayasan badan pembina sebuah perguruan tinggi atau yayasan lembaga sosial lainnya. Selama ini yang menjadi persoalan adalah bagaimana organisasi semacam komite madrasah dapat melakukan fungsi dan perannya sebagaimana yang diharapkan sehingga komite madrasah keberadaannya bukan hanya sekedar sebagai pemenuhan syarat dan

¹⁰¹ Ibid.

rukun sebuah lembaga pendidikan, melainkan benar-benar mampu memberi manfaat bagi pengembangan lembaga pendidikan yang bersangkutan.

Organisasi dengan berbagai kelengkapannya, jika diumpamakan sebagai makhluk hidup, tidak lebih sekedar jasad atau raganya. Raga atau jasad itu agar bisa hidup, bergerak, dan berkembang menjadi besar dan mampu melakukan fungsi dan perannya, ia memerlukan nyawa atau roh. Aspek terakhir ini ternyata tidak mudah diadakan dan juga dikembangkan. Akibatnya badan atau organisasi pendidikan keberadaannya bagai jasad minus nyawa. Pada tataran administrasi kelengkapan organisasi lembaga pendidikan itu sudah terbentuk, tetapi sekali lagi, keberadaannya sebatas pemenuhan administrasi belaka. Orang-orang yang menduduki organisasi seperti ini biasanya tidak bisa mencurahkan pikiran dan tenaganya secara penuh. Pada umumnya yang terjadi di lapangan mereka hanya berperan secara periodik jikalau ada problem yang harus diselesaikan bersama. Kehidupan organisasi seperti itu menjadikan mereka hanya memberikan perhatian terhadap tugas yang dibebankan kepada mereka dengan tidak sepenuh hati atau setengah-setengah. Bermula dengan sikap seperti ini menjadikan organisasi tidak berjalan dengan baik, dan bahkan karena informasi terkait dengan lembaga pendidikan tidak dapat dibagi secara merata, sebagai akibatnya rentan menimbulkan konflik yang kontra produktif.¹⁰²

Sebagai salah satu contoh ialah hasil pengamatan yang dilakukan di Madrasah Terpadu Malang tentang keberadaan majelis madrasah ini, masing-

¹⁰² Ibid., 14-16.

masing menunjukkan dinamika yang sangat berbeda. MIN Malang 1 ketika BP3 dipimpin oleh seseorang yang memiliki komitmen yang tinggi, peran-peran yang dilakukan tidak hanya sebatas mengumpulkan dana, akan tetapi sudah seperti yang dikehendaki oleh konsep komite madrasah. Pemimpin tersebut mampu melakukan peran-peran bimbingan, ikut serta dalam menyusun perencanaan, menjadi mediator dan bahkan juga inspirator dalam pengembangan madrasah. Akan tetapi, setelah kepemimpinan itu diganti oleh orang lain, maka yang sering terjadi adalah sebaliknya, yaitu terjadinya konflik-konflik disfungsional yang tidak produktif.

Hasil pengamatan lainnya, ketiga madrasah (Madrasah Ibtidaiyah Negeri Malang 1, Madrasah Tsanawiyah Negeri Malang 1, dan Madrasah Aliyah Negeri Malang 3) yang sekarang ini disebut sebagai madrasah terpadu, masing-masing memiliki majelis madrasah (nama lain dari komite madrasah) ternyata memiliki dinamika yang berbeda. Padahal masing-masing majelis madrasah dipimpin oleh para dosen senior perguruan tinggi negeri di Malang. Dari hasil pengamatan dapat disimpulkan bahwa masing-masing dari majelis tersebut mempengaruhi dinamika organisasi, yakni siapa yang memimpin dan bukan oleh struktur atau kekuatan organisasinya. Seperti MIN Malang 1, dahulu menjadi maju dan berkembang pesat karena orang yang memimpin BP3 memiliki komitmen tinggi terhadap madrasah. Dari kenyataan itu menjadi jelas bahwa dinamika BP3 bukan

dihasilkan oleh kekuatan organisasinya, melainkan oleh karena dedikasi personal.

Untuk membangun Komite Madrasah yang mampu hidup dan berkembang, perlu dilakukan upaya menyuntikkan nyawa, roh atau semangat kepada pimpinan dan anggota lembaga yang dibangun. Jika demikian, persoalannya adalah bagaimana cara menyuntikkan semangat, roh atau nyawa tersebut agar dapat dilakukan secara tepat. Akan menjadi hal yang aneh apabila lembaga yang kehadirannya dimaksudkan sebagai mobilisator yang seharusnya menyangand kekuatan penggerak, tetapi pada kenyataannya justru masih memerlukan daya dorong tersendiri. Oleh karena itu, persoalan ini menjadi hal yang rumit. Terdapat sebuah konsep yang diajukan untuk menjawab pertanyaan sebelumnya, yakni manusia, siapa saja, baik perseorangan atau kelompok (organisasi) bergerak apabila diawali oleh kekuatan dan sumber inspirasi. Kekuatan dan sumber inspirasi tersebut setidaknya didapatkan dari dua sumber, yaitu kegiatan qira'ah pada satu sisi dan jika berhasil membangun visi, misi, core of value, dan core of believe. Kegiatan qira'ah secara mendalam dan mencukupi akan melahirkan kesadaran, selanjutnya melalui kesadaran tersebut akan muncul kemauan untuk bangkit atau qiyam. Kebangkitan itulah yang melahirkan naluri untuk berjuang atau melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan ini. Akan tetapi, berjuang harus dilakukan melalui satu fase, yaitu kesediaan untuk membersihkan diri, baik pada tataran lahir maupun batin. Pada umumnya, orang

maupun organisasi tidak mudah untuk melakukan hal ini. Bahkan bangsa kita yang sudah sekian lama terpuruk, dan sampai saat ini belum berhasil terselesaikan karena tidak mampu melakukan pembersihan diri ini. Korupsi, kolusi, dan nepotisme merupakan sejumlah sifat yang telah diakui sebagai nista dan rendah sehingga dibenci oleh hampir semua orang. Akan tetapi kita ternyata sampai saat ini belum mampu menghilangkannya. Dalam ajaran Islam, kebangkitan untuk berjuang juga harus diawali oleh niat yang bersih dan ikhlas sebagai pengabdian kepada Yang Maha Besar, yaitu Allah Swt.¹⁰³

Sebagai implementasi konsep tersebut, pada fase-fase awal perlu dikembangkan tradisi bersilaturahmi di antara para pengurus. Silaturahmi dalam bentuk sederhana, dapat berupa studi banding ke lembaga pendidikan madrasah yang sudah maju. Selain itu, pertemuan-pertemuan di antara anggota komite (majelis) madrasah perlu untuk diintensifkan. Kekuatan penggerak untuk mengembangkan madrasah bukan semata-mata bersumber dari kekuatan eksternal berupa peraturan dan juga uang, melainkan bersumber dari dalam diri masing-masing anggota komite madrasah tersebut. Gerakan yang datangnya hanya sekedar memenuhi kebutuhan atau peraturan hanya akan menjadi gerakan semu dan bersifat karitatif. Jika hal itu terjadi, maka hanya menghasilkan bentuk kegiatan semu pula yang tidak akan membawa hasil pada pengembangan madrasah. Tambahan pula, jika kegiatan itu sekedar bermotifkan fasilitas apalagi hanya akan mengontrol jalannya pendidikan, apalagi hanya sebatas aspek

¹⁰³ Suprayogo, Quo Vadis Madrasah, 16-19.

keuangannya, akan berdampak kurang produktif. Sebab, bisa jadi justru melahirkan konflik-konflik disfungsional di lingkungan madrasah. Boleh saja dengan alasan agar terjadi suasana keterbukaan dan demokratisasi di lingkungan madrasah, akan tetapi jika tidak pandai-pandai mengelolanya justru akan berakibat fatal pada kelangsungan hidup madrasah. Madrasah selama ini berkembang, apalagi yang berstatus swasta disangga oleh orang-orang yang menyanggah cita-cita dan memiliki komitmen yang tinggi pada lembaga pendidikan Islam. Mereka bersedia mengorbankan apa saja yang dimiliki untuk kepentingan pengembangan madrasah didasari atas suasana hati bersih, ikhlas, dan tawakal dengan niat beribadah. Oleh karena itu, bisa jadi pendekatan modern dalam rangka membangun suasana keterbukaan itu justru mengurangi kekuatan yang sebelumnya telah nyata-nyata mampu menjadi penopang kehidupan madrasah itu sendiri.

Pengembangan madrasah, terutama pada fase madrasah yang secara umum masih seperti sekarang ini karena kekuatannya baru pada tingkat orang, belum pada tingkat sistem atau organisasi, maka upaya-upaya untuk membangun, menambah, dan menyatukan orang-orang yang mengambil peran di madrasah justru lebih diutamakan daripada sekedar memenuhi peraturan formal.¹⁰⁴ Pada umumnya madrasah yang kurang maju berada di lingkungan masyarakat yang secara ekonomi lemah kendati pun perhatian mereka kepada madrasah cukup tinggi. Madrasah itu dikelola oleh yayasan-yayasan sosial keagamaan (Islam),

¹⁰⁴ Ibid., 19-20.

yang umumnya tidak memiliki sumber dana dan juga manajerial serta leadership yang kokoh. Akibatnya, madrasah yang dikelola berjalan secara linear apa adanya. Madrasah jika dilihat dari etos kerja, semangat serta motivasi para pengelolanya, sudah sangat luar biasa tingginya. Dalam hal membangun madrasah, bagi masyarakat tertentu, mereka tidak pernah membayangkan akan memperoleh keuntungan yang bersifat materi. Bahkan mereka mampu menunjukkan kesadaran akan pentingnya lembaga pendidikan Islam ini melalui pengorbanan berupa apa saja yang mereka miliki. Tidak jarang ditemui orang yang bersedia menjual tanah atau hewan ternak untuk membiayai pembangunan madrasah. Jiwa berkorban seperti ini agaknya sulit ditemui pada lingkungan masyarakat yang menamakan diri telah memasuki dunia modern.¹⁰⁵ Eksistensi madrasah tetap bertahan karena dimotivasi oleh orang-orang yang memiliki minat besar terhadap pendidikan Islam.

B. Pengembangan Kurikulum Madrasah di Indonesia Perspektif Imam Suprayogo

Akhir-akhir ini pemerintah, dalam hal ini kementerian pendidikan dan kebudayaan, membicarakan kembali tentang kurikulum di sekolah. Kabar-kabarnya dirasakan bahwa mata pelajaran yang diberikan di setiap jenjang pendidikan terlalu banyak, sementara hasilnya ternyata kurang memuaskan. Selain dinilai bahwa beberapa pelajaran yang harus dikuasai oleh para siswa

¹⁰⁵ Ibid., 44.

terlalu berat, maka kurikulum yang ada selama ini perlu ditinjau kembali agar tidak terlalu melelahkan. Merumuskan kurikulum tidaklah mudah. Padahal kurikulum itu jika disederhanakan hanyalah seperangkat pengetahuan yang seharusnya diberikan dan dimiliki oleh para siswa masing-masing jenjang pendidikan. Misalnya, tatkala seorang anak lulus sekolah dasar, maka anak tersebut harus memiliki pengetahuan dan keterampilan tertentu.¹⁰⁶

Demikian pula pada jenjang pendidikan setelahnya, yaitu pada sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan perguruan tinggi. Mungkin pada awalnya, kurikulum disusun dengan mudah, disesuaikan dengan jenis ilmu yang telah ditemukan di dunia ini, yaitu secara umum dikelompokkan menjadi ilmu alam, ilmu sosial, dan humaniora. Akan tetapi dalam perjalanan selanjutnya, ternyata ada hal-hal lain yang dianggap penting dan dirasa harus diajarkan. Misalnya, pada saat masyarakat merasa perlu menata kependudukan, maka muncul pandangan agar kependudukan diajarkan di sekolah. Ketika masyarakat sedang ramai dilanda tindak kejahatan korupsi, maka diajarkanlah bagaimana menanggulangi korupsi, dan begitu pula pada saat di tengah masyarakat dilihat banyak anak tawuran, maka diajarkanlah pendidikan karakter, dan seterusnya. Akibatnya, jumlah pelajaran menjadi banyak, dan beban para siswa menjadi terlalu berat.

¹⁰⁶ Imam Suprayogo, Nunut Berbicara tentang Kurikulum, (online), (<http://imamsuprayogo.com/artikel/nunut-berbicara-tentang-kurikulum>, (ditulis tanggal 24 November 2012), diakses 12 April 2017).

Terkait dengan perilaku dan lebih-lebih dikaitkan dengan pendidikan, sebagian orang berpikir sederhana. Mereka mengira bahwa seseorang melakukan korupsi karena tidak mengerti bahaya korupsi. Tatkala banyak anak tawuran dikira anak-anak yang tawuran tersebut tidak paham bahwa tawuran dianggap tidak baik. Padahal yang terjadi bukanlah seperti itu. Begitu pula halnya dengan para koruptor, mereka sangat paham bahwa korupsi itu perbuatan yang dilarang, namun mereka masih tetap melakukannya. Mereka melakukan suatu keburukan bukan karena tidak paham, tetapi semata-mata tidak mampu memimpin dirinya sendiri. Sebenarnya tatkala orang menyusun kurikulum, pertanyaan yang perlu dipertimbangkan adalah pengetahuan dan keterampilan apa yang seharusnya dimiliki oleh lulusan pada masing-masing jenjang pendidikan. Dulu pernah ada pandangan bahwa lulusan sekolah dasar harus mampu membaca, menulis, dan berhitung. Selain itu adalah olahraga dan menyanyi. Atas dasar pandangan tersebut maka pelajaran di sekolah dasar seharusnya tidak lebih dari beberapa mata pelajaran itu. Setiap hari anak-anak diajarkan dan dilatih menulis hingga tulisannya bagus. Selain itu, juga diajak berlatih berhitung, membaca, menyanyi, dan olahraga.¹⁰⁷

Mungkin atas dasar pertimbangan betapa pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan, maka pelajaran menulis dan membaca diberikan di Taman Kanak-kanak. Memasuki sekolah dasar, anak-anak sudah dianggap mampu membaca dan menulis. Kemampuan itu juga sudah diketahui dari tes masuk SD. Namun

¹⁰⁷ Ibid.

rasanya juga aneh, masuk SD harus sudah lewat tes. Sejak dulu, tes masuk SD sudah ada, tetapi hanya sekedar dilihat apakah yang bersangkutan telah cukup umur. Tidak dapat dibayangkan ketika anak tidak lulus tes sekolah dasar akan disuruh kemana, sementara sebagai warga negara harus bersekolah.

Mestinya pelajaran di sekolah dasar dititikberatkan pada pengetahuan dasar membaca, menulis, dan berhitung hingga mereka benar-benar matang. Dengan cara tersebut, anak-anak akan benar-benar memiliki kemampuan tersebut dengan baik. Pengetahuan lain seperti sejarah, lingkungan, sopan santun atau tata krama dalam pergaulan sehari-hari dan lain-lain diberikan sebagai bagian dari pelajaran membaca dan menulis itu, dan akan lebih tepat lagi manakala bahan bacaan tersebut juga dikaitkan dengan pengetahuan kehidupan dirinya sehari-hari, bahkan juga adat istiadat yang seharusnya dijalankan di rumah dan lingkungan masing-masing. Pelajaran tentang dirinya sendiri, misalnya terkait dengan penciptaan hingga mereka mengenal Tuhannya. Para siswa dengan cara sederhana diajak untuk memahami dirinya dibanding dengan makhluk lainnya, tugas kehidupan dan cara memeliharanya, dan seterusnya.

Sejak awal pelajaran untuk mengenal diri siswa sendiri, alam sekitar dan selanjutnya mengembang sebagaimana bentuk lingkaran spiral, yaitu semakin lama semakin meluas dan mengembang. Semua pengetahuan yang diberikan itu selalu diawali atau berangkat dari dirinya sendiri. Hal itu atas pertimbangan bahwa bisa jadi orang yang suka menyimpang atau bahkan berbuat jahat, seperti

gemar berkonflik, tidak peduli pada orang lain, korupsi, tawuran, dan seterusnya adalah karena mereka tidak mengenal dirinya secara baik. Sekalipun telah lulus sekolah dasar dan bahkan hingga perguruan tinggi, pengetahuan tentang dirinya sendiri tidak diketahui. Mereka tidak mengerti siapa sebenarnya dirinya itu, asal muasal nya dari mana, harus melakukan apa di dunia ini serta akan kemana kelanjutan kehidupan ini, perilaku dan watak apa yang seharusnya dikembangkan, dan masih banyak lagi yang sering terlewatkan. Mereka tidak mengetahui dan tidak menyadari akan dirinya sendiri. Kurikulum mestinya berhasil menjadikan para siswa mengetahui tentang dirinya sendiri, alam, dan lingkungannya. Pengetahuan tersebut, insya Allah akan mengantar seseorang pada pengenalan terhadap Tuhan dan kemudian akan mencintai-Nya. Siapapun yang mencintai Tuhan, sesama manusia, dan makhluk lainnya akan berbuat baik dan mampu memimpin dirinya sendiri.¹⁰⁸

Akhir-akhir ini dunia pendidikan diramaikan oleh kebijakan baru, dalam hal ini kementerian pendidikan dan kebudayaan terkait perubahan kurikulum. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan agar menghasilkan generasi yang mampu menghadapi masa depan, pemerintah mengubah kurikulum. Perubahan itu dalam dunia pendidikan merupakan keniscayaan, artinya memang kurikulum itu harus ditinjau dan kemudian disesuaikan dengan tuntutan zamannya. Kehidupan ini selalu berubah. Tidak pernah ada sesuatu yang tetap. Justru yang tetap itu sebenarnya adalah perubahan itu sendiri. Bahkan perubahan itu pada akhir-akhir

¹⁰⁸ Ibid.

ini sedemikian cepat dan bahkan tidak pernah bisa diprediksi sebelumnya. Boleh-boleh saja setiap orang menghitung-hitung apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi hitungan itu tidak selalu tepat. Suatu institusi mengalami kemajuan yang luar biasa, tidak disangka ternyata mendadak jatuh. Begitu pula sebaliknya yang lain, tanpa diperhitungkan, ternyata bangkrut. Perubahan itu akhirnya menjadi hal biasa.

Perubahan cepat juga terjadi di dunia pendidikan. Pendidikan pada tahun 1960-an misalnya dijalankan secara sederhana. Anak-anak dilatih menulis dan membaca menggunakan batu tulis atau sabak. Buku tulis ketika itu sedemikian mahal harganya bagi rakyat, sehingga selain barangnya tidak tersedia, harganya juga tidak terjangkau. Batu tulis atau sabak adalah pilihan yang tepat. Alat tulis itu bisa digunakan oleh para siswa untuk mengerjakan tugas-tugas dari gurunya. Alat tulis sederhana, murah, dan sangat efektif. Sabak itu kemudian diganti dengan buku tulis. Tidak lama kemudian, alat itu segera disusul dengan yang lebih baru, yakni mesin ketik, foto copy, dan kemudian komputer. Komputer itu pun setiap tahun berubah, semakin lama semakin sempurna. Tentu masyarakat yang berada menyesuaikan dengan perkembangan tersebut. Akhir-akhir ini komputer sudah semakin canggih lagi, di antaranya berupa Ipad. Kita melihat, terutama di perkotaan, anak-anak sekolah membawa alat canggih tersebut. Maka bisa dibayangkan, hanya dalam waktu beberapa puluh tahun saja, peralatan

pendidikan sudah berganti beberapa kali. Tentu perubahan itu juga akan berpengaruh pada pendidikan.¹⁰⁹

Kemajuan teknologi tentu sangat berpengaruh pada proses pendidikan. Dalam hal mencari informasi misalnya, dulu hanya lewat membaca buku-buku yang jumlahnya sangat terbatas, mencari buku juga sangat sulit. Hal itu bertolak belakang keadaannya dengan sekarang. Informasi saat ini sudah membanjir. Siapapun sekarang ini dapat dengan mudah mengakses informasi lewat internet. Dulu ketika informasi belum sebanyak saat ini, para siswa disuruh oleh gurunya sehari-hari menghafal rumus-rumus dan bahkan juga menghafal beberapa bagian isi buku. Sekarang ini, para siswa sudah membawa kalkulator canggih, HP, bahkan juga Ipad yang pada setiap saat bisa digunakan mengakses informasi tentang apa saja dan dari mana saja.

Dalam keadaan perubahan cepat seperti itu, maka jika guru tetap bertahan menggunakan cara-cara lama seperti tatkala komputer belum ditemukan, maka pendidikan akan menyiksa para siswa itu sendiri. Ilmu yang diberikan juga tidak akan ada gunanya. Para siswa di luar sekolah, justru akan mendapatkan bahan pelajaran yang lebih relevan dengan kebutuhan zamannya. Dalam keadaan seperti itu, maka perubahan kurikulum adalah sebagai suatu keniscayaan atau keharusan. Bahkan dengan kemajuan pengetahuan dan teknologi seperti sekarang ini, perubahan itu seharusnya bukan hanya terkait kurikulum,

¹⁰⁹ Imam Suprayogo, Perubahan Kurikulum, (online), (<http://imamsuprayogo.com/artikel/perubahan-kurikulum>), (ditulis tanggal 23 Februari 2013), diakses 12 April 2017).

melainkan semua aspek yang ada hubungannya dengan pendidikan. Pengajaran yang hanya berupa kegiatan guru menerangkan isi buku di depan kelas secara rutin sudah ketinggalan zaman. Cara-cara mengajar seperti itu mestinya harus segera ditinggalkan. Guru dalam mengajar harus menyesuaikan dengan tingkat kemajuan anak-anak sekarang ini. Bahkan juga, cara mengevaluasi kegiatan pendidikan harus diubah. Memberikan soal-soal ujian berupa pilihan berganda sebagaimana yang dilakukan oleh para penguji selama ini harus segera ditinggalkan.¹¹⁰

Anak-anak sekarang sebetulnya tidak perlu dituntut untuk menginventarisasi dan menyimpan informasi sebanyak-banyaknya di kepalanya, melainkan yang diperlukan adalah kemampuan untuk memahami, menganalisis, mensintesis, dan berlatih memecahkan problem-problem secara terus menerus. Kegiatan seperti itu dimaksudkan agar para siswa memiliki kekayaan imajinasi, memiliki kemampuan melihat sesuatu dari berbagai perspektif, dan bahkan juga mau mencipta. Kemampuan siswa seperti ini tidak cukup jika hanya dinilai atau dievaluasi dengan soal-soal pilihan ganda. Manakala kebijakan pemerintah dalam pendidikan masih selalu terlambat, maka sama halnya dengan mengajak para siswa kembali kepada zaman dua puluh atau tiga puluh tahun yang lalu.

Atas dasar pandangan tersebut maka kurikulum bukan lagi sebagai sesuatu yang sebatas perlu, melainkan sudah menjadi keharusan. Perubahan cara berpikir, kebutuhan, dan cara hidup yang semakin modern seperti sekarang ini

¹¹⁰ Ibid.

menuntut pula cara mengajar dan bahkan juga memberikan bahan-bahan ajar secara sama kepada seluruh siswa di negeri yang luas seperti ini hanya akan menyengsarakan generasi mendatang. Para pengambil kebijakan di bidang pendidikan, seharusnya melihat secara nyata, apa yang sebenarnya berguna dari apa yang diperoleh para siswa setelah mereka lulus. Kita harus sedih, manakala lulusan SMA misalnya, hanya bisa memasuki lapangan pekerjaan rendah, semisal menjadi security atau cleaning service, tetapi lebih dari itu sebenarnya yang diperlukan adalah mengubah kebijakan mendasar tentang pendidikan secara menyeluruh untuk menyesuaikan dengan tuntutan zaman.¹¹¹ Untuk melahirkan lulusan madrasah yang berguna dalam masyarakat pada kehidupan sehari-harinya, perlu dibentuk kurikulum yang megacu pada pengembangan peserta didik dalam memahami, menganalisis, mensintesis, serta mengenali diri agar terhindar dari ketimpangan spiritual, intelektual, sosial dan keterampilan peserta didik. Kurikulum juga diharapkan mampu mengikuti perkembangan zaman.

Sejalan dengan perkembangan dunia yang semakin maju, masyarakat dihadapkan dengan berbagai pilihan menyangkut berbagai aspek dan dimensi kehidupan. Masyarakat pun, dengan tingkat rasionalitas yang memadai, sudah demikian cerdas untuk menentukan pilihan. Pilihan-pilihan mereka tidak lagi bersifat emosional dan mengandalkan primordialisme. Akan tetapi, pilihan-pilihan yang lebih rasional dan berwawasan ke depan. Fenomena seperti ini juga

¹¹¹ Ibid.

dengan sendirinya menyentuh bidang pendidikan. Misalnya, dalam memilih lembaga pendidikan untuk menyekolahkan anak-anak mereka pun sudah sangat rasional dan mempertimbangkan prospektif ke depan. Mereka yang berpeluang memilih akan menentukan pilihan kepada lembaga pendidikan yang dipandang ideal. Lembaga pendidikan yang dipandang ideal itu adalah lembaga pendidikan yang mampu mengembangkan potensi spiritual serta akhlak para siswa sehingga siswa mampu mengembangkan aspek intelektual (biasanya diukur dengan perolehan NEM) dan lembaga pendidikan yang mampu mengembangkan potensi sosial maupun keterampilan anak didiknya.

Lembaga pendidikan yang bertipe ideal itu biasanya diperebutkan orang sehingga biayanya pun menjadi mahal, mengikuti hukum pasar “supply and demand”. Namun di sisi lain, mahalnya biaya pada lembaga pendidikan yang dianggap ideal tersebut justru malah menjadikan sebagian orang tidak memiliki peluang untuk dapat mengaksesnya.¹¹²

Tuntutan masyarakat seperti itu direspon banyak pihak. Tidak terkecuali oleh lembaga pendidikan keagamaan, di antaranya lembaga pendidikan Islam, sehingga muncul istilah lembaga pendidikan integratif, sekolah (madrasah) terpadu, sekolah (madrasah) model, atau bentuk-bentuk sekolah (madrasah) unggulan lain yang penyebutannya menggambarkan sebagai lembaga pendidikan dengan predikat mengedepankan kualitas. Lembaga pendidikan yang

¹¹² Imam Suprayogo, *Quo Vadis Madrasah: Gagasan, Aksi, dan Solusi Pembangunan Madrasah Impian* (Yogyakarta: Hikayat Publishing, 2007), 55-56.

menamakan diri sebagai sekolah (madrasah) integratif, setidaknya integratif dalam kurikulum dan integratif dalam model pembelajaran yang dikembangkan, yakni dengan mengintegrasikan antara pengembangan kehidupan keagamaan dan pengembangan intelektual serta keterampilan. Dengan integritas tersebut, diharapkan para lulusan meraih kedewasaan kepribadian secara utuh, yaitu dewasa spiritual, dewasa intelektual, dewasa sosial, dan dewasa kecakapan hidupnya. Rumusan ini sesungguhnya bagus sekali, akan tetapi untuk mewujudkannya memerlukan energi lebih, niat yang kukuh, integritas dalam sikap dan perhatian terhadap dunia pendidikan, serta pengorbanan yang tinggi untuk mewujudkannya. Istilah lain untuk sekolah atau madrasah integratif itu adalah sekolah atau madrasah terpadu.¹¹³

Membicarakan lembaga pendidikan integratif salah satunya dengan mewujudkan integrasi antara pengembangan spiritual, pengembangan intelektual, pengembangan sosial dan pengembangan kecakapan lainnya merupakan fenomena yang sangat menarik. Jika yang dimaksudkan integrasi itu adalah pengembangan keterpaduan secara memadai antara nilai-nilai agama (Islam) dengan ilmu pengetahuan pada umumnya, maka hal yang perlu dipikirkan selanjutnya adalah bagaimana suasana pendidikan, kultur akademik, kurikulum, sarana dan prasarana, dan yang tidak kalah pentingnya adalah profil guru untuk mewujudkan konsep pendidikan integratif. Integritas tidak hanya bersifat nominal yang hanya mencakup persoalan-persoalan sepele dan artifisial,

¹¹³ Ibid., 56-57.

tetapi integritas dalam kualitas berbagai komponen sistem penyelenggaraan pendidikan, yang semuanya itu berujung pada terwujudnya kepribadian siswa yang integratif, yang sekaligus menunjukkan tingkat keunggulan tertentu dibandingkan dengan yang lain. Logikanya sederhana, yakni apabila lembaga pendidikan integratif seperti madrasah terpadu dipandang sebagai model yang lebih baik, maka dari sekolah ini semestinya lahir berbagai bentuk keunggulan (excellencies) terkait dengan berbagai komponen sistem pendidikannya.¹¹⁴

Lembaga pendidikan integratif bernuansa Islam perlu menjadikan al-Qur'an dan sunnah sebagai landasan penyelenggaraan pendidikan secara menyeluruh, baik pada tataran teologi, filosofis, teoretis-akademis, dan bahkan pada tataran praktisnya. Selama ini al-Qur'an dan sunnah hanya dijadikan sebagai dasar atau acuan (paradigma atau frame of reference) pelaksanaan pendidikan yang sangat terbatas, yaitu sebatas tataran ibadah ritual belaka. Informasi transendental menyangkut kehidupan luas seperti persoalan penciptaan manusia, dan makhluk sejenisnya, jagad raya yang mencakup bumi, matahari, bulan, bintang, langit, gunung, hujan, laut, air, dan tanah. Islam juga menawarkan konsep kehidupan yang menyelamatkan dan membahagiakan, baik di dunia maupun di akhirat. Jika pemikiran tersebut ditarik ke tataran operasional, maka yang perlu dikembangkan adalah menyangkut kurikulum, bahan ajar yang mengaitkan (mengintegrasikan) ajaran yang bersumber dari ayat-ayat qawliyyah (al-Qur'an dan hadis) dengan ayat-ayat kawniyyah (alam semesta) secara terpadu dan utuh.

¹¹⁴ Ibid., 58-59.

Misalnya, ayat al-Qur'an tentang penciptaan langit, bumi, bintang, dan tumbuh-tumbuhan, dan sebagainya akan dijadikan petunjuk awal dalam kajian kosmologi, astronomi, biologi, fisika, dan lain-lain. Dengan demikian, semua guru, dosen, atau pengajar di lembaga pendidikan Islam semestinya menjadi pembawa ajaran yang bersumber dari ayat-ayat qawliyyah dan ayat-ayat kawniyyah yang dipahami melalui proses observasi, eksperimen, dan penalaran logis sekaligus.¹¹⁵

Pendidikan Islam integratif seyogyanya juga tidak hanya tercermin dari bahan ajar yang disajikan di kelas, bahkan lebih dari itu menyangkut seluruh aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan itu sendiri. Aspek-aspek itu misalnya menyangkut hubungan antar dan interpersonal yang mencerminkan adanya nuansa keislaman, lingkungan yang menggambarkan kebersihan, kerapian serta keindahan, hak dan kewajiban diwarnai oleh suasana hati yang serba ikhlas, syukur, sabar, tawakal, dan istiqamah.¹¹⁶

C. Pemberdayaan SDM di Madrasah Perspektif Imam Suprayogo

1. Pemberdayaan Kepala Madrasah

Di setiap organisasi, posisi dan peran pimpinan selalu sangat sentral. Maju dan mundurnya organisasi sangat tergantung pada sejauh mana pimpinan mampu berimajinasi memajukan organisasinya. Demikian pula

¹¹⁵ Ibid., 60.

¹¹⁶ Ibid.

dalam konteks madrasah sebagai organisasi, maka posisi kepala madrasah juga sangat strategis dalam memajukan lembaga yang dipimpinnya. Akan tetapi seringkali terlihat kepala madrasah kurang berdaya karena berbagai sebab dan kendala, baik yang bersifat internal pribadi yang bersangkutan maupun eksternal. Yang bersifat internal misalnya: (1) kurangnya keberanian untuk mengambil prakarsa dalam melakukan inovasi yang bersifat strategis, (2) kurangnya pemahaman atas peran-peran yang seharusnya dimainkan, (3) kurangnya keberanian menanggung risiko dan seterusnya. Sedangkan yang bersifat eksternal misalnya: (1) kekurangan informasi yang seharusnya dikuasai, (2) terlalu banyak peraturan sehingga ruang gerak terasa terbatas, (3) suasana birokratis yang mengurangi bahkan membatasi ruang gerak dalam upaya pengembangan, (4) hubungan primordial yang berlebihan dan seterusnya.¹¹⁷

Dalam banyak kasus, kepala madrasah yang tergolong inovatif, yang mampu melakukan perubahan-perubahan untuk memajukan madrasah memiliki keberanian untuk keluar dari kendala-kendala tersebut. Akan tetapi tampaknya orang-orang yang memiliki keberanian seperti itu jumlahnya sangat terbatas. Kebanyakan kepala madrasah, entah karena tidak berani menanggung risiko yang ditimbulkan oleh langkah-langkah yang diambil atau karena kurang tepat dalam memahami peran-peran yang seharusnya

¹¹⁷ Imam Suprayogo, Pendidikan Berparadigma *Al-Qur'an: Pergulatan Membangun Tradisi dan Aksi Pendidikan Islam* (Malang: UIN Malang Press, 2004), 211-212.

dimainkan sebagai kepala madrasah, lebih memilih sekadar menjalankan garis-garis besar yang dipandang menjadi kewajiban atau wewenangnya. Akibatnya, madrasah yang dipimpin dengan gaya kepemimpinan seperti itu tidak banyak mengalami perubahan dan biasanya berjalan sekadar menjalankan pekerjaan rutinitas, padahal sebagaimana teori organisasi modern berkuat dalam rutinitas sejatinya tanpa disadari merupakan gejala kematian organisasi secara perlahan-lahan.

Madrasah sebagai salah satu bagian sistem pendidikan nasional tentu memerlukan perhatian dan pengelolaan secara serius. Karena itu, kepemimpinan madrasah ke depan dengan perubahan masyarakat yang semakin cepat dan terbuka tentu menuntut kemampuan yang lebih kreatif, inovatif, dan dinamis. Kepala madrasah yang sekadar bergaya menunggu dan terlalu berpegang pada aturan-aturan birokratis dan berpikir secara struktural dan tidak berani melakukan inovasi untuk menyesuaikan tuntutan masyarakatnya akan ditinggalkan oleh peminatnya. Pada masyarakat yang semakin berkembang demikian cepat di dalamnya terjadi kompetisi secara terbuka selalu dituntut kualitas pelayanan yang berbeda dengan masyarakat yang sebelumnya. Perlu disadari bahwa ciri khas masyarakat maju adalah pemegang kendali bukan lagi produsen, melainkan konsumen, (the stakeholders are not the producers, but the consumers). Pilihan-pilihan sudah semakin banyak dan beragam, mereka menuntut kualitas dan

pelayanan prima. Tuntutan semacam ini hanya dapat dipenuhi oleh kepala madrasah yang berdaya (empowered), kreatif, memiliki kemampuan leadership dan manajerial yang tangguh, tidak mengenal lelah dan tak kenal putus asa.¹¹⁸

Persoalannya adalah bagaimana memberdayakan kepala madrasah agar memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk memajukan madrasah sebagaimana yang digambarkan tersebut. Seorang pemimpin dikatakan berdaya manakala yang bersangkutan menyangdang kekuatan untuk menggerakkan orang lain. Pemimpin, pada sebagian perannya menjadi sumber penggerak seluruh kekuatan mesin. Karena itu, yang harus dilakukan seorang pemimpin adalah memperluas cakrawala pandang, memperluas batas, melakukan dialog batin secara terus menerus, membangun dialog batin yang positif, mengupayakan dukungan, dan berusaha untuk mengetahui keterbatasan diri secara tepat. Proses batin seperti ini jika dilakukan secara terus menerus akan melahirkan kekuatan sebagaimana accu untuk menggerakkan mesin.

Sebagai seorang pemimpin, tugas-tugas kepala madrasah sebagai seorang pemimpin lembaga masa depan tidak cukup hanya sekadar melakukan peran-peran yang berkenaan dengan perencanaan, mengkomunikasikan, mengkoordinasi, memotivasi, mengendalikan, mengarahkan, dan memimpin. Lebih dari itu, wilayah tugas pemimpin masa

¹¹⁸ Suprayogo, Pendidikan Berparadigma *Al-Qur'an*. 212-213.

depan, termasuk pemimpin madrasah, harus disempurnakan dengan kegiatan-kegiatan yang membuat orang yang dipimpin mampu, memperlancar, tempat berkonsultasi, membangun kerjasama, membimbing, membagi cinta kasih, mensejahterakan dan mendukung. Dengan demikian, terlihat bahwa hubungan pemimpin dan yang dipimpin tidak sebagaimana hubungan buruh dan majikannya, patron dan kliennya, melainkan terjalin hubungan kolegial di antara orang-orang yang masing-masing memiliki tanggung jawab atau integritas pengabdian yang tinggi.

Memperhatikan tantangan dan tanggung jawab kepala madrasah ke depan, di tambah lagi dengan tuntutan yang semakin kompleks untuk menyesuaikan dengan tuntutan zamannya, maka ada beberapa hal yang perlu dikembangkan untuk meningkatkan kinerja kepala madrasah, antara lain: (1) memberikan space yang luas agar dimungkinkan mereka melakukan kreativitas dan eksperimen pengembangan madrasah dalam berbagai aspeknya, misalnya pengembangan ketenagaan, kurikulum, manajemen dan kepemimpinannya pada madrasah yang dipimpinnya sehingga tersedia ruang berkreaitivitas secara memadai, (2) memberikan kepercayaan yang lebih luas sehingga muncul sikap saling percaya (mutual trust), (3) memperkaya sumber-sumber informasi yang saling mencukupi, sehingga suasana lembaga tidak kering (resourceful), (4) membantu menghilangkan rintangan atau halangan sehingga tidak banyak kendala

(constraints), (5) memfasilitasi sehingga lembaga fasilitatif dan, (6) mengevaluasi secara menyeluruh, jujur dan adil, baik pada tataran proses maupun produknya sehingga ada akuntabilitas (accountability).¹¹⁹

Pikiran-pikiran tersebut di atas sengaja dikemukakan dalam perbincangan pemberdayaan kepala madrasah untuk meningkatkan kinerja (performance), setidaknya dengan maksud agar menjadi bagian dari tantangan atau persoalan yang perlu segera memperoleh tanggapan untuk meningkatkan kinerja itu sendiri, dan sekaligus kualitas madrasah ke depan. Kemajuan lembaga pendidikan madrasah yang selalu diimpikan, tidak mungkin diraih sekadar melalui kerja monoton dan rutin, melainkan diciptakan upaya-upaya yang lebih kreatif dan inovatif oleh semua pihak dalam menuju kesempurnaan yang sejati. Perbincangan tentang diskursus pemberdayaan madrasah seperti itu menjadi sangat penting.¹²⁰ Jika tidak ada pembahasan mengenai hal tersebut, maka tidak akan muncul sosok kepala madrasah yang dapat memimpin dan mengelola madrasah dengan baik yang mengakibatkan kemajuan madrasah terhambat.

2. Pemberdayaan Guru di Madrasah

Kekuatan madrasah, selain berasal dari masyarakat simpatisannya, juga berasal dari lembaga atau perorangan. Orang mendirikan madrasah jarang sekali, bahkan tidak ditemukan, dimotivasi oleh keinginan memperoleh

¹¹⁹ Ibid., 213-214.

¹²⁰ Ibid., 216.

keuntungan ekonomis dan bersifat transaksional. Bahkan guru yang mengajar pun tidak jarang semata-mata dimotivasi oleh panggilan keimanan, yang berarti mengajar merupakan panggilan dan kewajiban dari agamanya. Semangat seperti itu menjadikan para guru tetap tegar sekalipun tidak memperoleh imbalan yang berarti. Sikap seperti itu sangat berbeda bilamana dibandingkan dengan profesi lainnya yang segala sesuatu selalu diukur dengan besarnya imbalan yang akan diterima.

Para guru madrasah menjadikan semangat berjuang menyebarkan ajaran Islam sebagai pendorong pengabdianya. Oleh karena itu, banyak kita saksikan, sekalipun guru madrasah hanya mendapat imbalan rendah, namun selalu bersemangat dan bahkan masih rela jika harus berkorban. Misalnya, jika pemerintah memberlakukan peraturan atau konsep tentang pembaharuan pendidikan, yang hal itu harus diketahui dan diikuti para guru, maka pejuang-pejuang madrasah tersebut tidak keberatan membayar secara patungan mengikuti atau menyelenggarakan penataran yang terkait dengan pembaharuan tersebut.¹²¹ Semangat berkorban seperti itu jangan berharap terjadi di kalangan guru-guru yang berstatus pegawai negeri. Mereka baru mau menyelenggarakan atau mengikuti kegiatan itu jika dana lewat proyek sudah turun. Semangat berjuang dan berkorban di kalangan madrasah seperti itu yang menjadikan madrasah tetap berlangsung hidup, sekalipun dihempas-hempaskan oleh perubahan sosial yang cepat dan dahsyat.

¹²¹ Suprayogo, Quo Vadis Madrasah, 10-11.

Konsep madrasah bagi sebagian masyarakat sesungguhnya cukup ideal. Lembaga pendidikan ini dipandang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama masyarakat Islam. Lembaga pendidikan ini secara konseptual ingin mengembangkan ranah kehidupan yang lebih sempurna, yaitu aspek intelektual, spiritual, sosial, dan keterampilannya sekaligus. Ranah intelektual dikembangkan lewat pelajaran umum, seperti Matematika, IPA, dan lain sebagainya. Aspek spiritual dan sosial dikembangkan melalui pendidikan agama yang bersumberkan kitab suci dan hadis nabi. Keterampilan ditempuh melalui pelatihan-pelatihan di sekolah maupun di lingkungan keluarga lewat penugasan-penugasan. Konsep ini ternyata mulai memperoleh momentumnya setelah diakui dan digalakkan tentang konsep kedewasaan yang lebih luas, seperti kedewasaan spiritual dan emosional, serta kedewasaan sosial.

Terkait dengan lingkup mata pelajaran madrasah yang cukup luas dibanding sekolah umum seringkali melahirkan kekhawatiran dan bahkan pandangan negatif karena dianggap terlalu memberatkan dan membebani para siswa. Kekhawatiran itu sesungguhnya tidak perlu terjadi jika mereka mau melihat pada kenyataan bahwa tidak sedikit siswa madrasah yang jauh lebih unggul bilamana dibandingkan dengan prestasi siswa sekolah umum. Jika konsep madrasah ini diterima secara penuh sebagai satu bagian pendidikan nasional, maka yang perlu dibenarkan adalah bagaimana agar

lembaga pendidikan ini tidak diposisikan secara marginal dan segera diperlakukan secara adil. Pemerintah jika bersikap mengabaikan madrasah, maka sama artinya dengan mengabaikan sebagian anak-anak bangsa yang sesungguhnya secara material telah pula berpartisipasi aktif, setidaknya dengan kepatuhan membayar pajak dalam kehidupan bangsa. Karena itu, tidak adil jika kebutuhan madrasah, apalagi madrasah yang berada pada level sekolah dasar (ibtidaiyah dan tsanawiyah), tidak memperoleh bantuan untuk membiayai kelangsungan hidupnya. Semestinya, dengan peraturan dan kebijakan tertentu, madrasah (swasta atau negeri) diberi subsidi setidaknya untuk mempertahankan kehidupannya sehingga dengan pemberlakuan kebijakan itu tidak terdengar lagi ada guru madrasah yang hanya bergaji atau berimbalan yang besarnya lebih kecil dari upah buruh atau pembantu rumah tangga pada umumnya di Indonesia.¹²² Situasi yang memprihatinkan bagi guru di madrasah perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah agar kesejahteraan hidup guru di madrasah terpenuhi.

Sudah sejak lama perbincangan tentang pengadaan pendidikan guru dilakukan, tetapi tampaknya belum ada langkah-langkah serius untuk menindaklanjuti. Ada sementara pendapat yang mengatakan bahwa pendidikan guru harus dirancang dan diselenggarakan secara khusus agar dapat melahirkan guru yang profesional. Lembaga pendidikan guru yang

¹²² Ibid., 11-12.

dimaksud itu tidak sekedar sebagaimana yang diselenggarakan oleh Fakultas (Jurusan) Tarbiyah di lingkungan UIN/IAIN/STAIN. Pendidikan guru seharusnya mampu melahirkan lulusan yang memiliki ilmu pengetahuan yang memadai, dan bahkan lebih memiliki karakter guru, terampil mengajar, serta syarat-syarat lain yang dibutuhkan oleh seorang yang berprofesi sebagai guru tersebut. Untuk mencapai cita-cita ini digambarkan bahwa lembaga pendidikan guru harus diselenggarakan secara khusus, misalnya dengan cara diasramakan, diperkuat kemampuan bahasa asing (Arab dan Inggris), diberikan berbagai keterampilan yang terkait dengan keguruan, serta ditanamkan watak atau karakter keguruan.¹²³

Banyak keluhan bahwa lulusan Fakultas Tarbiyah UIN/IAIN/STAIN memiliki kelemahan pada bidang yang seharusnya tidak sepatutnya dialami, yaitu: (1) minimnya kemampuan berbahasa Arab yang berdampak pada kelemahan berikutnya, yaitu (2) cakrawala pengetahuan agamanya dinilai di bawah standar. (3) mereka tidak mampu menjalani peran-peran sebagai guru agama di masyarakat, misalnya melakukan peran kepemimpinan upacara keagamaan yang seharusnya dikuasai dengan baik oleh seorang guru agama. Persoalan lainnya adalah bahwa ternyata profesi guru agama belum memperoleh tempat yang layak, terutama jika dilihat dari penghargaannya (gaji) yang diterima, kecuali mereka yang berhasil diangkat sebagai pegawai negeri. Selama ini belum ada yang menunjukkan berapa jumlah lulusan

¹²³ Suprayogo, Pendidikan Berparadigma Al-*Qur'an*, 81.

Fakultas Tarbiyah yang menganggur, tetapi dimana-mana dapat dengan mudah ditemukan lulusan yang belum memperoleh lapangan pekerjaan.¹²⁴

Terdapat gejala paradoksal yang melanda dunia pendidikan. Satu sisi sudah semakin dirasakan merosotnya kualitas pendidikan, sementara di pihak lain semakin transparan adanya penyelenggaraan pendidikan yang sulit dipertanggungjawabkan kualitasnya. Di tingkat perguruan tinggi, misalnya penyelenggaraan program-program pendidikan pendek (short program), extension, kelas executive (executive class), kelas akhir pekan (weekend class), kelas jauh (distant class), dan sebagainya. Sekalipun penyelenggaraannya telah dilarang oleh pemerintah yang berwenang, namun justru semakin bertambah jumlahnya. Orang sudah tidak lagi sadar betapa besar risiko penyelenggaraan yang tidak bermutu tersebut pada jangka panjang kehidupan bangsa ini. Semestinya lembaga pendidikan tinggi di lingkungan Departemen Agama tidak boleh ikut-ikutan melakukan penyelenggaraan pendidikan yang kurang bermutu. Tetapi pada kenyataannya tidak sedikit Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) yang tidak mampu mencegah nafsu kapitalis dan materialisnya untuk tidak menyelenggarakan program pendidikan seperti itu.

Islam mengajarkan konsep kesalihan, atau istilah lebih lengkapnya amal shalih, kiranya kesalihan harus mengejawantah pada dunia pendidikan Islam. Penyebutan kata “Islam” dalam dunia pendidikan tidak hanya

¹²⁴ Ibid., 82.

dimaknai sebatas identitas atau ciri, akan tetapi seharusnya menjadi sifat, yaitu kesalihan. Kesalihan ini dapat diartikan dengan makna kualitas sebagai buah dari kerja yang profesional, sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Umat Islam dalam membangun lembaga pendidikan atau mungkin juga yang lain barulah sebatas mengedepankan “yang penting ada dulu”. Pemikiran seperti ini rasanya sudah tidak relevan tatkala jumlah lembaga pendidikan sudah sedemikian banyak dan orang mulai mengeluhkan kualitas yang rendah. Dalam pemikiran Hegelian masyarakat seperti ini baru pada tahap mementingkan body dan seharusnya segera diubah menjadi lebih mengutamakan mind. Sekalipun pendidikan diselenggarakan oleh kaum Muslimin dan bernamakan Islam, tetapi jika tidak diselenggarakan dengan prinsip-prinsip yang mengarah pada kesalihan atau kualitas unggul (*excellencies*), maka kurang tepat apabila disebut sebagai pendidikan Islam yang sesungguhnya.¹²⁵

Dari segi kuantitas jumlah perguruan tinggi Islam, baik yang berstatus negeri maupun swasta sudah cukup banyak. Persoalan yang menimpa perguruan tinggi Islam bukan pada tataran kuantitas, melainkan pada kualitas. Sebagian orang berdalih bahwa rendahnya kualitas disebabkan oleh pendanaan yang tersedia terbatas. Rendahnya kualitas bukan semata-mata karena keterbatasan melainkan di samping itu terdapat faktor lain, yakni belum adanya kesadaran betapa kualitas harus diperjuangkan. Mentalitas

¹²⁵ Ibid., 82-83.

“seadanya”, “asal jadi” dan “asal dapat”, tampaknya masih mewarnai alam pikiran sebagian besar umat Islam. Termasuk dalam penyelenggaraan perguruan tinggi Islam. Mentalitas yang mentolerir kualitas rendah seperti itu dapat dilihat dengan jelas pada wajah sebagian perguruan tinggi Islam yang menyelenggarakan kuliah akhir pekan, kelas jarak jauh, dan semacamnya. Dalam budaya seperti ini, maka ide membangun pendidikan berkualitas dan juga melakukan sinkronisasi pendidikan, yang salah satu maknanya adalah meningkatkan kualitas, menjadi amat sulit dibayangkan akan benar-benar terjadi dalam skala luas dan panjang.¹²⁶

Terkait dengan keinginan menjadikan Fakultas (Jurusan) Tarbiyah sebagai LPTK seharusnya ditempuh dengan cara melakukan upaya-upaya strategis melakukan perubahan secara menyeluruh, baik pada tataran ideal, struktural, maupun nasional yang semua itu diarahkan pada kebutuhan untuk memenuhi tenaga guru yang dibutuhkan. Penyelenggaran Jurusan (Fakultas) Tarbiyah yang khusus untuk penyediaan guru di luar kelembagaan yang ada hanya akan menjadikan pemborosan, inefisiensi, dan bersifat parsial. Oleh Karena itu, sebagai upaya strategis menjadikan Fakultas atau Tarbiyah sebagai LPTK adalah meningkatkan kualitas pendidikannya dari berbagai aspek secara sungguh-sungguh. Secara ideal harus dipahami bahwa pendirian Fakultas (Jurusan) Tarbiyah pada masing-masing UIN/IAIN/STAIN sejak awal dimaksudkan untuk melahirkan guru

¹²⁶ Ibid., 83-84.

agama yang berkualitas tinggi. Sebagai guru agama, mereka harus mampu melakukan peran-peran sebagai guru agama di tengah-tengah masyarakat yang semakin maju dan selalu berubah ini. Guru agama misalnya, harus mampu memahami ajaran Islam dari sumber aslinya, memiliki keterampilan dan kepemimpinan pendidikan, integritas sebagai guru, berakhlak mulia, dan lain-lain.

Secara struktural, menyesuaikan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, Fakultas (Jurusan) Tarbiyah atas dasar kekuatan riil yang ada, diarahkan untuk mengembangkan program studi yang dibutuhkan oleh lembaga pendidikan jenjang di bawahnya. Jika madrasah selama ini sudah menjadi sekolah umum yang berciri khas agama, hal itu menjadikan kebutuhan guru agama semakin kecil dan sebaliknya kebutuhan guru bidang studi umum bertambah banyak, maka seharusnya secara selektif kualitatif Fakultas (Jurusan) Tarbiyah diproyeksikan membuka program studi umum yang dibutuhkan oleh madrasah itu sebab jika tidak dilakukan perubahan, maka akan melahirkan pemborosan dan pengangguran lulusan yang seharusnya dapat dicegah. Hal yang perlu dimaklumi bahwa ternyata pengangkatan guru bidang studi umum lulusan perguruan tinggi umum tidak semudah yang dibayangkan.¹²⁷

Pengangkatan guru yang berlatarbelakang pendidikan umum memerlukan seleksi yang tidak mudah sebab seorang guru madrasah tidak

¹²⁷ Ibid., 84.

mencukupi hanya menyangang penguasaan bidang studinya, melainkan juga harus memiliki kultur sosial keagamaan sebagaimana yang dikembangkan oleh madrasah. Akan tetapi, sekalipun Fakultas (Jurusan) Tarbiyah membuka program studi umum tidak boleh meninggalkan jati dirinya sebagai perguruan tinggi Islam yang mendudukan sumber ajaran Islam (al-Qur'an dan al-hadis) dan pengetahuan Islam lainnya pada posisi sentral, yang karena itulah harus dikaji secara mendalam. Cara melihat Fakultas (Jurusan) Tarbiyah seperti ini tidak akan memberi peluang kepada siapa saja untuk mentolerir lulusannya tidak bisa membaca al-Qur'an.¹²⁸ Secara operasional, harus dipahami bahwa lembaga pendidikan berkualitas selalu didukung oleh ketenagaan, sarana dan prasarana serta lingkungan belajar yang memadai.

Peningkatan kualitas pendidikan sesungguhnya selalu dimulai dari peningkatan pribadi orang yang terlibat dalam proses pendidikan itu. Orang-orang yang terlibat itu mulai dari dosen, pimpinan, karyawan, sampai dengan para mahasiswanya. Oleh karena itu, cara strategis meningkatkan kualitas pendidikan di suatu lembaga pendidikan harus ditempuh melalui peningkatan kualitas semua orang yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan itu. Tetapi, jika dicari posisi strategis agen perubahan, tidak lain adalah berada pada posisi pimpinannya. Berdasarkan pengamatan sementara bahwa lembaga pendidikan Islam maju ketika pimpinannya memiliki visi

¹²⁸ Ibid., 25.

dan misi jelas ke depan, inovatif, progresif, dan memiliki integritas tinggi terhadap lembaga pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya. Atas dasar pandangan ini, jika ingin melakukan perubahan terhadap lembaga pendidikan, termasuk pendidikan tinggi, maka persoalan penting yang harus dipecahkan terlebih dahulu adalah bagaimana memperoleh pimpinan yang memiliki kemampuan leadership dan manajerial yang mampu melakukan perubahan bersama.¹²⁹

Pandangan modern, atau setidaknya yang diyakini banyak orang, adalah bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas harus dimulai dengan adanya sumber dana, perencanaan, tenaga yang berkualitas, dan manajemen serta kepemimpinan yang kuat. Akan tetapi, untuk kasus di Indonesia, semua variabel yang dibutuhkan itu tidak mudah disediakan secara bersamaan dalam waktu yang singkat. Bahkan celakanya, jika ada upaya ke arah peningkatan kualitas pada umumnya dilakukan secara sporadis dan tidak dilakukan secara kontinyu. Pada umumnya niat baik itu operasionalisasinya ditempuh dengan pendekatan proyek. Padahal pendekatan proyek umumnya dioperasionalkan secara kaku dan formalistis. Maka, hasilnya sangat sedikit lembaga pendidikan berhasil dikembangkan jika menggunakan proyek.

Peningkatan kualitas pendidikan tidak harus menunggu hingga semua fasilitas pendidikan berhasil dilengkapi. Peningkatan kualitas pendidikan

¹²⁹ Ibid., 86.

dapat dilakukan secara bertahap, dimulai dari perbaikan psikologis warga kampus berupa kesadaran, semangat atau motivasi untuk maju sampai dengan perbaikan struktur dan fasilitas fisik. Oleh karenanya, jika hal tersebut dilakukan di luar proyek maka peningkatan kualitas pendidikan dimulai dari upaya menemukan sumber inspirasi dan kekuatan penggerak perubahan. Sumber inspirasi dan kekuatan penggerak itu berupa kekayaan informasi, visi dan misi, core of value dan core of belief. Kekayaan informasi dapat diperoleh lewat interaksi dan komunikasi yang semakin luas, hingga melahirkan kesadaran bersama untuk berubah. Kesadaran tersebut melahirkan kebangkitan untuk memperjuangkan ideal-ideal yang lebih besar dan agung.¹³⁰ Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa peningkatan kualitas pendidikan sesungguhnya dimulai dari peningkatan pribadi orang yang terlibat dalam proses pendidikan itu sendiri, termasuk di dalamnya adalah guru di madrasah. Apabila guru di madrasah merupakan lulusan Fakultas (Jurusan) Tarbiyah yang sesuai dengan kebutuhan lembaga pendidikan di madrasah, maka guru di madrasah tidak hanya menjadi figur yang berkuat di lingkungan madrasah, namun juga dapat melakukan peran-perannya di tengah-tengah masyarakat.

¹³⁰ Ibid., 87.

BAB III

ANALISIS PEMIKIRAN IMAM SUPRAYOGO MENGENAI PENGEMBANGAN MADRASAH DI INDONESIA

Pada bab ini, kajian yang dibahas yakni mengenai analisis penulis terkait dengan pengembangan madrasah di Indonesia menurut Imam Suprayogo yang dijadikan perbandingan dengan pemikiran beberapa tokoh lain secara umum. Analisis yang disajikan ini merupakan bagian dari hasil persamaan dan perbedaan penulisan yang dikaji karena antara satu tokoh dengan tokoh yang lainnya memiliki pemikiran yang berbeda-beda dan memiliki ciri khas dalam merumuskan konsep pengembangan pendidikan, khususnya dalam hal ini gagasan mengenai pengembangan madrasah yang ada di Indonesia. Melalui ulasan dari analisis, akan lebih jelas pemikiran Imam Suprayogo dalam merumuskan konsep untuk mengembangkan madrasah di Indonesia.

A. Peran Masyarakat dalam Peningkatan Mutu Madrasah di Indonesia

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa sejatinya masyarakat memiliki andil yang besar terhadap keberadaan, perkembangan, serta maju mundurnya suatu lembaga pendidikan, termasuk diantaranya ialah eksistensi madrasah. Imam Suprayogo menegaskan bahwa sebagian masyarakat percaya akan kemampuan madrasah menjadikan peserta didiknya sebagai generasi yang cerdas secara

intelektual, yakni berhasil memperoleh ilmu pengetahuan umum layaknya di sekolah-sekolah umum lainnya, serta mampu mengamalkan agamanya dengan baik dan khusyuk. Oleh karena itu, meskipun madrasah mengalami pasang surut dan bahkan dapat dikatakan kurang bermutu, tetapi masih ada segolongan masyarakat yang menghendaki agar madrasah tetap didirikan. Hal ini sesuai dengan acuan teori sosiologi bahwa sesuatu akan tetap bertahan sepanjang sesuatu itu memang dibutuhkan oleh masyarakat.¹³¹

Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah (madrasah).¹³² Mengingat masyarakat mempunyai peranan penting dalam eksistensi madrasah, maka masyarakat dijadikan sebagai salah satu stakeholders yang menopang peningkatan mutu dan kualitas madrasah. Sebagai bentuk pelibatan masyarakat yang signifikan, maka disusunlah organisasi POMG dan BP3. Keanggotaan POMG dan BP3 terdiri dari wali murid yang mana salah satu tujuannya untuk mengumpulkan dana apabila diperlukan oleh lembaga pendidikan (madrasah).

Sejalan dengan tuntutan modernitas sesuai dengan tuntutan zaman, orientasi ideologis yang mewarnai kehidupan madrasah harus diubah ke arah orientasi ilmu pengetahuan dengan ciri-cirinya antara lain rasional, objektif,

¹³¹ Suprayogo, Quo Vadis Madrasah, 9-10.

¹³² Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 56, ayat 1.

dan terbuka. Apa yang disebut dengan standarisasi madrasah sesungguhnya merupakan bentuk nyata pengelolaan madrasah yang tidak lagi didasarkan atas orientasi ideologis itu melainkan lebih mengarah pada orientasi yang didasarkan atas prinsip-prinsip ilmu pengetahuan. Masyarakat modern pada hakikatnya adalah masyarakat yang menempatkan ilmu pengetahuan sebagai landasan berpikir, bersikap dan berbuat, dan hal itu mestinya juga terlihat dalam pengelolaan madrasah.¹³³

Jika cara berpikir ini yang dijadikan acuan, maka sesungguhnya melakukan standarisasi madrasah dan pendidikan agama tidaklah mudah. Madrasah yang ingin maju dan tetap relevan dengan tuntutan masa depan, mau tidak mau harus melakukan perubahan secara bertahap dan mendasar. Jika masyarakat sudah memasuki budaya yang lebih rasional dan objektif, masyarakat ilmu, dalam hal memilih jenis lembaga pendidikan akan lebih selektif, yakni yang menjanjikan masa depan. Konsep pendidikan madrasah menurut Imam Suprayogo sangat ideal, yaitu mengembangkan seluruh ranah yang seharusnya dikembangkan untuk melahirkan manusia yang lebih beradab dengan menggunakan agama sebagai “code of conduct”. Madrasah jika dilihat dari misi serta orientasinya merupakan institusi yang mengembangkan manusia secara lebih utuh, yaitu meliputi aspek-aspek spiritual, akhlak, intelektual, dan keterampilan secara terpadu. Masyarakat

¹³³ Suprayogo, Pendidikan Berparadigma *Al-Qur'an*, 234.

modern pun saat ini mengalami ketimpangan yang terjadi pada hampir semua segi kehidupan sehingga mulai menyadari betapa pentingnya pengembangan aspek manusia secara lebih utuh. Berbeda dengan konsep-konsep konvensional mengenai ukuran standar kualitas lulusan madrasah yang sering diukur dengan dimilikinya kemampuan intelektual dan keterampilan-keterampilan tertentu, maka menurut Imam Suprayogo membangun manusia utuh merupakan konsep standarisasi.¹³⁴ Memberdayakan semua komponen masyarakat berarti pendidikan diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat dalam suasana kemitraan dan kerja sama yang saling melengkapi dan memperkuat.¹³⁵

Jika dilihat dari sepanjang sejarah yang terjadi, sangat jelas bahwa masyarakat tidak hanya sekedar ikut serta, namun lebih dari itu, masyarakat mengambil posisi terdepan dalam pendirian, pengembangan, dan pemberdayaan pendidikan keagamaan di madrasah. Dalam perspektif Azyumardi Azra, peningkatan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan dapat diuraikan menjadi tiga bagian, yakni: (1) peningkatan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan manajemen pendidikan dari segi keuangan maupun organisasi pendidikan, (2) peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan pendidikan Islam yang berkualitas dan unggul sehingga

¹³⁴ Ibid., 234-235.

¹³⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 4, ayat 6.

menghasilkan anak didik yang berparadigma keilmuan komprehensif, yakni pengetahuan umum dan agama, plus iman dan takwa (imtak), serta (3) peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber belajar yang terdapat dalam masyarakat sehingga sistem pendidikan Islam menjadi bagian yang integral dari masyarakat Muslim secara keseluruhan yang membuat anak didik keluaran lembaga pendidikan Islam lebih berkualitas serta lebih berguna bagi masyarakatnya.¹³⁶

Dari uraian berbagai pendapat di atas dapat ditarik benang merah bahwasanya lembaga pendidikan apapun, baik sekolah maupun madrasah tidak lepas dari peranan masyarakat karena masyarakatlah yang mendominasi ada atau tidaknya suatu lembaga pendidikan. Masyarakat pula yang menjadi salah satu penentu maju mundurnya sebuah lembaga. Tanpa dukungan dari masyarakat, sekolah maupun madrasah tidak dapat mempertahankan keberadaannya, dapat disimpulkan bahwa suatu lembaga pendidikan merupakan salah satu konsep dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab 2.

B. Pengembangan Kurikulum Madrasah di Indonesia

Dalam merumuskan pengembangan madrasah di Indonesia, para pemikir pendidikan memberikan gagasan yang berbeda pada masing-masing konsep

¹³⁶ Azyumardi Azra, Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), 182.

yang diajukan. Namun inti dari berbagai ide tersebut tidak terlepas dari adanya keinginan untuk memajukan mutu pendidikan di madrasah, agar madrasah tetap hidup dan berkembang serta dapat mengikuti perkembangan zaman yang diiringi oleh arus globalisasi. Salah satu konsep yang marak diperbincangkan di kalangan tokoh pemikir pendidikan yakni tentang kurikulum, dalam pembahasan ini adalah kurikulum madrasah. Secara umum, kurikulum dapat ditilik melalui sejarah perkembangannya, pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa hampir pada setiap pergantian presiden, kebijakan mengenai kurikulum berubah. Hal tersebut juga berdampak pada kondisi pendidikan di madrasah.

Pada tiap pergantian Menteri Agama, kebijakan-kebijakan konsep alternatif pengembangan madrasah selalu berubah-ubah. Beberapa contoh diantaranya adalah pada masa periode Mukti Ali yang memberikan kebijakan SKB 3 Menteri. Isinya tentang penyetaraan madrasah dan non madrasah dengan cara melalui porsi kurikulum 70% umum dan 30% agama. Setelah dirasa kurang berhasil kemudian pada masa periode Munawar Sadzali menawarkan konsep MAPK untuk menjawab masalah langkanya ulama yang menguasai kitab berbahasa Arab serta ilmu-ilmu tentang Islam. Karena konsep tersebut kurang dianggap sukses, maka Menteri Agama Tirmidzi Taher memberikan kebijakan dengan jargonnya yang terkenal, yakni “madrasah sebagai sekolah umum yang berciri khas agama Islam”, hingga saat ini jargon tersebut masih sering menjadi perbincangan yang hangat oleh beberapa tokoh pendidikan di

Indonesia. Oleh karenanya, kebijakan ini ditindaklanjuti oleh Menteri Agama berikutnya, seperti Malik Fajar yang memantapkan eksistensi madrasah untuk memenuhi tiga kriteria minimal dalam peningkatan kualitas madrasah, yaitu menjadikan madrasah sebagai wahana untuk membina ruh atau praktik hidup keislaman, memperkuat keberadaan madrasah sehingga sederajat dengan sistem sekolah, dan menjadikan madrasah mampu merespon tuntutan masa depan guna mengantisipasi perkembangan iptek dan globalisasi. Pada periode Kementerian Agama berikutnya eksistensi madrasah yang diarahkan pada tiga tuntutan minimal tersebut dimantapkan.¹³⁷

Menindaklanjuti kebijakan-kebijakan yang telah ada sebelumnya, kurikulum madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam seharusnya memiliki dua komponen pokok. Di antaranya pendidikan umum dan pendidikan Islam. Oleh karena status madrasah pada semua jenjang telah disamakan dengan sekolah umum, kurikulum komponen pendidikan umum pada madrasah mengikuti kurikulum yang ditetapkan Depdiknas. Untuk mengatasi tumpang tindih yang memberatkan madrasah, Azyumardi Azra berpendapat bahwa hendaknya madrasah diberi wewenang dan tanggung jawab untuk pengembangan, perencanaan, penerapan, dan evaluasi kurikulum dengan tidak mengabaikan standar dasar nasional. Menurut Azyumardi Azra, paradigma

¹³⁷ Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 197.

kurikulum seperti itu lebih populer disebut sebagai Kurikulum Berbasis Sekolah, dalam konteks ini yang dimaksud ialah madrasah.

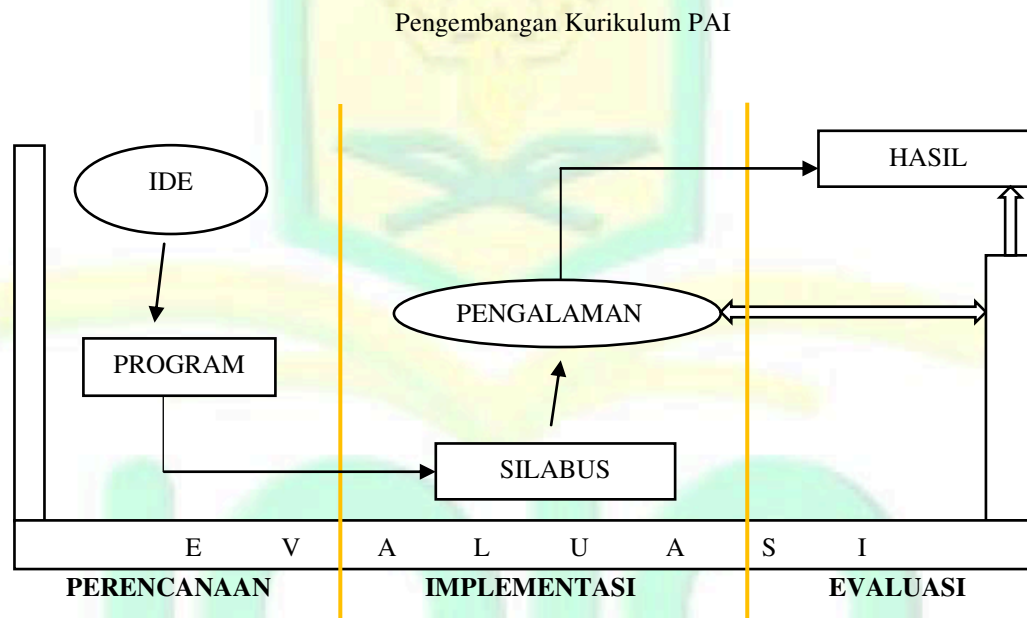
Pengembangan dan penerapan Kurikulum Berbasis Sekolah (School Based Curriculum) ini harus menjadi titik tolak dari pembaruan sistem pendidikan madrasah secara keseluruhan. Strategi perencanaan pengembangan Kurikulum Berbasis Sekolah mencakup langkah perencanaan, penerapan, dan evaluasi. Untuk itu dalam pengembangannya harus melibatkan semua unsur yang ada di dalam sekolah. Perencanaan Kurikulum Berbasis Sekolah mencakup tahapan analisis situasional, formulasi tujuan-tujuan pendidikan, perancangan dan seleksi muatan, serta rencana penerapan dan rencana penilaian.

Kesimpulan yang dapat diambil dari uraian di atas adalah, Kurikulum Berbasis Sekolah merupakan inisiatif terbaik untuk pembaruan dan peningkatan kualitas madrasah pada masa otonomi. Oleh sebab itu, sebagai pendidikan yang berbasis masyarakat, madrasah umumnya memiliki potensi yang lebih besar tidak hanya untuk mengembangkan Pendidikan Berbasis Sekolah, tetapi lebih luas lagi yaitu meningkatkan kualitas pendidikannya dengan mengikutsertakan seluruh elemen yang ada.¹³⁸

Jelas bahwa Kurikulum Berbasis Sekolah merupakan bentuk kurikulum yang diramu dari khazanah lokal dengan mengambil sekolah sebagai

¹³⁸ Azyumardi Azra, Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru (Jakarta: Logos, 2000), 100.

laboratorium atau alat yang paham betul terhadap kondisi peserta didiknya, dengan demikian, Kurikulum Berbasis Sekolah benar-benar peka terhadap realitas lembaganya sehingga akan lebih mudah untuk diaktualisasikan dalam madrasah.¹³⁹ Seperti halnya Azyumardi Azra, Muhaimin juga memberikan gagasan tentang pengembangan kurikulum melalui tahapan perencanaan, penerapan, dan evaluasi. Yang menjadi perbedaan dari masing-masing tokoh yakni ide pengembangan dalam program yang digambarkan pada bagan berikut:



Bagan tersebut menggambarkan bahwa dalam mengembangkan kurikulum dimulai dari kegiatan perencanaan kurikulum. Dalam menyusun perencanaan

¹³⁹ Ninik Masruroh dan Umiarso, *Modernisasi Pendidikan Islam ala Azyumardi Azra* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 220.

ini didahului oleh ide-ide yang akan dituangkan dan dikembangkan dalam program. Ide kurikulum bisa berasal dari:¹⁴⁰

1. Visi yang dicanangkan

Visi (vision) adalah the statement of ideas or hope, yakni pernyataan atau cita-cita tentang harapan-harapan yang ingin dicapai oleh suatu lembaga pendidikan dalam jangka panjang.

2. Kebutuhan stakeholders (siswa, masyarakat, pengguna lulusan), dan kebutuhan untuk studi lanjut.

3. Hasil evaluasi kurikulum sebelumnya dan tuntutan perkembangan iptek dan zaman.

4. Pandangan-pandangan para pakar dengan berbagai latar belakangnya.

5. Kecenderungan era globalisasi, yang menuntut seseorang untuk memiliki etos belajar sepanjang hayat, melek sosial, ekonomi, politik, budaya, dan teknologi.

Kelima ide tersebut kemudian diramu sedemikian rupa untuk dikembangkan dalam program atau kurikulum sebagai dokumen, yang antara lain berisi: informasi dan jenis dokumen yang akan dihasilkan, bentuk atau format silabus, dan komponen-komponen kurikulum yang harus dikembangkan. Apa yang tertuang dalam dokumen tersebut kemudian dikembangkan dan disosialisasikan dalam proses pelaksanaannya yang dapat berupa pengembangan kurikulum dalam bentuk satuan acara pembelajaran atau SAP,

¹⁴⁰ Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam, 12.

proses pembelajaran di kelas atau di luar kelas, serta evaluasi pembelajaran, sehingga diketahui tingkat efisiensi dan efektifitasnya.

Dari evaluasi ini akan diperoleh umpan balik (feed back) untuk digunakan dalam penyempurnaan kurikulum berikutnya. Dengan demikian, proses pengembangan kurikulum menuntut adanya evaluasi secara berkelanjutan mulai dari perencanaan, implementasi hingga evaluasinya itu sendiri.¹⁴¹ Karena itu, pengembangan kurikulum PAI di madrasah perlu dilakukan secara terus menerus guna merespon dan mengantisipasi perkembangan dan tuntutan yang ada tanpa harus menunggu pergantian Menteri Pendidikan Nasional atau Menteri Agama. Apalagi saat ini masyarakat sudah memasuki era globalisasi, baik di bidang iptek maupun sosial, politik, budaya, dan etika. Hal ini akan berimplikasi pada banyaknya masalah pendidikan yang harus segera diatasi tanpa harus menunggu keputusan dari atas.¹⁴²

Berbeda lagi dengan pengembangan kurikulum berdasarkan pemikiran Imam Suprayogo. Menurut Imam Suprayogo, pengembangan kurikulum hendaknya dilakukan melalui perubahan yang tidak hanya terkait dengan kurikulum saja, namun juga melalui perubahan semua aspek yang berhubungan dengan pendidikan. Seperti halnya cara mengajar guru yang hanya menerangkan pelajaran, sementara para siswa terus duduk dan mendengarkan, hal tersebut sudah tidak sesuai dengan kondisi zaman saat ini.

¹⁴¹ Ibid., 13.

¹⁴² Ibid., 14.

Oleh karena itu, guru dituntut untuk menjadi lebih kreatif dalam menjadikan siswanya aktif. Kurikulum yang dibutuhkan saat ini adalah kurikulum yang bukan hanya menghasilkan out put atau lulusan yang dapat memasuki lapangan pekerjaan yang layak saja, namun juga dapat mengikuti perkembangan dan perubahan zaman yang tentunya tidak menyimpang dari pedoman Islam, yakni al-Qur'an dan hadis, mengingat mayoritas penduduk di Indonesia beragama Islam.¹⁴³

Meskipun secara substansial hampir sama dengan pemikiran tokoh yang lain, bahkan tujuannya pun sebenarnya sama, namun gagasan Imam Suprayogo dalam merumuskan konsep pengembangan kurikulum di madrasah lebih ditekankan pada pembahasan mengenai lembaga pendidikan yang bertipe ideal. Lembaga pendidikan yang bertipe ideal tersebut adalah lembaga pendidikan yang mampu mengembangkan potensi spiritual serta akhlak para siswa sehingga siswa tidak hanya mampu megembangkan aspek intelektual saja, namun juga mampu mengembangkan potensi sosial maupun keterampilannya.

Karena lembaga pendidikan Islam yang bertipe ideal tersebut diperebutkan banyak orang, maka muncul istilah lembaga pendidikan integratif yang saat ini biasa disebut dengan sekolah (madrasah) terpadu, sekolah (madrasah) model, dan masih banyak lagi sekolah (madrasah)

¹⁴³ Imam Suprayogo, *Quo Vadis Madrasah: Gagasan, Aksi, dan Solusi Pembangunan Madrasah* (Yogyakarta, Hikayat Publishing, 2007), 55-56.

unggulan lain yang mengedepankan kualitas lembaganya berdasarkan sebutan yang digambarkan. Lembaga pendidikan yang menamakan diri sebagai sekolah (madrasah) integratif hendaknya integratif dalam kurikulum serta model pembelajaran yang dikembangkan, yakni dengan memadukan antara pengembangan kehidupan keagamaan dan pengembangan intelektual serta keterampilan. Dengan integritas tersebut, diharapkan lulusan dapat memiliki kepribadian dalam kedewasaan yang utuh, yakni dewasa secara spiritual, dewasa secara intelektual, dewasa secara sosial, dan dewasa dalam kecakapan hidupnya. Istilah lain untuk sekolah (madrasah) integratif tersebut adalah sekolah atau madrasah terpadu.¹⁴⁴

Dalam pembahasan sebelumnya, telah dipaparkan bahwa lembaga pendidikan yang integratif bernuansa Islam perlu menjadikan al-Qur'an dan sunnah sebagai landasan penyelenggaraan pendidikan secara menyeluruh, baik pada tataran teologis, filosofis, teoritis akademis, dan bahkan pada tataran praktisnya. Al-Qur'an sebagai petunjuk, pembeda, dan juga *syifa' mā fi shudūr* (obat dari penyakit yang ada dalam dada) pasti berbicara tentang pendidikan. Pendidikan menyangkut kebutuhan hakiki seseorang. Ajaran yang bersifat universal ini tidak mungkin secara operasional dan mendetail memperbincangkan pendidikan yang amat mendasar ini.

¹⁴⁴ Ibid., 56-57.

Ayat al-Qur'an yang memberikan petunjuk jelas tentang bagaimana mendidik yang seharusnya dilakukan, dapat dibaca misalnya dalam QS. Al-Jumu'ah: 2, yang artinya:

Dia (Allah) yang telah membangkitkan seorang rasul yang ummiy di antara kamu semua, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, dan mensucikan mereka, dan yang mengajarkan kitab dan hikmah. Padahal sebelumnya ia berada dalam kesesatan yang nyata.¹⁴⁵

Dengan mengkaji sebagian isi al-Qur'an tersebut maka menjadi jelas bagaimana kitab suci yang diturunkan lewat Muhammad Saw. memberikan petunjuk tentang bagaimana pendidikan itu seharusnya dilakukan. Prinsip-prinsip tersebut rasanya masih banyak yang belum ditangkap dan semestinya dijadikan pedoman operasional dalam pengembangan pendidikan, baik di institusi keluarga, sekolah, maupun masyarakat.¹⁴⁶ Pembelajaran juga dapat dilalui dengan kegiatan menyelesaikan dan mengalami secara langsung problem-problem nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hidupnya, seseorang tidak mungkin terhindar dari persoalan-persoalan yang melilit, misalnya problem yang menyangkut ekonomi, hubungan antar pribadi, kesehatan, perumahan, pendidikan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Tatkala seseorang berhadapan langsung dengan problem-problem sebagaimana disebutkan itu bisa jadi akan menggunakan al-Qur'an atau hadis

¹⁴⁵ Imam Suprayogo, *Pendidikan Berparadigma Al-Qur'an: Pergulatan Membangun Tradisi dan Aksi Pendidikan Islam* (Malang: UIN Press Malang, 2004), 7.

¹⁴⁶ *Ibid.*, 9.

untuk menyelesaikannya. Proses untuk mendapatkan jawaban dari kitab suci seperti itu akan lebih efektif dari sudut pandang pembelajaran.¹⁴⁷

Jika terdapat perjenjangan pendidikan mulai dari tingkat dasar pendidikan tinggi, maka strategi pembelajaran pada masing-masing jenjang yang ditinjau dari segi keeluasaan dan kedalamannya haruslah disesuaikan dengan tingkat usia siswa yang bersangkutan. Akan tetapi perlu diusahakan agar dapat merangkum isi al-Qur'an itu sendiri secara utuh. Selain itu, masing-masing tingkat juga menggunakan pendekatan yang berbeda, misalnya untuk tingkat dasar dapat ditempuh dengan cara doktriner, yang hal itu akan dibedakan untuk pembelajaran tingkat pendidikan menengah dan bahkan tingkat pendidikan tinggi yang seharusnya lebih menggunakan piranti akal atau rasional, misalnya dengan menerapkan metode-metode diskusi, seminar, debat, dan lainnya.

Sebagai contoh, pendidikan Islam tingkat dasar dimulai dengan pengenalan sifat-sifat Allah, yang harus diketahui adalah ar-Rahman dan ar-Rahim. Proses pendidikan tidak harus menekankan para siswa menghafal segala sesuatu, tanpa disertai kemampuan memahami makna dari materi hafalan itu secara mendalam. Pemaknaan itu secara sederhana dapat dihayati oleh anak-anak dalam kehidupan mereka sendiri. Melalui proses ini, dapat dikenalkan bahkan dapat dimasukkan pada sanubari anak-anak makna sifat-sifat terpuji yang harus dikembangkan dalam berbagai kehidupan nyata.

¹⁴⁷ Ibid., 23.

Pengajaran dengan bahan seperti itu akan diperluas dengan berbagai disiplin ilmu lainnya dan bahkan dengan ilmu-ilmu sosial yang telah mereka kenali. Misalnya pertanyaan apa yang akan terjadi jika sifat Allah yang Agung itu sedikitpun tidak dijadikan dasar dalam berperilaku umat manusia. Yang terjadi adalah perang, berebut harta benda, kekuasaan, saling merusak, atau perilaku-perilaku yang lebih jahat dari pada perilaku dalam kehidupan binatang sekalipun. Kajian seperti ini dapat digunakan untuk memahami fenomena sosial yang lebih luas dan mendalam, lebih dari sekedar pengenalan dan bahkan menghafal tanpa diperoleh makna yang sesungguhnya dari pada yang dipelajari secara formal.¹⁴⁸

C. Pemberdayaan SDM di Madrasah

Wahid Murni menegaskan, era globalisasi membuka mata setiap orang untuk melihat ke masa depan yang penuh tantangan dan persaingan. Era kesejahteraan yang tidak dibatasi waktu dan tempat membuat sumber daya manusia (SDM) yang ada selalu ingin meningkatkan kualitas dirinya agar tidak tertinggal dari yang lain. Perubahan-perubahan ini penting dan terkadang mempunyai akibat jangka panjang yang luas.¹⁴⁹ Sedangkan menurut Moh. Kasirah, di zaman modern yang memasuki era abad 21 ini, sebuah realitas masyarakat global akan mengalami masa-masa yang penuh

¹⁴⁸ Ibid., 24-25.

¹⁴⁹ Mudjia Raharjo, *Quo Vadis Pendidikan Islam: Pembacaan Realitas Pendidikan Islam, Sosial, dan Keagamaan* (Malang: UIN Malang Press, 2006), 183.

tantangan dan persaingan. Padahal bangsa Indonesia masih merasakan dan menghadapi kenyataan adanya berbagai kepincangan dan kekurangan, baik dibidang material, spiritual, maupun rendahnya kualitas SDM yang akan membangun bangsa ini. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila tema pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas adalah tema-tema yang marak diperbincangkan saat ini.¹⁵⁰

Pengembangan SDM pada hakekatnya merupakan upaya untuk mengaktualisasikan dan mengembangkan seluruh potensi manusia secara terpadu untuk mencapai kompetensinya sebagai subyek pembangunan sesuai dengan tuntutan zamannya. SDM yang dibutuhkan dalam pembangunan di era globalisasi sekarang ini paling tidak ada 5 kompetensi yang harus dimiliki, yaitu:

1. Kompetensi akademik, yaitu berkaitan dengan penguasaan dan kemampuan metodologis keilmuan dalam rangka penguasaan dan pengembangan ilmu dan teknologi.
2. Kompetensi profesional, yaitu berkaitan dengan wawasan, perilaku, dan kemampuan penerapan ilmu dan teknologi dalam realitas kehidupan masyarakat.
3. Kompetensi dalam menghadapi perubahan, yaitu kemampuan untuk mengantisipasi, mengelola, dan memanfaatkan perubahan untuk mencapai keunggulan di masa depan.

¹⁵⁰ Ibid., 61.

4. Kompetensi kecendekiaan, yaitu kemampuan untuk memberikan perhatian dan kepedulian nyata kepada sesama manusia atau kepedulian sosial.
5. Kompetensi nilai-nilai dan sikap, yaitu kemampuan untuk selalu menempatkan segala persoalan dalam kerangka nilai-nilai Pancasila, budaya bangsa, iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹⁵¹

Dalam kaitannya dengan sumber daya manusia yang berada di lingkungan madrasah, seorang kepala madrasah mempunyai peran yang sentral bagi kemajuan mutu pendidikan di madrasah. Secara keseluruhan, pada bab sebelumnya telah diterangkan bahwasanya bagian dari tugas pimpinan lembaga pendidikan Islam adalah merumuskan visi dan misi secara jelas. Namun pada kenyataannya, menjadi pemimpin tidaklah mudah karena setiap manusia memiliki karakteristik, watak, dan perilaku yang berbeda-beda. Sifat dan ciri yang beragam tersebut menyebabkan mereka tidak sedemikian mudah diajak untuk mencapai satu tujuan yang sama. Perbedaan yang bersifat individual maupun kelompok disebabkan oleh perbedaan latar belakang hidup, tingkat ekonomi, budaya, ideologi, latar belakang pendidikan dan mungkin pembawaan sejak lahir. Meskipun seperti itu, terkadang masih ada seorang pemimpin yang dapat mengatur anggotanya dengan mudah. Sebab, ternyata masing-masing orang telah memiliki kemampuan menata diri sendiri tanpa intervensi pihak luar.¹⁵² Pemimpin seperti itulah yang

¹⁵¹ Ibid., 62.

¹⁵² Suprayogo, Quo Vadis Madrasah, 49.

dibutuhkan oleh lembaga pendidikan agar dapat mengembangkan pendidikan di lembaga dan sangat cocok dijadikan sebagai kepala madrasah.

Untuk membentuk kepemimpinan yang diharapkan tersebut, Imam Suprayogo menegaskan bahwa memimpin orang perlu menggunakan prinsip-prinsip dasar yang dijadikan kekuatan penggerak organisasi lembaga pendidikan Islam seperti madrasah, yakni: (1) sebagai kunci utama yang harus ditumbuhkembangkan pada semua lapisan organisasi adalah rasa cinta pada lembaga, (2) sikap mental yang harus dibangun selanjutnya adalah keikhlasan, (3) kemudian kesadaran bertanggung jawab, yakni sikap mental yang harus dibangun secara bersama (4) prinsip penting yang lainnya adalah bahwa seorang pemimpin harus mempertegas keyakinannya bahwa Allah adalah Zat yang harus selalu menjadi sentral perhatian, baik dalam pengabdian (ibadah) maupun dalam pertolongan.¹⁵³ Prinsip-prinsip tersebut menjadi salah satu faktor yang dapat memberdayakan kepala madrasah berkualitas.

Sebagaimana ulasan sebelumnya, secara umum sosok pemimpin merupakan aspek yang sangat mempengaruhi gerak dan hasil kerja personelya sehingga dapat membawa perubahan dalam organisasi, baik dalam mengembangkan visi, misi, dan tujuan lembaga pendidikan Islam (madrasah). Prinsip-prinsip yang dijelaskan Imam Suprayogo hampir sama dengan pembahasan pada bab sebelumnya yang mengurai tentang beberapa persyaratan kepala madrasah untuk menciptakan lembaga pendidikan yang

¹⁵³ Ibid., 50.

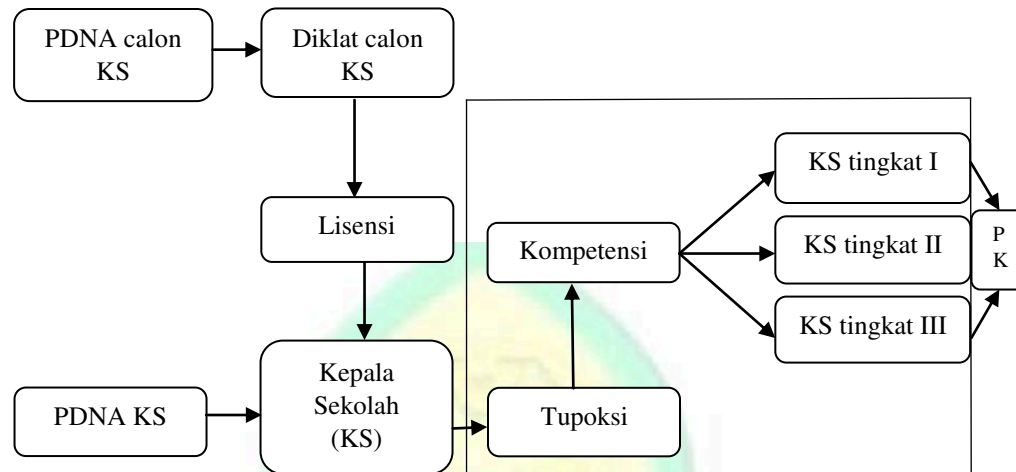
efektif melalui pemenuhan kesehatan jasmani dan rohani, kekukuhan dalam mencapai tujuan, semangat, kecakapan dalam memberi bimbingan, kebijaksanaan dalam mengambil keputusan, jujur, cerdas, dan kecakapan dalam mengajar serta dapat menunjukkan bahwa pemimpin tersebut bisa dipercaya.

Pemberdayaan kepala madrasah dapat dilakukan dengan kegiatan yang lebih riil lagi, yakni melalui Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB). Pengembangan keprofesian berkelanjutan kepala madrasah adalah kegiatan yang mengarah pada seluruh pembelajaran formal dan informal yang mampu meningkatkan kepala madrasah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Fokus PKB kepala madrasah meliputi kebutuhan individual, sekolah, lokal, regional, dan nasional. Tujuan PKB adalah: (1) membantu seseorang secara lebih efektif untuk mencapai standar yang lebih tinggi dalam pekerjaannya bagi yang bekerja dan lebih tinggi hasil belajarnya bagi yang belajar, (2) meningkatkan retensi dan rekrutmen, (3) memberikan kontribusi positif terhadap etos kerja dan mampu memotivasi, (4) menciptakan masyarakat untuk belajar sepanjang hayat, (5) mewujudkan tanggung jawab seorang profesional untuk selalu meningkatkan keprofesiannya, serta (6) menghemat uang karena biaya merekrut dan menginduksi guru baru relatif mahal.¹⁵⁴

¹⁵⁴ Surya Dharma, et al., Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Kepala Sekolah/Madrasah Tingkat 1 (Jakarta: Direktorat Tenaga Kependidikan, 2010), 12.

Ruang lingkup program pengembangan keprofesian kepala madrasah berkelanjutan adalah pelatihan profesional, pendidikan profesional, dan dukungan profesional. Contoh pelatihan profesional adalah kursus singkat, workshop, konferensi, coaching and mentoring, serta kegiatan lain yang lebih menekankan pada keterampilan. Contoh pendidikan profesional adalah kursus jangka panjang, studi lanjut yang menekankan pada pengetahuan, dan pengetahuan berbasis penelitian. Contoh dukungan profesional adalah kegiatan yang menekankan pada peningkatan pengalaman kerja dan kinerja.

Kegiatan pengembangan keprofesian kepala madrasah berkelanjutan dapat berupa kegiatan pemeringkatan kepala madrasah, mengikuti bimbingan teknis, mengikuti kursus, mengikuti seminar, belajar mandiri, dan membuat karya tulis ilmiah serta mempublikasikannya. Jadi, pemeringkatan kepala madrasah hanyalah salah satu bentuk kegiatan pengembangan keprofesian kepala madrasah berkelanjutan. Adapun framework untuk CPD (Continuous Professional Development) terkait dengan lisensi dan penilaian kinerja (performance appraisal) sebagai berikut:



Keterangan: —: Ruang Lingkup CPD

PK: Peningkatan Kinerja¹⁵⁵

Pendidikan merupakan institusi sosial yang produknya dapat berlangsung lama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Karena itu, Imam Suprayogo berpendapat bahwa untuk mencapai tujuan standarisasi pendidikan, madrasah hendaknya diukur pada kemampuan guru atau pengajarnya. Terkait dengan betapa pentingnya keberadaan guru dalam praktik pendidikan, kendati masih perlu penjelasan yang lebih jauh, Imam Suprayogo menegaskan persetujuannya dengan konsep salah seorang ahli pendidikan bahwa “all is nothing, but teacher”. Artinya, apapun upaya yang dilakukan untuk mencapai derajat kemajuan pendidikan, termasuk pendidikan madrasah, maka guru tetap merupakan bagian paling penting dalam proses pendidikan. Karena itu, menempatkan guru dalam posisi terhormat merupakan

¹⁵⁵ Ibid., 12-13.

cara mencapai standar pendidikan madrasah, maka dari itu harus diberdayakan, meskipun hal tersebut bukan satu-satunya cara mencapai standar pendidikan.

Keadaan guru madrasah ataupun guru agama di berbagai jenjang pendidikan di Indonesia masih memprihatinkan, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Di lingkungan madrasah problem tersebut masih ditambah lagi dengan adanya “mismatched” yakni tidak adanya kesesuaian antara bidang studi yang dimiliki oleh guru dengan mata pelajaran yang diajarkan. Tidak sedikit yang terjadi di lapangan guru lulusan Fakultas/Jurusan Tarbiyah mengajar Bahasa Inggris, Matematika, IPA, IPS, dan lain-lain. Problem seperti ini sudah lama dirasakan, tetapi selama ini pula juga belum berhasil diselesaikan. Bahkan karena produser guru agama seperti UIN/IAIN/STAIN masih saja meneruskan programnya yang lama, maka persoalan ini tidak akan pernah selesai. Padahal, secara teoritik “mismatched” sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip profesionalisme yang seharusnya segera dikembangkan. Secara disadari maupun tidak, masalah tersebut sangat serius sehingga harus segera diselesaikan dengan baik secara akademik melalui peningkatan kualitas guru yang terlanjur diangkat maupun secara struktural dengan melibatkan pejabat-pejabat struktural yang berwenang dalam penyelenggaraan pendidikan madrasah.¹⁵⁶

¹⁵⁶ Suprayogo, Pendidikan Berparadigma Al-*Qur'an*, 236-237.

Berangkat dari pemikiran sederhana tersebut di atas, maka dalam merancang standarisasi madrasah sebagai upaya meningkatkan kualitas agar lembaga pendidikan Islam tetap relevan dengan tuntutan zaman, maka faktor guru harus menjadi perhatian pertama dan utama. Sebuah madrasah hendaknya tidak didirikan tanpa didukung oleh sejumlah guru yang layak untuk mengajar serta jumlah guru yang sekiranya cukup. Demikian pula harus terdapat kejelasan bahwa guru yang mengajar di madrasah harus terjamin tingkat kelayakan hidupnya. Tidak boleh terjadi guru madrasah mendapatkan honorarium di bawah standar upah minimal di daerahnya masing-masing. Demikian pula ketika menilai tingkat kemajuan madrasah faktor kualitas guru harus menjadi perhatian utama. Imam Suprayogo mengutip rumusan peran guru sebagaimana yang dikemukakan oleh seorang pemimpin Jerman bahwa “jika kalian ingin berhasil membangun pendidikan, maka muliakanlah gurugurumu”. Rumusan ini akan mengantarkan bangsa Indonesia pada rumusan yang jelas, bahwa memang gurulah kunci dari segala-galanya bagi jalannya lembaga pendidikan.¹⁵⁷

Pembahasan mengenai pemberdayaan guru merupakan suatu hal yang tidak boleh ditinggalkan karena guru merupakan tokoh utama yang terlibat langsung dengan proses pendidikan. Apabila guru yang dijadikan sebagai fasilitator di kelas kurang profesional, maka akan berdampak pada jalannya kegiatan pendidikan beserta hasil yang diperoleh pendidikan itu sendiri. Oleh

¹⁵⁷ Ibid., 237-238.

karenanya, sekolah atau madrasah perlu melakukan perekrutan yang selektif bahkan tidak hanya sebatas itu, meskipun guru yang direkrut sudah memenuhi syarat, pelatihan dalam rangka meningkatkan profesionalisme guru harus tetap diselenggarakan.

Ada beberapa tokoh yang mengatakan bahwa pendidikan guru harus dirancang dan diselenggarakan secara khusus agar dapat melahirkan guru yang profesional. Dari hasil telaah terhadap istilah-istilah guru dalam lingkungan pendidikan Islam ditemukan bahwa guru adalah orang yang memiliki karakteristik sebagai berikut; (a) komitmen terhadap profesionalitas yang melekat pada dirinya sikap dedikatif, komitmen terhadap mutu proses dan hasil kerja, serta sikap continuous improvement; (b) menguasai ilmu dan mampu mengembangkannya serta menjelaskan fungsinya dalam kehidupan, menjelaskan dimensi teoretis dan praktisnya sekaligus melakukan transfer ilmu pengetahuan, internalisasi serta amaliah (implementasi); (c) mendidik dan menyiapkan peserta didik agar mampu berkreasi serta mampu mengatur dan memelihara hasil kreasinya untuk tidak menimbulkan malapetaka bagi dirinya, masyarakat dan alam sekitarnya; (d) mampu menjadi model atau sentral identifikasi diri¹⁵⁸ atau menjadi pusat anutan, teladan, dan konsultan bagi peserta didiknya, serta (e) mampu bertanggung jawab dalam membangun peradaban di masa depan.

¹⁵⁸ Raharjo, Quo Vadis Pendidikan Islam, 108.

Jika asumsi-asumsi tersebut dijadikan fokus perhatian, maka perlu dicarikan alternatif model pengembangan guru. Kajian ini lebih difokuskan pada penyiapan calon guru di Perguruan Tinggi Islam, terutama pada Fakultas/Jurusan Tarbiyah sebagai Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Islam (LPTKI). Proses penyiapan tersebut perlu bertolak dari beberapa pandangan sebagai berikut.

Pertama, memposisikan mahasiswa (calon guru) sebagai “santri” di LPTKI, guna membina seperangkat kepribadian yang terkait dengan model atau sentral identifikasi diri atau menjadi pusat anutan dan teladan serta konsultan bagi peserta didiknya. Sebagai “santri”, ia akan berusaha meneladani dan mengikuti jejak dosen-dosennya, terutama dari segi etos belajarnya, etos mengajarnya, etos pengembangan keilmuannya, dedikasinya maupun etos amaliah ibadahnya dan perilaku sehari-hari. Sebagai implikasinya, LPTKI seyogyanya mampu menciptakan suasana yang kondusif bagi terwujudnya transinternalisasi nilai-nilai atau berbagai etos tersebut. “Nyantri” bukan berarti sebagai santri (mahasiswa) layaknya anak manis yang patuh, pandai menyesuaikan diri dengan kyai (dosen) menuju pola pemikiran atau jalan pemikiran kyainya (dosennya) sehingga pendidikan akan mengarah pada upaya domestikasi atau sebagai upaya penjinakan. Tetapi “nyantri” bagi mahasiswa yang cara berfikirnya sudah relatif dewasa, dimaksudkan sebagai upaya menentukan pilihan-pilihan mana diantara etos-etos para kyai yang patut

diteladani dengan disertai argumentasi dan reasoning yang kokoh, serta bertolak dari satu pandangan yang ada bahwa masing-masing manusia memiliki kelebihan dan kelemahan. Sisi kelebihannya diteladani sedangkan sisi kelemahannya ditinggalkan. Nyantri diharapkan mampu membangun etos baru yang diperlukan untuk masyarakat atau para peserta didik dalam kehidupan mereka di masa depan.¹⁵⁹

Kedua, memposisikan mahasiswa (calon guru) sebagai *thalib al-‘ilm* di LPTKI. Kehadiran mahasiswa di LPTKI adalah untuk mencari ilmu dari para dosennya atau seperangkat keilmuan yang dikembangkan di LPTKI. Ia mencari dan berusaha mendapatkan *al-‘ilm* dan kemampuan pengembangannya melalui proses pendidikan di LPTKI, baik secara teoritis maupun praktis. Sebagai implikasinya, maka LPTKI dituntut untuk memberikan layanan terhadap *thalib ‘ilm* secara profesional.¹⁶⁰ Ketiga, menciptakan interaksi mendidik di LPTKI terutama antara pendidik dengan mahasiswa, antara para karyawan dengan mahasiswa, atau antara mahasiswa dengan mahasiswa.¹⁶¹

Pemberdayaan guru di madrasah tidak hanya berupa pelatihan untuk menjadi profesional, namun juga meliputi kesejahteraan untuk menyambung kehidupan ekonomi keluarganya. Madrasah lebih identik dengan kesederhanaan dan kondisi yang memprihatinkan. Siapa saja yang

¹⁵⁹ Ibid., 109-110.

¹⁶⁰ Ibid.

¹⁶¹ Ibid., 112.

berkesempatan menelusuri banyak desa di Indonesia akan menemukan madrasah yang keadaannya sangat memprihatinkan. Bangunannya sederhana, fasilitas pendidikan, kurikulum, termasuk para gurunya berjalan apa adanya. Kesederhanaan itu lebih tampak lagi bagi madrasah yang berada di tengah-tengah masyarakat miskin. Para guru madrasah tertinggal ini biasanya selain terdiri atas beberapa guru bantuan pemerintah yang jumlahnya terbatas, juga berasal dari tenaga honorarium yang tidak masuk akal karena jumlah honor yang diterima pada umumnya sangat kecil.¹⁶²

Bagi madrasah yang bernasib terbelakang, yang diperlukan bukanlah konsep-konsep bagaimana memenangkan kompetisi, membangun kepercayaan diri, kemandirian, dan seterusnya, melainkan uluran tangan agar bisa memperpanjang eksistensi mereka. Jadi persoalan yang sangat riil bagi madrasah terbelakang adalah bagaimana cara untuk membayar honorarium pada guru yang besarnya minimal dapat digunakan untuk menyambung hidup diri dan keluarganya. Oleh karena itu program guru bantu diperkenalkan oleh pemerintah untuk membantu madrasah. Sasaran bantuan-bantuan keuangan bukan saja murid madrasah, melainkan yang lebih strategis adalah kehidupan para gurunya. Para guru tidak hanya membutuhkan sapaan dan fasilitas, tetapi yang lebih dari itu adalah dibantu kehidupannya. Hal ini penting karena para guru madrasah banyak yang bukan berasal dari kelompok ekonomi kuat.¹⁶³

¹⁶² Suprayogo, *Quo Vadis Madrasah*, 70-71.

¹⁶³ *Ibid.*

Selain perhatian terhadap kesejahteraan guru, terlepas dari perdebatan tentang apa yang disebut sebagai marginalisasi ilmu-ilmu atau jurusan-jurusan agama di STAIN/IAIN/UIN, madrasah di Indonesia memiliki pengalaman yang distingtif jika dibandingkan dengan madrasah di negara Muslim lainnya. Dalam konteks sejarah dan perjalanan Islam di Indonesia, madrasah pernah berada pada posisi pinggiran belaka. Hal tersebut berlangsung dalam jangka waktu yang panjang dengan segala konsekuensinya, termasuk dalam hal kualitas beserta pendanaan dari negara. Oleh Karena itu, apabila menginginkan cita-cita dan harapan dari umat yang konsisten, perlu adanya langkah-langkah terobosan untuk kembali memperkuat MA tafaqquh fi al-din. Jika tidak, maka pada akhirnya akan sulit untuk mengharapkan keberlangsungan jurusan-jurusan agama pada perguruan tinggi Islam. Melalui pengarusutamaan (mainstreaming), harkat dan martabat madrasah dapat terangkat sehingga semakin banyak orangtua yang menyekolahkan anak-anak mereka di madrasah.¹⁶⁴

Setiap pemikiran dari para tokoh pendidikan mempunyai ciri khas masing-masing. Untuk lebih memperjelas dalam menganalisis pengembangan madrasah di Indonesia perspektif Imam Suprayogo, maka dapat dibandingkan dengan tokoh lainnya. Adapun ciri khas pengembangan madrasah perspektif Imam Suprayogo apabila dibandingkan dengan tokoh yang lain akan dijelaskan pada tabel berikut ini:

¹⁶⁴ Azra, Pendidikan Islam, 103-104.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian terhadap konsep pengembangan madrasah di Indonesia perspektif Imam Suprayogo, maka dapat disimpulkan secara ringkas hasil kajian pada bab-bab terdahulu, yakni:

1. Peran masyarakat dalam peningkatan mutu pendidikan di madrasah perspektif Imam yakni melalui penyusunan POMG, PB3 dan komite madrasah yang terdiri dari wali murid. Komunikasi yang baik antara warga madrasah dengan POMG, BP3, dan komite madrasah dapat menunjang eksistensi dan kualitas madrasah. Oleh karenanya, madrasah merupakan lembaga pendidikan yang dapat dikatakan dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat.
2. Pengembangan kurikulum perspektif Imam Suprayogo berorientasi pada lembaga pendidikan yang bertipe ideal, dalam artian mampu mengembangkan potensi spiritual, akhlak, aspek intelektual, dan mengembangkan potensi sosial peserta didik. Oleh sebab itu, perlu dibentuk kurikulum integratif, yakni dengan mengintegrasikan antara pengembangan kehidupan keagamaan dan pengembangan intelektual serta keterampilan. Lembaga pendidikan integratif bernuansa Islam perlu menjadikan al-Qur'an

dan sunnah sebagai landasan penyelenggaraan pendidikan secara menyeluruh, baik pada tataran teologis, filosofis, teoretis akademis, maupun pada tataran praktis. Oleh karena itu, perlu dikembangkan bahan ajar yang mengaitkan (mengintegrasikan) ajaran yang bersumber dari ayat-ayat qawliyyah (al-Qur'an dan hadis) dengan ayat-ayat kawniyyah (alam semesta) secara utuh dan terpadu.

3. Pemberdayaan SDM di madrasah menurut Imam Suprayogo, meliputi pemberdayaan kepala madrasah dengan cara meningkatkan kinerjanya dan pemberdayaan guru melalui pemenuhan honorarium yang layak serta pembentukan guru yang profesional melalui visi dan misi Fakultas (Jurusan) Tarbiyah sebagai LPTK yang melahirkan guru madrasah yang berkualitas.

B. Saran

Sebelum mengakhiri hasil penelitian ini, peneliti mengemukakan beberapa saran kepada berbagai pihak, di antaranya kepada:

1. Pemerintah selaku pembuat kebijakan pendidikan, diharapkan mampu membuat kebijakan terutama dalam penyusunan kurikulum yang sesuai dengan perkembangan zaman dan dapat diikuti oleh semua lembaga pendidikan, serta memberikan perhatian secara adil pada setiap lembaga pendidikan yang ada di Indonesia, utamanya kesejahteraan madrasah.

2. Praktisi pendidikan di madrasah (kepala madrasah dan guru) hendaknya senantiasa melakukan usaha untuk berinovasi serta menggali kreativitas dalam memajukan pembelajaran di madrasah.
3. Masyarakat akan lebih baik lagi apabila memperkuat komunikasi dengan praktisi pendidikan, dalam konteks ini madrasah, agar dapat memajukan mutu madrasah guna mempertahankan eksistensinya agar dapat mengikuti perubahan zaman.



DAFTAR PUSTAKA

- Afifudin. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: CV Pustaka Setia, 2009.
- Ali, Mukti. Aliran Pikiran Islam Modern di Indonesia. Yogyakarta: Yayasan Mida, 1971.
- Azra, Azyumardi. Paradigma Baru Pendidikan Nasional: Rekonstruksi dan Demokratisasi. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002.
- _____. Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru. Jakarta: Logos, 2000.
- _____. Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Baharuddin. Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam menuju Pengelolaan Profesional dan Kompetitif. Malang: UIN Maliki Press, 2011.
- Choiri, Miftahul. Peran STAIN Ponorogo dalam Pemberdayaan Madrasah di Wilayah Karesidenan Madiun. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2012.
- Dakir. Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Dharma, Surya. et al. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Kepala Sekolah/Madrasah Tingkat 1. Jakarta: Direktorat Tenaga Kependidikan.

Hamalik, Oemar. Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.

Hamzah, Amir. Pendidikan dan Pengajaran Muhammadiyah dalam Masa Pembaharuan Semesta. Malang: Ken Mutia, 1989.

Hanafi. Pengembangan Kurikulum Perguruan Tinggi Agama Islam, Islamuna. Vol. 1. 2014.

Hasan, Sudirman. Rektor UIN Malang, Ngeblog, dan MURI, (online), (http://www.kompasiana.com/sudirmanhasan/rektor-uin-malang-ngeblog-dan-muri_55002fc4813311001efa72d6, diakses tanggal 26 Maret 2017).

Hasbullah. Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia: Lintasan Sejarah dan Perkembangannya. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Islam, Dewan Redaksi Ensiklopedia Ensiklopedi Islam. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.

Junaidi. Desain Pengembangan Mutu Madrasah: Konsep Rancangan Pengembangan Sekolah (RPS). Yogyakarta: Teras, 2011.

Khozin, et al. Manajemen Pemberdayaan Madrasah. Malang: UMM Press, 2006.

Khozin. Jejak-jejak Pendidikan Islam di Indonesia: Rekonstruksi Sejarah untuk Aksi. Malang: UMM Press, 2006.

Ma'arif, Syamsul. Revitalisasi Pendidikan Islam. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.

- Manab, Abdul. *Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif*. Yogyakarta: Kalimedia, 2015.
- Margono. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Komponen MKDK*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Masruroh, Ninik dan Umiarso. *Modernisasi Pendidikan Islam ala Azyumardi Azra*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- MKDP, Tim Pengembang Kurikulum. *Kurikulum dan Pembelajaran*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.
- Muhaimin. *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- _____. *Manajemen Pendidikan: Aplikasinya dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012.
- _____. *Nuansa Baru Pendidikan Islam: Mengurai Benang Kusut Dunia Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers: 2006.
- _____. *Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan Pendidikan Islam di Sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- _____. *Pemikiran dan Aktualisasi Pengembangan Pendidikan Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.

- _____. Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- _____. Rekonstruksi Pendidikan Islam; dari Paradigma Pengembangan, Manajemen Kelembagaan, Kurikulum hingga Strategi Pembelajaran. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- _____. Wacana Pengembangan Pendidikan Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Mujib, Abdul. dan Jusuf Mudzakkir. Ilmu Pendidikan Islam. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006.
- Munir, Abdullah. Menjadi Kepala Sekolah Efektif. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2010.
- Mutohar, Prim Masrokan. Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah: Strategi Peningkatan Mutu dan Daya Saing Lembaga Pendidikan Islam. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013.
- Penulis, Tim. Buku Pedoman Penulisan Skripsi Kuantitatif, Kualitatif, Library, dan PTK. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2016.
- Prijono, Onny S. dan A.W.M Pranarka. Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan, dan Implementasi. Jakarta: CSIS, 1996.
- Raharjo, Mudjia. Quo Vadis Pendidikan Islam: Pembacaan Realitas Pendidikan Islam, Sosial, dan Keagamaan. Malang: UIN Malang Press, 2006.

- Sanaky, Hujair AH. *Pembaruan Pendidikan Islam: Paradigma, Tipologi, dan Pemetaan menuju Masyarakat Madani Indonesia*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015.
- Sanjaya, Wina. *Kurikulum dan Pembelajaran*. Bandung: Kencana Prenada Media, 2008.
- Setyosari, Punaji. *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Shaleh, Abdul Rachman. *Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa: Visi, Misi, dan Aksi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Shulhan, Muwahid. *Model Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Kinerja Guru*. Yogyakarta: Teras, 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Cet. II*. Bandung: Alfabeta, 2006.
- Sukardi. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktisnya*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Suprayogo, Imam. [Menulis Bakda Subuh](http://imamsuprayogo.com/artikel/menulis-bakda-subuh), (online), (<http://imamsuprayogo.com/artikel/menulis-bakda-subuh>, diakses tanggal 6 April 2017).
- Suprayogo, Imam. *Nunut Berbicara tentang Kurikulum*, (online), (<http://imamsuprayogo.com/artikel/nunut-berbicara-tentang-kurikulum>, (ditulis tanggal 24 November 2012), diakses 12 April 2017).

_____. Pendidikan Berparadigma *Al-Qur'an: Pergulatan Membangun Tradisi dan Aksi Pendidikan Islam*. Malang: UIN Malang Press, 2004.

_____. Perubahan Kurikulum, (online), (<http://imamsuprayogo.com/artikel/perubahan-kurikulum>), (ditulis tanggal 23 Februari 2013), diakses 12 April 2017).

_____. *Quo Vadis Madrasah: Gagasan, Aksi, dan Solusi Pembangunan Madrasah Impian*. Yogyakarta: Hikayat Publishing, 2007.

Suprihatiningrum, Jamil. *Guru Profesional: Pedoman Kinerja, Kualifikasi, dan Kompetensi Guru*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013.

Tafsir, Ahmad. *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001.

Tim Penyusun. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

Ulum, Miftahul. *Menelusuri Jejak Madrasah di Indonesia: Teori-teori Lahirnya Madrasah di Indonesia*. Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2012.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Wathoni, Kharisul. *Dinamika Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2011.

Yunus, Mahmud. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung, 1993.

Zariah, Nurul. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

Zuhairini et al. *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

